

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2025 NOMOR 16

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

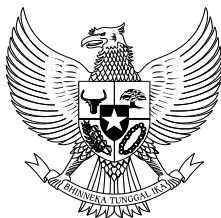
TANGGAL : 28 MEI 2025

NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR
21 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN
2025

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2025



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- b. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2022-2042 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 68);

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Daerah Kota Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Perubahan RKPD ini menguraikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2025 dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Mei 2025

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Mei 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ASEP SUHENDRAWAN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH

NIP. 19830207 200604 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 16 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA
SUKABUMI NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dokumen perencanaan tersebut terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke pemerintah daerah untuk disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan keikutsertaan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa RKPD dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 paling lambat bulan Mei Tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut maka harus segera dilakukan proses perubahan RKPD Tahun 2025 dengan terlebih dahulu menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan I.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Triwulan I di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi didapatkan data-data sebagai berikut:

- a. indikator makro masih belum ada realisasi pada Triwulan I ini, dan baru akan bisa diketahui ketika Triwulan IV, namun demikian harus diwaspadai beberapa indikator makro yang masih belum tercapai pada Tahun 2024 serta yang capaiannya masih cukup tinggi dibanding nasional dan provinsi. Indikator tersebut adalah Indeks Gini/Gini Rasio yang tahun 2024 capaiannya di angka 0,428 poin dan termasuk kesenjangan yang cukup tinggi dan harus terus diwaspadai.

Selanjutnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dimana capaian tahun 2024 adalah sebesar 8,34 persen dan angka tersebut masih diatas Provinsi serta Nasional;

- b. terdapat Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang masih belum tercapai sesuai target;
- c. realisasi anggaran Perangkat Daerah masih banyak yang dibawah 50 (lima puluh) persen terutama Perangkat Daerah yang memiliki anggaran bersumber Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi atau yang berupa kegiatan fisik infrastruktur;
- d. pencapaian indikator kinerja *outcome* dan *output* masih banyak yang belum tercapai bahkan belum mencapai 25 persen dari target yang ditentukan, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dan atau strategi lain untuk mencapai target tersebut.

Di sisi lain berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *an audited* pada Tahun 2024, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp49.872.498.010,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sepuluh Rupiah) yang terdiri dari SiLPA yang diarahkan dan yang tidak diarahkan. SiLPA tersebut tentunya harus dilakukan penyesuaian dan dipergunakan pada Perubahan RKPD terutama untuk SiLPA yang diarahkan seperti yang berasal dari BLUD Rumah Sakit, BLUD Puskesmas, Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lain-lainnya.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi serta adanya SiLPA tersebut, maka sebagaimana amanah ketentuan perundang-undangan, pada Tahun 2025 ini Pemerintah Daerah Kota Sukabumi akan melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang tentunya harus diawali dengan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Dalam proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi harus juga melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, serta juga menyesuaikan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dan kebijakan “Sembilan Langkah Jabar Istimewa”.

Arah kebijakan pembangunan pada perubahan RKPD Tahun 2025 diselenggarakan dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan memastikan tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional masuk menjadi salah satu aspek yang harus dipedomani. Tema atau isu tersebut yaitu:

- a. penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
- b. program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim;
- d. pengendalian inflasi daerah;
- e. peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. dukungan swasembada pangan; dan
- g. pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan UMKM.

Tahun 2025 merupakan pelaksanaan RPJMD Kota Sukabumi Periode Tahun 2025-2029 untuk tahun pertama yang secara simultan terkoordinasi dan secara bersamaan sedang disusun perubahan RKPD Tahun 2025 ini. Adapun tema pembangunan yang diambil pada penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah “Menguatkan Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dengan demikian maka penyusunan Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 akan ditujukan secara maksimal dalam mewujudkan tema tersebut. Tema tersebut sejalan dengan tema RKPD Provinsi Jawa Barat yaitu “Pemerataan Pembangunan untuk Mendukung Masyarakat Jawa Barat”, serta selaras dengan tema RKP yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Pada prinsip ketiga tema tersebut bertujuan untuk mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui pembangunan yang inklusif, merata dan berkelanjutan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun yang sama sebagai dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan (KUPA-PPASP) Tahun Anggaran 2025, dimana KUPA dan PPASP ini merupakan Kebijakan Umum APBD yang ditetapkan secara bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, hali ini sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Secara umum, dokumen Perubahan RKPD mempunyai nilai penting, antara lain:

- a. merupakan instrumen pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025-2029;
- b. menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah;
- c. mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025-2029;
- d. menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dalam penyusunan Rancangan perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun 2025; dan
- e. menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD untuk memastikan telah disusun berpedoman pada Perubahan RKPD.

Dengan demikian, RKPD dan Perubahannya mempunyai fungsi pokok:

- a. menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
- b. menjadi pedoman dalam penyusunan RPAPBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi satu tahun; dan
- c. menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

Seluruh dokumen perencanaan perubahan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran perubahan yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen KUPA dan PPASP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan konsistensi dan sinergi perencanaan dan penganggaran Kota Sukabumi.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

- a. menjadi pedoman penyusunan KUPA-PPASP APBD Tahun Anggaran 2025, serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- b. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan *output*/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- c. menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2025;
- d. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- e. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dari tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD sebagaimana pengaturan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, Rancangan Akhir RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD digunakan untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Kondisi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi awal dengan perkembangan keadaan yang melatarbelakangi pentingnya penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 seperti asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan yang memerlukan perubahan berupa

pergeseran kegiatan di dalam lingkup internal Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, sehingga diharapkan dengan dilaksanakannya RKPD Perubahan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025, disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2024
- III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- VI. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Hasil Evaluasi akan memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah.

Evaluasi pembangunan daerah ini menjelaskan tentang indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi pembangunan daerah merupakan data dan informasi yang menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD Tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

2.1.1.1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan perekonomian Tahun 2024 menunjukkan kinerja positif Kota Sukabumi dengan pertumbuhan sebesar 5,11 persen. Geliat positif dalam perekonomian di Kota Sukabumi terjadi pada seluruh kategori perekonomian, kecuali pada kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yang mengalami pertumbuhan negatif di 2024.

Pertumbuhan positif tertinggi di Tahun 2024 dialami oleh Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) yaitu mencapai 9,33 persen Kemudian diikuti oleh Kategori R,S,T,U (Jasa lainnya) sebesar 9,33 persen serta Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) sebesar 6,97 persen Sementara pertumbuhan negatif sebesar 0,02 persen dialami oleh kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas).

Secara umum, struktur perekonomian Kota Sukabumi masih didominasi oleh empat kategori lapangan usaha yaitu, Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sukabumi yaitu sebesar 36,83 persen, lalu kategori F (Konstruksi), H (Transportasi dan Pergudangan) dan kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi). Keempat kategori tersebut secara serentak berkontribusi sebesar 67,08 persen terhadap PDRB Kota Sukabumi Tahun 2024.

Lapangan Usaha dengan laju pertumbuhan dominan pada dua tahun terakhir adalah H (Transportasi), R,S,T,U (Jasa lainnya), A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) serta F (Konstruksi). Perbedaan pola pertumbuhan ekonomi tersebut tampaknya disebabkan oleh pengaruh pemulihan pasca dampak pandemi *Covid-19* masih terasa di Tahun 2022, sedangkan pada Tahun 2023-2024 geliat ekonomi Kota Sukabumi sudah bergerak normal sesuai potensi sumber daya yang dimiliki. Pertumbuhan ekonomi serta beberapa kategori yang dominan berpengaruh dalam kurun waktu tiga tahun terakhir digambarkan pada grafik berikut ini.

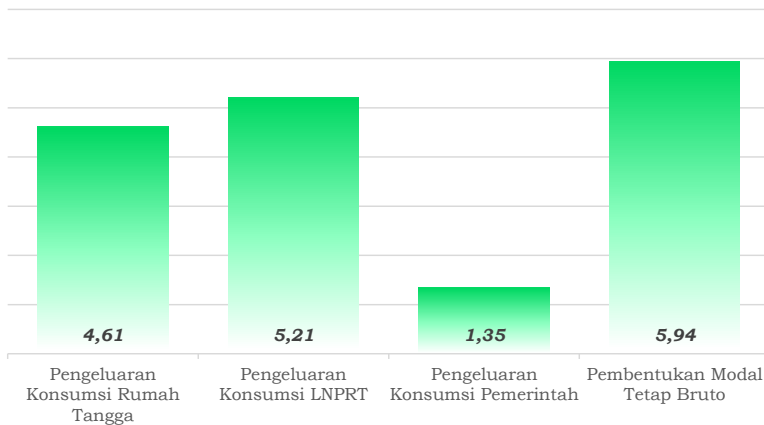
2.1.1.1.2 PDRB Menurut Pengeluaran

Tahun 2024 Kota Sukabumi tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen. Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencapai 5,94 persen, selanjutnya Konsumsi LNPR (Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga) sebesar 5,21

persen. Konsumsi rumah tangga 4,61 persen, dan terakhir adalah Konsumsi Pemerintah sebesar 1,35 persen.

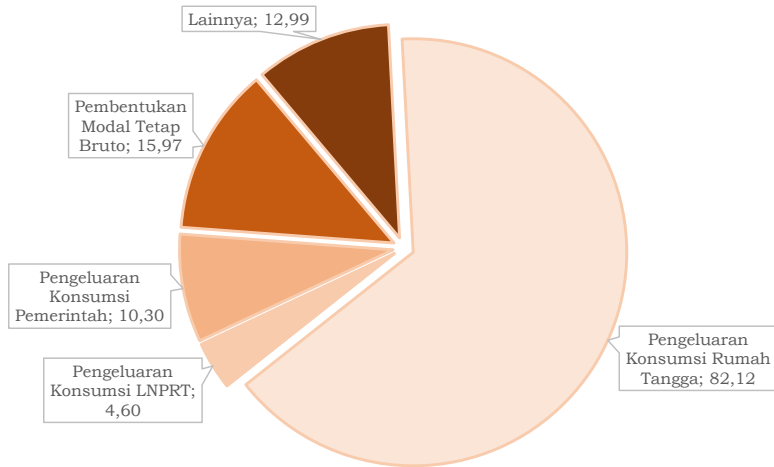
Struktur PDRB pengeluaran Kota Sukabumi tahun 2024 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga yang menyumbang 82,12 persen terhadap nilai total PDRB diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 15,97 persen. Konsumsi Pemerintah sebesar 10,30 persen dan konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga) sebesar 4,60 persen. Sementara itu komponen ekspor neto dan Perubahan inventory yang bernilai negatif, merupakan komponen pengurangan dalam PDRB, masing-masing memiliki kontribusi sebesar 12,87 persen dan 0,12 persen.

Gambar 2.1
Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Tahun 2024
(Persen)



Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2024 Berita Resmi Statistik, 2025

Gambar 2.2
Persentase Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Tahun 2024 (Persen)



Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2024 Berita Resmi Statistik, 2025.

Perekonomian bergerak dengan baik di tahun 2022 dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 persen dan diwarnai oleh peranan komponen LNPRT yang menonjol. Pada tahun 2023 komponen LNPRT masih mendominasi laju pertumbuhan dari sisi pengeluaran, walau kecepatan pertumbuhan PDRB mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Masa tahun politik di 2022-2023 ditandai dengan pertumbuhan di komponen LNPRT yang cukup tinggi. Tahun 2024 peran komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto mengambil peran yang signifikan dalam perekonomian Kota Sukabumi dengan menunjukkan laju pertumbuhan tertinggi.

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024
(miliar rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB ADHB			PDRB ADHK 2010		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	491,1 7	547,1 7	591,8 8	286,9 7	307,5 5	329,0 0
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	704,4 0	752,5 5	797,6 6	481,6 3	503,9 8	534,0 4
Pengadaan Listrik dan Gas	29,53	30,77	30,69	18,00	18,57	18,57
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,25	19,83	20,86	12,47	12,73	13,38
Konstruksi	943,8 4	1.041,6 2	1.112,2 1	600,6 0	641,7 6	680,2 1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.410,4 9	5.769,4 3	6.029,7 6	3.767,9 2	3.911,0 6	4.082,0 0
Transportasi dan Pergudangan	1.541,4 9	1.763,3 9	1.928,3 4	836,5 2	912,5 0	997,6 8
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	436,8 7	483,2 0	534,3 0	271,8 1	293,0 5	309,6 7

Lapangan Usaha	PDRB ADHB			PDRB ADHK 2010		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Informasi dan Komunikasi	588,9 1	625,5 6	653,8 1	571,9 7	607,2 6	635,3 8
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.624,9 8	1.720,8 0	1.910,7 8	958,6 7	990,6 2	1.020,2 6
Real Estat	169,0 7	180,1 1	192,5 5	123,8 6	130,7 2	136,2 2
Jasa Perusahaan	255,4 5	279,4 1	296,0 2	158,9 6	171,7 4	181,6 3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	580,2 4	600,1 5	608,5 0	328,2 0	334,9 9	335,0 5
Jasa Pendidikan	640,0 8	695,8 8	753,4 2	371,9 7	393,5 2	413,4 6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	283,8 3	308,4 4	326,0 2	199,4 3	210,8 4	221,9 5
Jasa lainnya	472,6 4	531,3 7	583,6 0	335,1 6	360,9 9	394,6 6
Produk Domestik Regional Bruto	14.192,25	15.349,71	16.370,38	9.324,16	9.801,88	10.303,16

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2024 Berita Resmi Statistik, 2025

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2022-2024 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan ADHK 2010			Distribusi PDRB ADHB		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,58	7,17	6,97	3,46	3,56	3,62
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	4,81	4,64	5,97	4,96	4,90	4,87
Pengadaan Listrik dan Gas	5,90	3,19	-0,02	0,21	0,20	0,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,32	2,09	5,10	0,14	0,13	0,13
Konstruksi	-0,15	6,85	5,99	6,65	6,79	6,79
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,47	3,80	4,37	38,12	37,59	36,83
Transportasi dan Pergudangan	7,59	9,08	9,33	10,86	11,49	11,78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,70	7,81	5,67	3,08	3,15	3,26

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan ADHK 2010			Distribusi PDRB ADHB		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Informasi dan Komunikasi	7,01	6,17	4,63	4,15	4,08	3,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.624,98	1.720,80	2,99	958,67	990,62	11,67
Real Estat	6,30	5,54	4,21	1,19	1,17	1,18
Jasa Perusahaan	9,73	8,04	5,76	1,80	1,82	1,81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,34	2,07	0,02	4,09	3,91	3,72
Jasa Pendidikan	8,09	5,79	5,07	4,51	4,53	4,60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,85	5,72	5,27	2,00	2,01	1,99
Jasa lainnya	11,67	7,71	9,33	3,33	3,46	3,56
Produk Domestik Regional Bruto	5,35	5,12	5,11	100,0	100,0	100,0

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2024 Berita Resmi Statistik, 2025

Tabel 2.3
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2024 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,97	0,22
Pertambangan dan Penggalian	-	-
Industri Pengolahan	5,97	0,31
Pengadaan Listrik dan Gas	-0,02	0,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,10	0,01
Konstruksi	5,99	0,39
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,37	1,74
Transportasi dan Pergudangan	9,33	0,87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,67	0,17
Informasi dan Komunikasi	4,63	0,29
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,99	0,30
Real Estat	4,21	0,06
Jasa Perusahaan	5,76	0,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,02	0,00
Jasa Pendidikan	5,07	0,20
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,27	0,11
Jasa lainnya	9,33	0,34
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5,11	5,11

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2024 Berita Resmi Statistik, 2025

Tabel 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2022-2024
(miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB			PDRB ADHK 2010		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Konsumsi	11.406,8	12.508,2	13.442,	7.022,5	7.393,9	7.734,9
Rumah Tangga	5	0	88	2	3	2
Konsumsi LNPRT	626,53	700,43	753,0	402,5	434,3	456,9
			7	0	0	0
Konsumsi Pemerintah	1.506,40	1.626,88	1.686,4	888,3	933,6	946,2
			9	0	3	2
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.218,41	2.459,36	2.614,2	1.396,1	1.493,8	1.582,5
			0	5	4	7
Perubahan Inventori	-6,37	-2,46	-19,50	-3,98	-1,49	-11,23
Ekspor Neto	-	-	-	-	-	-
	1.559,58	1.942,70	2.106,7	381.3	452.3	406,2
			6	3	2	2
Produk Domestik Regional Bruto	14.192,25	15.349,7	16.370,	9.324,1	9.801,8	10.303,
		1	38	6	8	16

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2024 Berita Resmi Statistik, 2025

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun
2022-2024 (persen)

Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan ADHK 2010			Distribusi PDRB ADHB		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Konsumsi Rumah Tangga	5,42	5,29	4,61	80,37	81,49	82,12
Konsumsi LNPRT	6,87	7,90	5,21	4,41	4,56	4,60
Konsumsi Pemerintah	-1,16	5,10	1,35	10,61	10,60	10,30
Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,36	7,00	5,94	15,63	16,62	15,97
Perubahan Inventori				-0,04	-0,02	-0,12
Ekspor Neto				-10,99	-12,66	-12,87
Produk Domestik Regional Bruto	5,35	5,12	5,11	100,00	100,00	100,00

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2024 Berita Resmi Statistik, 2025.

Tabel 2.6
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
Tahun 2024 (persen)

Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
Konsumsi Rumah Tangga	4,61	3,48
Konsumsi LNPRT	5,21	0,23
Konsumsi Pemerintah	1,35	0,13

Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,94	0,91
Perubahan Inventori		
Ekspor Neto		
Produk Domestik Regional Bruto	5,11	5,11

Sumber: *Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2024 Berita Resmi Statistik, 2025.*

Tabel 2.7
PDRB Per Kapita Kota Sukabumi Tahun 2022-2024

PDRB Per Kapita	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	39,93	42,56	44,76
Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	26,23	27,18	28,17
Persentase Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	3,79	3,60	3,65

Sumber: *Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2024 Berita Resmi Statistik, 2025.*

2.1.1.2 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

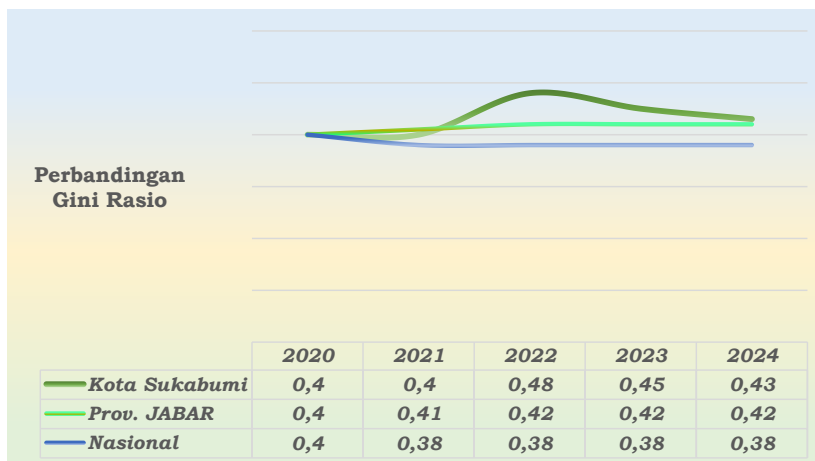
Ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) merupakan masalah perbedaan pendapatan antara golongan masyarakat atau daerah maju dengan daerah tertinggal. Semakin besar ketimpangan pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan yang menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Indikator gini ratio merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat.

Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan alam suatu populasi. Semakin tinggi indeks gini, semakin tinggi ketimpangan. Indeks gini berkisar antara 0 (sama sekali tidak ada ketimpangan) hingga 1 (ketimpangan maksimal).

Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Angka Indeks Gini selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi. Pada Tahun 2024 tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,43 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Berikut disajikan perbandingan indeks gini Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama periode 2019-2023:

Gambar 2.3
Realisasi Indeks Gini di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2024

Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Sukabumi yang diukur oleh Indeks Gini adalah sebesar 0,43. Angka ini menurun 0,02 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini pada tahun 2023. Tingkat ketimpangan di Kota Sukabumi dengan karakter perkotaan, memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian, dimana untuk wilayah perkotaan mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat heterogen yang pada umumnya penduduk perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian.

Berdasarkan klasifikasi atau kategori ketimpangan menurut Michael Tadaró, Kota Sukabumi termasuk wilayah dengan tingkat ketimpangan kategori sedang (angka gini ratio berkisar 0.36-0,49). Kota Sukabumi termasuk wilayah yang memiliki karakteristik perekonomian berbasis industri dan perdagangan. Hal ini menyebabkan level pendapatan yang berbeda yang diterima oleh penduduk yang bekerja di sektor industri dan perdagangan dengan penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sehingga yang menyebabkan ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan.

Tingginya ketimpangan pendapatan merupakan ancaman serius, tidak hanya berupa turunnya kesejahteraan sekelompok masyarakat, namun juga mendistorsi pertumbuhan ekonomi akibat hilangnya potensi pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia menyatakan 4 (empat) faktor penyebab utama ketimpangan pendapatan, yaitu (1) Ketimpangan peluang yang tercermin pada nasib anak-anak dari keluarga miskin, yang terpengaruh oleh tempat mereka dilahirkan atau pendidikan orang tua mereka; (2) Ketimpangan pasar tenaga kerja, dimana pekerja dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, sementara tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang

untuk mengembangkan keterampilan mereka. Hal ini menyebabkan mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang kecil; (3) Konsentrasi kekayaan, dimana kaum elit memiliki aset keuangan seperti properti dan saham; dan (4) Ketimpangan dalam menghadapi guncangan. Hal ini terlihat saat terjadi guncangan, dimana masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena dampak karena menurunnya kemampuan untuk memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan.

Gini ratio tertinggi Pada September 2024 adalah provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 0,43. Sementara itu, provinsi dengan *gini ratio* terendah tercatat di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,25. Jika dibandingkan dengan *gini ratio* nasional yang sebesar 0,38, terdapat tujuh provinsi dengan angka *gini ratio* yang lebih tinggi, yaitu: DKI Jakarta (0,43), DI Yogyakarta (0,42), Jawa Barat (0,42), Papua Selatan (0,42), Gorontalo (0,41), Papua (0,40), dan Papua Barat (0,38).

2.1.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tingkat kesejahteraan sosial dapat dilihat dari pembangunan manusia yang dilakukan. Keberhasilan pembangunan manusia terindikasikan oleh beberapa indikator kinerja, yang paling banyak dipakai adalah penggunaan indikator indeks pembangunan manusia atau IPM atau disebut juga *Human Development Index* atau *HDI* yang diperkenalkan oleh *United Nation Development Program (UNDP)* pada

tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Penyempurnaan metode penghitungan IPM oleh UNDP dilakukan secara berkala untuk memperoleh indikator yang lebih baik lagi dan relevan dalam mengukur pembangunan manusia. Perhitungan IPM ini mengacu kepada perhitungan BPS yang mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada Tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak Tahun 2010. Pada Tahun 2023 Hasil *Long Form SP2020* (SP2020-LF) digunakan sebagai dasar penghitungan Umur Harapan Hidup (UHH).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.

Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pertumbuhan nilai IPM antar waktu akan menunjukkan kecepatan pembangunan yang terjadi sebagai cerminan atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Sementara status pencapaian IPM merefleksikan tingkatan pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode.

Pembangunan manusia di Kota Sukabumi terus mengalami kemajuan. Sejak Tahun 2013, status Pembangunan manusia Kota Sukabumi meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2020-2024 IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,87 persen per tahun, dari 75,06 pada Tahun 2020 menjadi 77,69 pada Tahun 2024. IPM Kota Sukabumi berada di atas IPM Jawa Barat sepanjang periode Tahun 2020-2024. Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, baik dimensi umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan maupun standar hidup layak. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami akselerasi pertumbuhan di 2024 dibanding tahun sebelumnya, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 0,29 persen, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,10 persen, serta Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) sebesar 3,84 persen. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

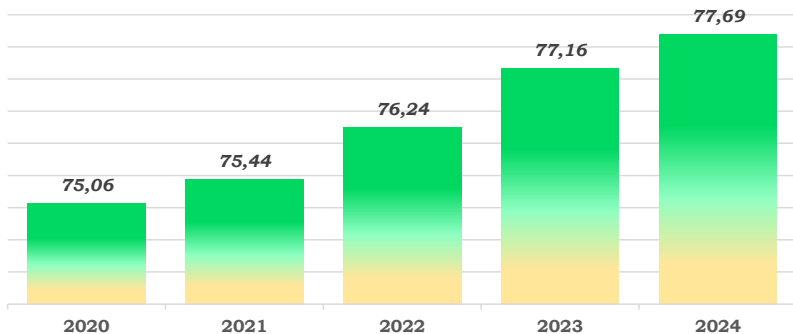
Tabel 2.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi
Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2020-2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat						

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	74,23	74,38	74,64	74,89	75,11
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,47	13,58	13,59	13,60	13,62
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,59	9,81	10,14	10,37	10,38
Sumber Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	10.999	10.942	11.229	11.799	12.252
Indeks Pembangunan Manusia		75,06	75,44	76,24	77,16	77,69

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi, BPS 2024

Gambar 2.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi
Tahun 2020-2024



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi, BPS 2024.

2.1.1.3.1 Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Kota Sukabumi Tahun 2020-2024

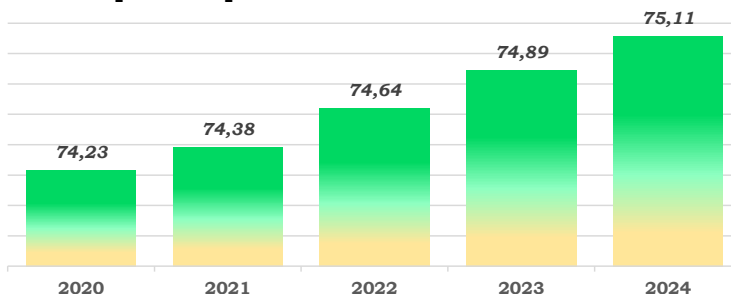
Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup

sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

2.1.1.3.1.2 Dimensi Usia Panjang dan Sehat

Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode Tahun 2020-2024, UHH Kota Sukabumi telah meningkat sebesar 0,88 persen per tahun. Selama periode tersebut, rata-rata UHH tumbuh sebesar 0,30 persen per tahun. Pada Tahun 2020, UHH Kota Sukabumi adalah 74,23 tahun, dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 75,11 tahun. UHH Tahun 2024 meningkat sebesar 0,22 persen per tahun (0,29 persen) jika dibandingkan Tahun 2023. Terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan di Tahun 2024 dibanding Tahun 2023 yang mencapai 0,33 persen. Penambahan umur harapan hidup dari bayi yang baru lahir merupakan dampak positif dari keberhasilan upaya dalam meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat, baik dari sisi prasarana, akses, hingga kualitas Kesehatan.

Gambar 2.5
Usia Harapan Hidup saat lahir Kota Sukabumi Tahun 2020-2024



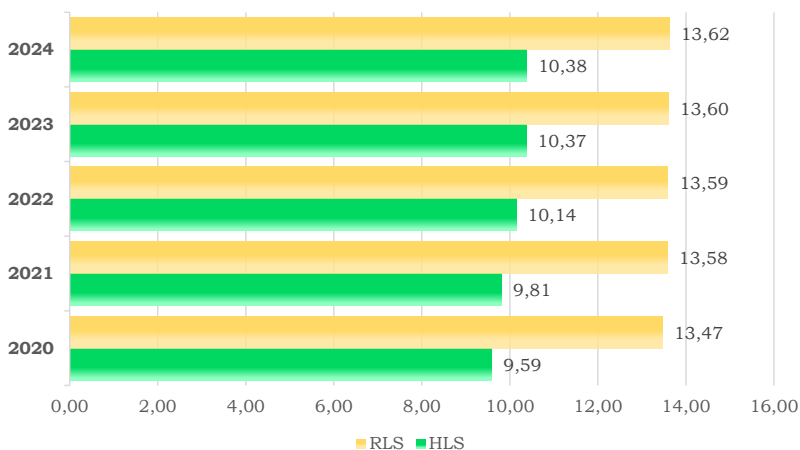
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi, BPS 2024.

2.1.1.3.1.2 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selama periode 2020 hingga 2024, rata-rata pertumbuhan HLS Kota Sukabumi sebesar 0,27 persen per tahun. Pada 2024, HLS Kota Sukabumi mencapai 13,62 tahun, yang berarti anak umur 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan setara jenjang Diploma I.

Gambar 2.6
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Kota Sukabumi Tahun 2020-2024



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi, BPS 2024.

Sementara itu pada periode yang sama, RLS Kota Sukabumi rata-rata tumbuh sebesar 2,01 persen per tahun. Pada 2024, RLS Kota Sukabumi mencapai 10,38 tahun atau setara dengan menyelesaikan masa pendidikan hingga menamatkan SMS kelas X.

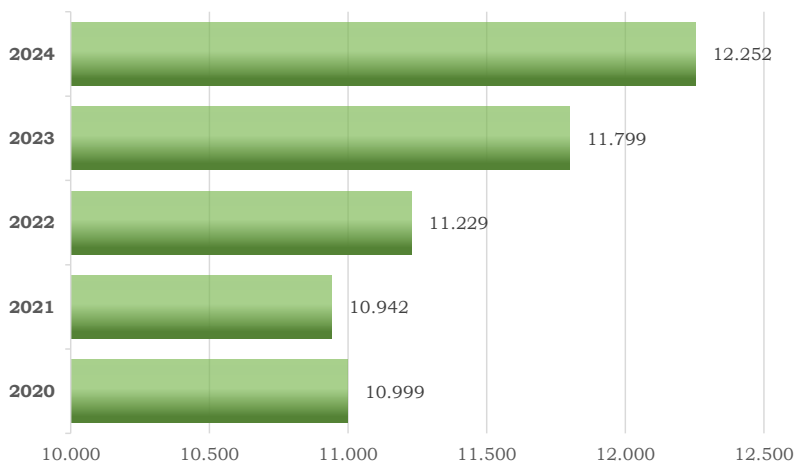
Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Sukabumi yang lebih baik. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator proses pembangunan dari program-program yang bersifat jangka pendek. Sementara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencerminkan hasil upaya pembangunan yang bersifat jangka panjang. Kedua indikator ini saling melengkapi dalam menggambarkan capaian dan penambahan sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

2.1.1.3.1.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita per tahun (harga konstan 2012). Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita penduduk Kota Sukabumi mencapai Rp 12,25 juta per tahun. Angka ini meningkat Rp 453 ribu (3,84 persen) dibandingkan tahun 2022. Dalam kurun waktu 2020-2024, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat rata-rata sebesar 2,76 persen per tahun.

Gambar 2.7

Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan), 2020-2024 (Rp000)



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi, BPS 2024

2.1.1.3.2 Perbandingan IPM Kota Sukabumi Terhadap Provinsi Jawa Barat

IPM Kota Sukabumi yang berada diatas IPM Provinsi Jawa Barat memiliki makna bahwa secara rata-rata kualitas pembangunan manusia di Kota Sukabumi melebihi rata-rata kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat.

Apabila sejak tahun 2013 status pembangunan manusia Kota Sukabumi telah tergolong berkategori “tinggi”, karena IPM nya telah berada di atas 70, maka status “tinggi” dalam pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat baru tercapai di tahun 2016. Kecepatan dalam melakukan pembangunan di setiap wilayah tidaklah merata. Upaya yang dikerahkan untuk mendorong kemajuan pembangunan manusia di bidang Kesehatan, pendidikan dan pendapatan mempengaruhi kecepatan yang terjadi.

IPM di Kota Sukabumi maupun di Provinsi Jawa Barat senantiasa menunjukkan tren peningkatan. Sepanjang kurun waktu 2020-2024, IPM Kota Sukabumi telah mengalami kenaikan sebanyak 2,63 poin dengan rata-rata kecepatan pertumbuhan per tahun sebesar 0,87 persen. Sementara Provinsi Jawa Barat mengalami rata-rata pertumbuhan 0,74 persen per tahun dengan kenaikan IPM 2,31 poin dalam periode yang sama. Kecepatan pertumbuhan IPM di Kota Sukabumi masih berada diatas rata-rata Jawa Barat.

Di wilayah Provinsi Jawa Barat terdapat empat kabupaten/kota yang memiliki capaian IPM di kategori “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$), serta dua puluh kabupaten/kota dengan capaian IPM berkategori “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) dan tiga kabupaten/kota dengan capaian IPM di kategori “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$). Sejak tahun 2012 Provinsi Jawa Barat tidak memiliki wilayah kabupaten/kota dengan capaian pembangunan manusia berkategori “rendah”.

Tabel 2.9
IPM Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

IPM	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Sukabumi	75,60	75,44	76,24	77,16	77,69
Provinsi Jawa Barat	71,61	72,96	73,63	74,24	74,92

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi, BPS 2024

2.1.1.4 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan sering sekali menjadi penghambat laju pembangunan manusia, misalnya penduduk miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga berpengaruh buruk bagi hidupnya. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan perlu aksi yang mencakup berbagai dimensi yang berkaitan.

Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibanding kondisi 2023 dari 7,50 persen menjadi 7,20 persen. Berikut tabel jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi tahun 2020-2024:

Tabel 2.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi
Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
2020	25,42	7,70
2021	27,19	8,25
2022	26,59	8,02
2023	24,96	7,50
2024	24,10	7,20

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025.

Untuk mengukur kemiskinan, konsep yang digunakan BPS yaitu dengan mengukur kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Berikut tabel dalam kurun waktu empat tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan tertinggi di Kota Sukabumi sebesar 1,39 persen pada tahun 2021, dan terendah sebesar 1,17 persen di tahun 2020, dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 1,39 persen. Penurunan angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Tabel 2.11
Indikator Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
(1)	(3)	(4)	(5)	(5)
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	27,19	26,59	24,96	24,10
Persentase Penduduk Miskin	8,25	8,02	7,50	7,20

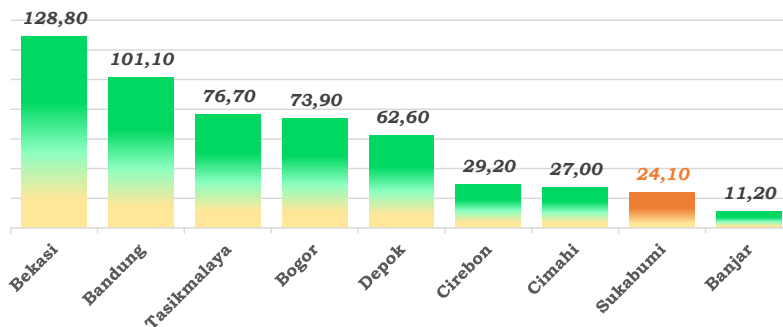
Indikator	2021	2022	2023	2024
(1)	(3)	(4)	(5)	(5)
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	567.734	594.118	644.276	678.258
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,39	1,27	1,21	0,88
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,36	0,38	0,31	0,18

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi sebesar 0,38 persen di tahun 2022. Kondisi keparahan kemiskinan di Kota Sukabumi sebesar 0,38 persen pada tahun 2022 yang berarti naik dari tahun sebelumnya, memiliki makna bahwa sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Sukabumi meningkat.

Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional, capaian persentase penduduk miskin Kota Sukabumi berada dibawahnya. Tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 2.8
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kota Sukabumi dengan Kota Lainnya di Jawa Barat Tahun 2025 (ribu orang)



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

2.1.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran. Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Sukabumi dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Nasional menandakan bahwa perbandingan antara laju pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja di Kota Sukabumi masih relatif besar, sehingga angkatan kerja yang tersedia yang tidak terserap pasar kerja lebih besar.

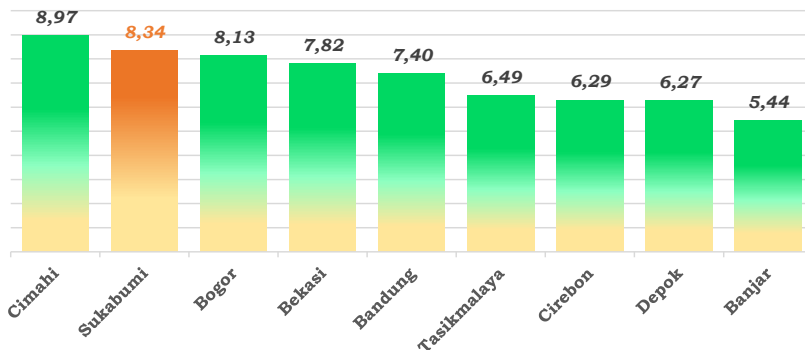
Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Permasalahan ketenagakerjaan dirasa sangat kompleks dengan kondisi Kota Sukabumi yang tidak memiliki sumber daya alam dan angkatan kerja semakin meningkat. Selama periode Tahun 2020-2023, kondisi TPT Kota Sukabumi turun sebesar 3,64%, sebagaimana tabel berikut:

Gambar 2.9
Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

Gambar 2.10
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota
Sukabumi dengan Kota Lain di Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2025

TPT Kota Sukabumi Tahun 2024 dibandingkan dengan Kota lain, berada pada urutan ke-2 (dua) tertinggi di Jawa Barat. Begitupun dibandingkan dengan Jawa Barat dan Nasional, TPT Kota Sukabumi lebih tinggi. Permasalahan terkait pengangguran dan dunia kerja ini diantaranya yaitu jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja dan juga belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja. Berikut tabel penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin:

Tabel 2.12
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama
Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis
Kelamin di Kota Sukabumi Tahun 2024

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	29.926	14.852	44.778

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	4.974	5.065	10.039
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	6.335	2.540	8.875
Buruh/Karyawan/Pegawai	47.976	27.310	75.286
Pekerja bebas	8.902	2.206	11.108
Pekerja keluarga/tak dibayar	2.476	7.266	9.742
Jumlah	100.589	59.239	159.828

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

2.1.1.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

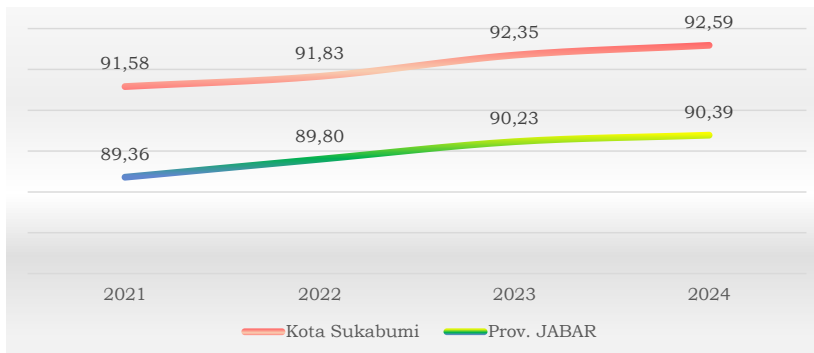
Gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Untuk mengetahui capaian pembangunan manusia secara gender digunakan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan membandingkan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki.

Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Capaian IPG Kota Sukabumi lebih tinggi dibandingkan dengan capaian IPG Provinsi Jawa Barat. Artinya pembangunan manusia secara gender di Kota Sukabumi lebih merata dibanding di tingkat Jawa Barat. Berikut grafik perbandingan capaian IPG Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat:

Gambar 2.11
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sukabumi
dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2025

2.1.2 Aspek Pelayanan Umum

Gambaran aspek pelayanan umum Kota Sukabumi menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Adapun indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kunci.

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020 dan 2021 yang dilaksanakan di Kota Sukabumi mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sementara untuk Tahun 2019 yang dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.1.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.2.1.1 Pendidikan

Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	70,17	80,9	81,21	82,59
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,3	99,76	98,87	98,04
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam	Persen	92,79	98,18	92,15	96,76

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pendidikan menengah pertama					
4	Tingkat partisipasiI warga negara usia -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	100	78,33

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Kinerja urusan pendidikan Kota Sukabumi yang menunjukkan peningkatan hanya pada indikator tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD. Hal ini mengindikasikan semakin membaiknya akses pendidikan PAUD dan meningkatnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Sementara pada indikator tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar serta tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama capaiannya menurun di tahun 2023.

Hal ini mengindikasikan perlunya memperluas akses pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama serta meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendidikan Dasar	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang terpenuhi)	100%	99,75
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terpenuhi	100%	99,65
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini yang terpenuhi	100%	74,04

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Tahun 2024.

Capaian SPM Pendidikan di Kota Sukabumi untuk jenis layanan dasar pada jenjang Pendidikan Dasar adalah 99,75%, jenjang kesetaraan capaiannya adalah 99,65% dan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini adalah 74,04%, untuk PAUD capaiannya belum optimal dikarenakan pada jenjang ini belum masuk dalam kategori Program Wajib Belajar, namun demikian capaiannya sudah dapat dikategorikan “Baik”.

2.1.2.1.2 Kesehatan

Tabel 2.15
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Angka	0,45	0,4	3,23	3,30
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	101,91	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	103,83	100	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	108,69	100	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	99,15	95,90	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan	Persen	100	80,73	95,79	96,97

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	elayanan kesehatan sesuai standar					
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	90,16	41,35	67,79	96,90
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	75	89,47	97,70	118,18
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	89,54	84,13	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	Persen	100	87,63	89,36	95,89

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	94,79	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Kinerja urusan kesehatan di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa 5 indikator capaiannya meningkat, dan 8 indikator capaiannya tetap 100 persen. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kegiatan pemeriksaan kesehatan masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya skrining kesehatan. Peningkatan kegiatan ini juga perlu dilakukan untuk anak pendidikan dasar, orang usia 15-59 tahun dan lansia karena capaian indikatornya belum mencapai 100 persen meskipun kinerja makin membaik

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 1. 225. Jumlah Penduduk di Kota Sukabumi = 370.096;

2. Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 6. Jumlah RS di Kota Sukabumi = 6;
3. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 5.785. Jumlah ibu hamil di Kota Sukabumi = 6.393;
4. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 6.346. Jumlah ibu bersalin di Kota Sukabumi = 6.346;
5. Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 5.994. Jumlah bayi baru lahir di Kota Sukabumi = 5.994;
6. Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 30.252. Jumlah balita di Kota Sukabumi = 30.252;
7. Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 56.303. Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota Sukabumi = 56.058;
8. Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 238.542. Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kota Sukabumi = 238.542;
9. Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 39.422. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kota Sukabumi = 39.422;
10. Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 37.136. Jumlah penderita hipertensi di Kota Sukabumi = 37.136;
11. Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 6.480. Jumlah penderita DM di Kota Sukabumi = 6.480;
12. Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 491. Jumlah penderita ODGJ di Kota Sukabumi = 512;

13. Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 10.680. Jumlah penderita TBC di Kota Sukabumi = 10.680;

14. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 13.404. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota Sukabumi = 13.404;

Capaian indikator kinerja di atas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	97,96 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes melitus</i>	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	96,72 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Tahun 2024.

Dari 12 indikator capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Sukabumi, 10 indikator sudah mencapai target 100 persen. Adapun indikator yang capaiannya belum mencapai 100 persen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif tidak mencapai target hanya sebesar 97,96% nilai pencapaian ini diperoleh dari persentase pencapaian penerima layanan dasar sebesar 97,96 % (231.167 sasaran dilayani dari target 235.988 penduduk usia produktif) serta pencapaian mutu minimal layanan dasar sebesar 97,96%;

- b. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat tidak mencapai target hanya sebesar 96,72% nilai pencapaian ini diperoleh dari persentase pencapaian penerima layanan dasar sebesar 95,90% (491 sasaran dilayani dari target 512 sasaran ODGJ) serta pencapaian mutu minimal layanan dasar sebesar 100%

2.1.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.17
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	-	57,32	18,45	-
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	57,57	55,41	64,15	64,97

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	100	94,39	100	100
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	91,2	91,51	71,64	75,72
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100	100	100	100
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	81,08	87,63	86,86	88,59
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100	100	28,07	80,71

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	-	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Sukabumi secara umum menunjukkan peningkatan di tahun 2023. Namun terdapat beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian agar capaiannya meningkat yaitu berkaitan dengan pengendali banjir, layanan pengolahan air limbah domestik, dan kemantapan jalan. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir perlu ditingkatkan karena Kota Sukabumi rawan akan bencana banjir. Layanan pengolahan air limbah domestik perlu ditingkatkan agar air limbah yang berasal dari aktivitas rumah tangga tidak mencemari lingkungan dan aman bagi kesehatan masyarakat. Sementara untuk tingkat kemantapan jalan masih perlu peningkatan agar memudahkan mobilitas orang dan kendaraan sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Sukabumi (ha) = 0 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kota Sukabumi (ha) = 1;

2. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Sukabumi (m) = 1. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota Sukabumi (m) = 0. Kota Sukabumi secara geografis tidak memiliki wilayah pantai, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peta RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042;
3. Luas irigasi kewenangan Kota Sukabumi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 852,15 Ha. luas daerah irigasi kewenangan Kota Sukabumi = 1.311,51 Ha;
4. Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kota Sukabumi = 120.427. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Sukabumi = 120.427;
5. Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 82.576. Jumlah rumah di Kota Sukabumi = 109.043;
6. Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya = 5.407. Jumlah IMB yang berlaku = 5.407;
7. Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 104.357 Jumlah total panjang jalan Kota Sukabumi = 117,796;
8. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota Sukabumi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 159. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota Sukabumi = 197.

Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 197. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 197.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-sehari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi, Tahun 2024.

- a. Air minum dan Sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu pemenuhan akan ketersediaan air baik secara kuantitas, kualitas maupun kontinuitas adalah hal mutlak. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah untuk mencapai 100% akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan
- b. Sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti untuk rumah tangga, industri, dan untuk kebutuhan lain berasal dari PDAM Bumi Wibawa, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air terlindung, dan penampungan air hujan. Kualitas air yang ada cukup baik untuk dikonsumsi kecuali di beberapa daerah tertentu airnya agak kecoklatan sehingga bila akan diminum perlu dilakukan penyaringan terlebih dahulu;
- c. Masyarakat Kota Sukabumi yang sudah memanfaatkan air bersih perpipaan PDAM Tirta Bumi Wibawa masih sangat minim yaitu 12,75 % dari total jumlah penduduk Kota, hal ini disebabkan minimnya sumber mata air juga akibat keterbatasan biaya. Air minum perkotaan non PDAM adalah target utama dari prasarana penyediaan air minum berbasis masyarakat di Kota Sukabumi yang dilaksanakan melalui program DAK, PAMSIMAS maupun swadaya masyarakat.
- d. Pemerintah menetapkan target terhadap indikator outcome 2020-2026 antara lain 100% capaian pelayanan akses air minum dan 100% capaian pelayanan akses sanitasi setiap tahunnya.
- e. Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak di kota sukabumi pada tahun 2024 telah mencapai 100%, sebanyak 559 SR untuk air minum serta untuk sanitasi sebanyak 267 RT yang sudah terlayani, yang kesemuanya tersebar di wilayah Kota Sukabumi.

Tabel 2.19 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	89,3	0,15	25,25	55,171
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	1,87	1,41	1,39	3.40
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persen	100	0	35,01	31,51

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Sukabumi yang masih perlu peningkatan terutama berkaitan dengan permukiman kumuh, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), dan PSU. Hal ini didasarkan pada realisasi capaian untuk masing-masing indikator yang belum sepenuhnya mencapai 100 persen.

Hal ini penting agar produktivitas masyarakat makin meningkat karena lingkungan tempat tinggalnya bersih dan sehat.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun $n = 74$ Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun $n = 74$;
2. Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0.

Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 1;

3. Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 54.41. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 55,171;
4. Jumlah unit rumah tidak layak huni = 3.717. Jumlah total unit rumah Kota Sukabumi = 109.043;
5. Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 4.911. Jumlah unit rumah Kota Sukabumi = 15.584.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat di Kota Sukabumi sebagai berikut:

Tabel 2.20
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi, Tahun 2024.

Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni di Kota Sukabumi pada tahun 2024 telah dilakukan dengan capaian 100%, Terdapat 74 unit rumah yang dilakukan rehabilitasi dan pembangunan baru yang tersebar di 7 Kecamatan di Kota Sukabumi. Pelaksanaan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni ini berdasarkan laporan dari Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan melalui anggaran APBD Kota sebanyak 74 unit, di tahun 2024 tidak ada pelayanan terkait fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi

masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga tidak ada target dan capaian untuk pelayanan tersebut.

2.1.2.1.4 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.21
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100
3	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	31,18
4	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	2,92	1,52
5	Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	Persen	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	evakuasi korban bencana					
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	8,5	8,9	10,34	10,21

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Capaian kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Sukabumi rata-rata sudah berada pada kategori sangat tinggi (91-100). Namun indikator layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang realisasinya mengalami penurunan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat Kota Sukabumi masih rawan terhadap ancaman bencana seperti banjir, longsor, dan gempa bumi.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pengaduan yang ditangani = 38. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 38;
2. Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 10 Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 10;
3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 10.963;

4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana: 77;
5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 11 Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan = 11;
6. Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Sukabumi dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kota Sukabumi = 56. Jumlah kejadian kebakaran di Kota Sukabumi = 56;
7. Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran 10,21 menit.

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Ketenteraman	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan Ketertiban Umum	dari penegakan hukum Perda dan Perkada		
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi, Tahun 2024.

2.1.2.1.5 Sosial

Tabel 2.23
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Capaian Indikator Urusan Sosial di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, Meningkatkan pelayanan dasar dan penghidupan penduduk miskin dan rentan miskin.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 564. Populasi korban bencana alam dan sosial di Kota Sukabumi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kota Sukabumi = 564;
2. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 7. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Sukabumi = 7.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Sukabumi, Tahun 2024

2.1.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan

2.1.2.2.1 Tenaga Kerja

Tabel 2.25
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	Persen	1,91	27,88	8,85	9,08

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	100	100	91.711.23	156,96 4,655,6 9775
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	29,33	25,61	47,24	50
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	41,1	48,54	59,32	48,51

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Capaian Indikator urusan Urusan tenaga kerja di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi menyusun kebijakan terkait tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja, meningkatkan optimalisasi program peningkatan kesempatan kerja.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 7. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Sukabumi = 7;
2. Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 1.542. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 16.977;
3. PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 10.303
Jumlah tenaga kerja = 6.564;
4. Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 29. Jumlah Perusahaan = 58;
5. Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan = 1.587.
Jumlah pencari kerja yang terdaftar = 3.271.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.26
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	77,369	77,56	58,55	41,75

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,036	0,32	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	11,464	0,011	25,69	41,91

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Capaian Indikator urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, dan anak. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan Meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah ARG pada belanja langsung APBD = 583.887,449,504.
Jumlah seluruh belanja langsung APBD = 1,398,304,671,680;

2. Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kota Sukabumi yang didampingi = 83. Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 83;
3. Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 55. Jumlah penduduk perempuan = 131.206;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.3 Pangan

Tabel 2.27
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2022	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	133,08 1	138	116,9	106,80

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Capaian Indikator Urusan Pangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan pangan. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA), dan Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi memiliki cadangan pangan yang cukup yaitu sebanyak = 56,762 dari jumlah kebutuhan pangan = 53,144

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.4 Pertanian

Tabel 2.28
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Perse n	N/A	100	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Perse n	N/A	N/A	0	0
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Perse n	N/A	100	100	65,80

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Capaian Indikator urusan Urusan Pertanahan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 belum terealisasi dengan baik, dan belum mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD. Hal ini disebabkan belum adanya perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menerbitkan ijin lokasi pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya.

2.1.2.2.5 Lingkungan Hidup

Tabel 2.29
Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	60,3	59,71	60,0	62,53
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	85,94	73,76	73,21	99,19
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	0	0,03	0	0

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya

pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pengendalian pencemaran tanah, air, dan udara, Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan, Meningkatkan pengendalian kerusakan lingkungan, Meningkatkan kerjasama pengelolaan persampahan, Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan, dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Sukabumi 62,53;
2. Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 67.348,53. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan Kota Sukabumi = 67.895,42;
3. Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota Sukabumi = 0. Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 38.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.30
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	99,45	99,11	99,32	99,58

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	49,75	45,09	61,25	72,53
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	98,02	98,83	99,43	99,95
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100	100	41,93	62,5

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada standar pelayanan serta standar operasional prosedur (SOP), dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman = 264,288. Jumlah penduduk wajib KTP-el = 265,394;

2. Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 74,218. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 102,325;
3. Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 108.774. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 108.825;
4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 10. Jumlah OPD = 16.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.31
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	0	2,03	2,12	2
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	75,52	74,64	69,99	72,23
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	8,11	9,33	51,02	7,54

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga.

Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyusun kebijakan terkait pengendalian pertumbuhan penduduk, Optimalisasi program keluarga berencana, reproduksi remaja, dan pelayanan kontrasepsi, dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. TFR (Angka Kelahiran Total) 2;
2. Jumlah peserta KB Aktif Modern = 34,601. Jumlas Pasangan Usia Subur = 47,900;
3. Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 3,614. Jumlah Pasangan Usia Subur = 47.900.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.8 Perhubungan

Tabel 2.32
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Angka	100	1	1	0,9
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Angka	0,38	0,37	0,33	0,32

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Perhubungan di Kota Sukabumi Tahun 2023 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan sarana dan prasarana jalan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Rasio konektivitas Kota Sukabumi 0,9 ;
2. Kinerja lalu lintas Kota Sukabumi 0,32.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.9 Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.33
Capaian Indikator Kinerja Urusan
Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase	100	100	100	9,677
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	75,76	75,76	100	21,42

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	76,93	76,93	68,26	11,88

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan smart city. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Meningkatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Persentase jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 9,677%;
2. Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 12. Jumlah Layanan Publik = 56;

3. Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kota Sukabumi = 30,088. Jumlah penduduk = 253,224;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	14,83	18,98	21,7	27,04
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 66. Jumlah seluruh koperasi = 244;
2. Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 31.926. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 31.926;
3. (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di Kota Sukabumi = 3.322.374.968.365. Jumlah investasi tahun n-1 di Kota Sukabumi = 3.411.037.717.214.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.11 Penanaman Modal

Tabel 2.35
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	451,16	-2,60	-54,51	-0,34

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2023, diolah

Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi kurang baik dan tidak mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Menurunnya kualitas iklim usaha dan investasi.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa investasi di Kota Sukabumi mengalami penurunan dengan jumlah investasi tahun 2024 sebesar 1,623.129,420,209.

Capaian indikator kinerja diatas tidak selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.12Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.36
Capaian Indikator Kinerja Urusan
Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	25,59	24,41	25,4	27,39
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	23,87	22,78	23,17	24,66
3	Peningkatan prestasi olahraga	Jenis	15	17	36	43

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi cukup baik , namun tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga, dan prestasi olah raga Daerah, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kota Sukabumi = 23,930. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Sukabumi = 87.352;
2. Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kota Sukabumi = 21,548 jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Sukabumi = 87.352;
3. Peningkatan prestasi olahraga dengan perolehan 43 medali.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.13Kebudayaan

Tabel 2.37
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	73,33	73,3	83,56	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Kebudayaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa kinerja Kota Sukabumi mampu melestarikan cagar budaya sejumlah = 3, dari jumlah cagar budaya yang terdata = 3.

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.14 Statistik

Tabel 2.38
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Statistik di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan smart city, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 31. jumlah OPD = 31;
2. Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 31. jumlah OPD = 31;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.15Persandian

Tabel 2.39
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	62,95	63,41	70,69	61,24

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Persandian di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 belum terealisasi dengan baik, namun tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan smart city, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, mengelola 25 sistem elektronik yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik, dan mengamankan 25 titik system komunikasi. Adapun jumlah nilai per area keamanan informasi = 395 dengan jumlah area penilaian = 645.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.16 Perpustakaan

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	65,34	70,10	70,42	69,27
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	39,68	96,85	82,15	87,81

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Perpustakaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, dan Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, memiliki 90.605 koleksi buku yang tersebar di berbagai perpustakaan, dikunjungi oleh 361.581 orang baik secara online maupun onsite, memiliki 280 tenaga perpustakaan, mengelola 43 perpustakaan berstandar nasional, melaksanakan 6 kegiatan sosialisasi gemar membaca.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.2.17 Kearsipan

Tabel 2.41
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	56,03	63,1 2	64,61	64,79
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	51,67	66,6 7	71,67	72,5

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Kearsipan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi cukup baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada standar pelayanan serta standar operasional prosedur (SOP), dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, memiliki 99.200 arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, 112.000 arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip, 2.500 arsip statis, dan 2.500 arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.3 Layanan Urusan Pilihan

2.1.2.3.1 Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.42
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah (Ton)	1.388,70	1.401,11	102,89	100,20

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan pangan, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA).

2.1.2.3.2 Pariwisata

Tabel 2.43
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	1,99	2,24	7,78	8,12
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	21,74	21,97	23,01	19,45
3	Tingkat hunian akomodasi	Hari	36.000	887	102,06	102,42
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga	%	2,95	2,95	3,17	3,26

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	berlaku					
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp	46.86 1.100 .000	22.448 .213.6 98	24.61 0.383 .299	5,71

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Pariwisata di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi cukup baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan ekonomi kreatif, Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Mengembangkan disain Daerah sebagai objek wisata *heritage*.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah membina pengelolaan 5 destinasi wisata, melengkapi infrastruktur dasar untuk 7 destinasi wisata, dan mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2024 = 315.
Jumlah Wisatawan Tahun 2023 = 3.879;
2. Jumlah wisatawan nusantara tahun 2024 = 105.574.
Jumlah wisatawan tahun n-1 = 542.663;
3. Jumlah kamar yang terjual = 411,599. Jumlah kamar yang tersedia = 401.865;

4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD adalah 3,26 %.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.3.3 Pertanian

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	(Ton)	6,64	6,90	6,68	666,44
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0	0	-100	0

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian indikator Urusan Pertanian di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi cukup baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan pangan, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA), dan Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 21.296,3. Luas panen = 3.195,5;

2. Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun 2024 – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2023 = 0.
Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2024 = 0.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.3.4 Perdagangan

Tabel 2.45
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	100	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	53,78	45,15	67,0	59,58
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	89,33	208,75	80,89	72,95

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Perdagangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian. Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 78. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kota Sukabumi = 78;
2. Realisasi = 1.225,44 Alokasi = 2,056,661;
3. Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 766. Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kota Sukabumi = 1,050 UTTP.

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.3.5Perindustrian

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	0,42	3,19	2,21	2,66

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	0	10	95	0
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	100	0	0
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	100	0	0
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	85	85	95	55

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Perindustrian di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2024 : 74.
Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023 = 2780;
2. Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.2.4.1 Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan dan Keuangan
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	N/A	...	28,16	21,22
2	Rasio PAD	Persen	2,78	...	35,95	32,82

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	3	3	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	82,4	86,1 8	85,71	87,70
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian IKK urusan Urusan Perencanaan dan Keuangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah PAD = 437,033,662,447;

2. Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 87,70% Jumlah belanja APBD = 1.330,938,750,204.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.4.2 Pengadaan

Tabel 2.48
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengadaan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	6,55	3,3	43,38	73,82

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	96,51	62,74	52,25	13,00

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Pengadaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Meningkatkan pengordinasian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2024 = 0. Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2023 = 0;
2. Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 1,213. Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif = 1.643;
3. 3. Jumlah nilai belanja langsung (Belanja Operasional) yang melalui pengadaan = 664.121.761.649. Total belanja langsung (Belanja Operasional) = 1.270.863.895.847.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.4.3 Kepegawaian

Tabel 2.49
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	283,76	76,06	75,75	79,74
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	9,86	7,8	15,77	15,82
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	84,75	37,6	50,81	56,03

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Kepegawaian di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel. Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan manajemen pegawai ASN dan meningkatkan pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, serta meningkatkan evaluasi dan pembinaan kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1.169.
Jumlah Pegawai dengan Pendidikan SMA ke bawah = 1.466;
2. Jumlah Pegawai PNS Fungsional (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) = 232. Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) = 1.466;
3. Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Kompetensi = 130. Seluruh Jumlah Pegawai Non Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) = 232.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.4.4 Manajemen Keuangan

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Urusan Manajemen Keuangan
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	2,8	3,87	10,38	4,56
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	14,71	0,31	16,66	4,83

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Manajemen Aset	Persen	2	2	4	4
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	10,02	10,79	4,11	4,32

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Manajemen Keuangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi = 1,330,938,750,204. Total belanja APBD dikurangi satu = 1.272,828,818,997;
2. Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi = 437.033.662.447. Dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu = 416.860.686.061;
3. Nilai realisasi SILPA = 50.052.498.010. Total belanja anggaran tahun sebelumnya = 1.156.864.434.915.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.2.4.5 Transparansi dan Partisipasi Publik

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	0	0	96,30	98,01
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	41,67	41,67	83,33	66,66

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah

Capaian Indikator Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda. Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda;
2. Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 8. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Ekonomi

2.1.3.1.1 Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke-n1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke-n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto atas balas jasa faktor produksi yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah (region) yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

Nilai PDRB mencerminkan kemampuan potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di suatu daerah. Nilai PDRB Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 15.349,71 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.157,46 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 14.192,25 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha dan adanya inflasi.

PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dengan tujuan untuk melihat struktur (distribusi) perekonomian. Berdasarkan penghitungan PDRB dengan tahun dasar 2010, PDRB Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku tahun 2023 sebesar Rp 15,35 triliun, sementara di tahun 2024 nilai tersebut meningkat menjadi Rp 16,37 triliun. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi tahun 2024 mencapai 5,11 persen, melambat dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,12 persen.

Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 27 kabupaten/kota, dengan 18 wilayah merupakan kabupaten dan 9 wilayah merupakan kota. Perbedaan karakteristik antar wilayah mempengaruhi perbedaan nilai indikator sosial ekonomi. Dari segi jumlah penduduk, wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan cenderung memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak.

2.1.3.2 Daya Saing SDM

2.1.3.2.1 Pendidikan

Indeks Pendidikan Merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Dimensi pengetahuan sebagai cerminan hasil pembangunan dibidang pendidikan yang mempunyai peran yang sangat penting untuk melihat seberapa baik kualitas sumber daya manusia, yang selanjutnya akan berdampak kepada tingkat produktivitas manusia itu sendiri. Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Pada

Tahun 2024 Indeks Pendidikan Kota Sukabumi capaiannya melampaui target yang telah ditentukan yaitu 72,40 atau mencapai 101 % dari target di tahun 2024 sebesar 71,58.

Indeks pendidikan terdiri dari dua indikator perhitungan yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Selama kurun waktu 2020 sampai 2024, indeks pendidikan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Angka Rata-rata lama sekolah dan peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah. Adalah rata-rata lamanya waktu yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan di suatu wilayah. indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah diselesaikan atau ditamatkan. Sedangkan Harapan Lama Sekolah adalah perkiraan lamanya sekolah (dalam tahun) yang akan dijalani oleh anak yang berumur 7 tahun. HLS dihitung berdasarkan penduduk usia 7 tahun ke atas agar konsisten dengan referensi umur pada program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah.

Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sukabumi tahun 2024 adalah 10,38 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun keatas jika di rata-ratakan sudah sampai bangku kelas 1 SMA (sudah melebihi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun).

Harapan Lama Sekolah Kota Sukabumi tahun 2024 adalah 13,62. Angka ini menunjukkan bahwa lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun keatas dimasa mendatang adalah selama 13.62 tahun atau setara Diploma I.

2.1.3.2.2 Literasi

Literasi/numerasi adalah komponen Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid sehingga mampu mengembangkan

kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Literasi merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, merefleksikan dan berinteraksi dengan teks tulis agar seseorang mampu meraih tujuan pribadi, mengembangkan pengetahuan dan potensinya sehingga mampu beradaptasi sebagai masyarakat.

Rata-rata kemampuan literasi siswa Kota Sukabumi berdasarkan hasil asesmen nasional menunjukkan peningkatan dan termasuk dalam kategori BAIK. Artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

Numerasi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Rapor Pendidikan Kota Sukabumi, rata-rata kemampuan numerasi siswa-siswi Kota Sukabumi berdasarkan hasil asesmen nasional menunjukkan tren meningkat dan masuk dalam kategori BAIK dan didapatkan data bahwa 40-70 persen peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi.

Seiring dengan meningkatnya literasi/numerasi peserta didik, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Sukabumi juga menunjukkan hasil yang semakin membaik. Berdasarkan penilaian IKK atau Indikator Kinerja Kunci yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, Kota Sukabumi merupakan terbaik ketiga tingkat nasional. Sementara untuk kinerja bidang kearsipan, merupakan terbaik keempat di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Namun demikian permasalahan pembangunan literasi masyarakat di Kota Sukabumi masih perlu menjadi perhatian terutama terkait dengan peningkatan budaya literasi masyarakat ditengah gempuran media sosial, sarana perpustakaan yang belum semuanya ideal, serta terbatasnya pustakawan.

2.1.3.3 Daya Saing Infrastruktur

2.1.3.3.1 Kualitas Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain untuk mengukur kepuasan masyarakat, IKLI dapat digunakan untuk mengakomodir keinginan dan harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.

IKLI Kota Sukabumi termasuk ke dalam kategori B atau memiliki mutu pelayanan baik. Namun demikian, layanan infrastruktur tetap harus ditingkatkan. Jika dicermati lebih dalam, layanan infrastruktur yang sudah termasuk baik adalah infrastruktur listrik, jalur pedestrian, taman kota dan jaringan telekomunikasi. Sedangkan infrastruktur yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya adalah layanan transportasi seperti terminal dan jaringan jalan skala desa, jaringan air bersih, dan jaringan air limbah.

2.1.3.3.2 Kemantapan Jalan

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar lalu lintas barang dan jasa, sehingga keadaan jalan dan jaringan-jaringan jalan dapat dijadikan acuan tentang tingginya kebudayaan dan kemajuan ekonomi suatu daerah.

Tingkat kemajuan jalan milik Kota Sukabumi saat ini tergolong cukup baik, dengan persentase mencapai sekitar 81 persen. Sekitar 154 ruas jalan Kota Sukabumi kondisinya tergolong cukup baik, sedangkan sisanya saat ini masih terus dalam perbaikan. Kondisi sarana jalan banyak dipengaruhi oleh faktor alam maupun faktor manusia, dalam hal ini kendaraan. Saat ini, upaya pemeliharaan dan perbaikan terhadap jalan rusak terus dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

2.1.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Sepanjang tahun 2024, Kota Sukabumi mencatat kemajuan signifikan dalam penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), pertumbuhan nilai investasi, serta penyerapan tenaga kerja yang meningkat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi berhasil menerbitkan 14.572 NIB sepanjang 2024, mencapai 162% dari target Provinsi Jawa Barat yang sebesar 8.974 NIB. Keberhasilan ini didukung oleh program inovatif seperti Si Jimat Boss (Siap Jemput Perizinan Masyarakat Bersama OSS) dan sistem informasi Caang Muka Usahaku (Cambuk) yang mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM

Berkat upaya pengawasan dan pendampingan yang intensif, Kota Sukabumi berhasil meningkatkan peringkatnya dalam realisasi investasi di tingkat Provinsi Jawa Barat, naik dari peringkat ke-27 menjadi peringkat ke-10, terdapat tiga kecamatan di Kota Sukabumi yaitu Baros, Cibeureum, dan Lembursitu dikenal sebagai kawasan prospektif untuk investasi. Ketiga wilayah ini masih memiliki lahan yang cukup luas untuk pengembangan usaha baru, menjadikannya target utama bagi investor. Dengan pencapaian ini, Kota Sukabumi menunjukkan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama atau IKU Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci atau IKK pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcomes atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran. Selain itu, ditetapkan juga target pencapaiannya sebagai patokan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan pemerintahan berdasarkan tujuan, dan sasaran serta penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Dalam Perda tersebut ditetapkan jumlah indikator sasaran atau indikator kinerja utama sebanyak 12 (dua belas), indikator kinerja tersebut terdiri dari 4 (empat) indikator tujuan, 8 (delapan) indikator sasaran.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis RPJMD dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk mempermudah interpretasi atas penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, digunakan interpretasi pencapaian IKU sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.52 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ SASARAN)	SATUAN	BASELINE 2023	TAHUN 2024		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		2	3	4	5	6	7
I	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,12	5,37	5,11	95,16
a	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	4,40	4	N/A	
b	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Kota Kreatif	Poin	89	30,93	96	100
II	Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Indeks pembangunan Manusia	Poin	77,16	75,55	77,69	100

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ SASARAN)	SATUAN	BASELINE 2023	TAHUN 2024		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	72,34	71,58	72,4	100
b	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Poin	0,34	0,33	0,35	100
c	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Pekerja	38	34,001	N/A	
III	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni/Indeks Kenyamanan	Poin	23,82	65,00	65,74	100
a	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Persen	87,36	86	80,23	100
b	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman	Poin	76,33	75,4	75,4	100

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ SASARAN)	SATUAN	BASELINE 2023	TAHUN 2024		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
IV	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	74,78	73	87,43	100
a	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, 2024

Berdasarkan dokumen Rancangan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh Indikator kinerja Utama (IKU), 12 indikator memiliki tingkat capaian kinerja $\geq 91\%$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh satu persen) sehingga diinterpretasikan ke dalam kategori kinerja SANGAT TINGGI.

Pencapaian IKU pada seluruh misi yang ada dalam RPJMD Tahun 2024, ditembak oleh 64 Program, 106 Kegiatan dan 276 Sub Kegiatan, didukung sumber daya anggaran total alokasi anggaran sebesar 295,755 Milyar dengan efisiensi anggaran sebesar 26,45 Milyar dari APBD Kota Sukabumi Tahun 2024.

Persentase capaian IKU Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024 yang dipilah berdasarkan masing-masing Misi RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Persentase Kategori Capaian IKU Kota Sukabumi Tahun 2024
Berdasarkan Misi RPJMD

No	Kategori Capaian IKU	Nilai	Jumlah IKU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan I (Jumlah IKU = 3 Indikator)				
1	Sangat Tinggi	$\geq 91\%$	6	100,00
2	Tinggi	76% - 90%	0	0
3	Sedang	66% - 75%	0	0
4	Rendah	51% - 65%	0	0
5	Sangat Rendah	$\leq 50\%$	0	0
	<i>Jumlah IKU</i>		6	100,00
Tujuan II (Jumlah IKU = 4 Indikator)				

No	Kategori Capaian IKU	Nilai	Jumlah IKU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sangat Tinggi	≥ 91%	4	100,00
2	Tinggi	76% - 90%	0	0
3	Sedang	66% - 75%	0	0
4	Rendah	51% - 65%	0	0
5	Sangat Rendah	≤ 50%	0	0
	<i>Jumlah IKU</i>		4	100,00
Tujuan III (Jumlah IKU = 3 Indikator)				
1	Sangat Tinggi	≥ 91%	4	100,00
2	Tinggi	76% - 90%	0	0
3	Sedang	66% - 75%	0	0
4	Rendah	51% - 65%	0	0
5	Sangat Rendah	≤ 50%	0	0
	<i>Jumlah IKU</i>		4	100,00
Tujuan IV (Jumlah IKU = 2 Indikator)				
1	Sangat Tinggi	≥ 91%	4	100,00
2	Tinggi	76% - 90%	0	0
3	Sedang	66% - 75%	0	0
4	Rendah	51% - 65%	0	0
5	Sangat Rendah	≤ 50%	0	0
	<i>Jumlah IKU</i>		4	100,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, 2024

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2024

Pendekatan *Gap Analysis* (analisis kesenjangan) dan Analisis Deskriptif dapat digunakan sebagai metode evaluasi RKPD. *Gap Analysis* dipergunakan untuk membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Sementara Analisis Deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Dalam Analisis Deskriptif, data-data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain-lain untuk mempermudah memahami data dan penyampaian informasi sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Kedua metode diatas dipergunakan untuk menilai capaian anggaran dan kinerja perangkat daerah dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan yang akan datang. Adapun hasil evaluasi capaian anggaran dan kinerja perangkat daerah tahun 2024 ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.54
Capaian Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	876.196.581.489	849.913.746.988	91,63	92,35	91,28	98,63
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	251.741.771.729	247.559.644.192	98,34	76,25	71,81	94,18
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	251.741.771.729	247.559.644.192	98,34	76,25	71,81	94,18
PROGRAM PENUNJANG	171.416.931.179	167.969.358.637	97,99	100,00	97,99	97,99

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	80.238.550.750	79.504.035.755	99,08	100,00	99,10	99,10
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	59.889.800	59.889.800	60,01	15,00	15,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	26.400.000	26.360.000	99,85	90,00	90,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	497.451.676.739	476.830.750.414	95,85	100,00	98,57	98,57
Dinas Kesehatan	497.451.676.739	476.830.750.414	95,85	100,00	98,57	98,57
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	412.460.863.013	401.350.957.375	97,31	100,00	95,83	95,83
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	78.859.053.295	69.532.416.123	88,17	100,00	97,00	97,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.217.581.856	2.069.579.456	93,33	100,00	100,00	100,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	370.356.000	367.962.560	99,35	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.543.822.575	3.509.834.900	99,04	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	102.177.748.665	101.460.424.829	98,41	69,96	68,02	97,84
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.759.097.195	13.536.674.504	98,38	90,00	70,59	78,43
PROGRAM PENGELOLAAN	5.676.876.004	5.806.911.126	98,81	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
SUMBER DAYA AIR (SDA)						
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.136.249.800	2.100.847.150	98,34	99,50	99,50	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.620.278.900	6.572.979.005	99,29	54,00	54,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	7.437.390.150	7.279.844.046	97,88	47,00	47,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.663.206.500	4.591.054.013	98,45	20,00	20,00	100,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.404.772.000	3.381.031.050	99,30	86,22	86,22	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	58.132.387.100	57.861.123.915	99,53	82,85	82,85	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	50.000.000	50.000.000	100	40,00	40,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	297.491.016	279.960.020	94,11	80,00	80,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	1.179.346.570	1.171.875.310	99,39	99,12	99,12	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	140.285.970	140.225.400	99,95	98,90	98,90	100,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	405.225.000	398.478.500	98,34	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	545.035.600	545.015.600	100,00	98,90	98,90	100,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	88.800.000	88.155.810	99,27	98,90	98,90	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	12.007.840.038	11.516.923.465	91,61	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.297.783.088	10.188.789.465	98,94	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.599.407.500	1.217.773.000	76,14	100,00	100,00	100,00
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	110.649.450	110.361.000	99,74	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.584.587.590	3.569.431.271	99,23	100,00	99,96	99,96
PROGRAM PENUNJANG	3.214.785.040	3.204.066.071	99,67	100,00	99,92	99,92

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	369.802.550	365.365.200	98,80	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
Dinas Sosial	8.053.610.158	7.804.697.507	94,84	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	4.572.572.448	4.489.351.930	98,18	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.283.577.200	2.238.227.200	98,01	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.500.000	1.500.000	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	802.756.550	715.936.617	89,18	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM						
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	284.743.900	264.871.700	93,02	100,00	100,00	100,00
PROGRAM						
PENANGANAN BENCANA	93.845.060	80.195.060	85,45	100,00	100,00	100,00
PROGRAM						
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	14.615.000	14.615.000	100	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
Dinas Tenaga Kerja	3.881.256.980	3.712.725.276	91,24	83,75	83,75	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.354.407.080	3.327.947.876	99,21	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	429.700.000	288.490.000	67,14	80,00	80,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	28.000.000	27.937.500	99,78	80,00	80,00	100,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	69.149.900	68.349.900	98,84	75,00	75,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PERLINDUNGAN ANAK						
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	7.843.982.235	7.583.539.916	93,01	87,14	87,14	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.292.954.375	6.214.185.894	98,75	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN	169.269.700	165.210.222	97,60	40,00	40,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	524.883.860	521.171.500	99,29	85,00	85,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK	25.000.000	25.000.000	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	244.265.100	193.521.100	79,23	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	68.740.000	66.591.689	96,87	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM						
PERLINDUNGAN	518.869.200	411.736.200	79,35	85,00	85,00	100,00
KHUSUS ANAK						
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN						
PEMERINTAHAN						
BIDANG PANGAN						
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	9.955.589.544	9.857.468.453	99,78	67,80	69,63	102,69
PROGRAM						
PENUNJANG	9.574.050.094	9.476.180.503	98,98	100,00	100,00	100,00
URUSAN						
PEMERINTAHAN						

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
DAERAH						
KABUPATEN/KOTA						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	17.760.100	17.760.100	100	10,00	10,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	341.834.950	341.583.450	99,93	40,00	49,13	122,83

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	15.195.000	15.195.000	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	6.749.400	6.749.400	100	89,00	89,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Dinas Lingkungan Hidup	31.202.248.952	30.995.077.965	112,16	78,13	75,00	96,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.440.868.602	25.273.323.588	99,34	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	167.286.250	167.286.250	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	167.587.300	167.471.117	99,93	48,50	48,50	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	435.477.500	430.558.300	98,87	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	8.745.000	8.745.000	99,94	12,00	12,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN	64.167.050	64.167.050	100	100,00	75,00	75,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP	22.874.850	22.874.850	100	14,00	14,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
UNTUK MASYARAKAT						
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	82.429.800	82.379.800	99,94	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.812.812.600	4.778.272.010	99,28	50,50	50,50	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
DAN PENCATATAN SIPIL						
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.046.276.788	8.011.085.541	99,87	100,00	97,50	97,50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN.KOTA	7.556.618.038	7.521.636.291	99,54	100,00	87,50	87,50
II PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	405.543.150	405.371.150	99,96	100,00	100,00	100,00
III PROGRAM PENCATATAN SIPIL	44.490.600	44.490.600	100	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
IV PROGRAM						
PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	30.250.000	30.212.500	99,88	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	9.375.000	9.375.000	100	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	5.001.024.525	4.944.976.728	98,96	76,18	72,94	95,75

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA						
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA SEJAHTERA						
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	287.452.000	284.652.000	99,03	85,00	71,65	84,29
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	2.149.066.150	2.139.725.150	99,57	76,00	76,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.564.506.375	2.520.599.578	98,28790455	67,53	71,17	105,39
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Dinas Perhubungan	17.991.411.166	17.608.699.473	97,77	90,50	89,74	99,15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	15.205.295.966	14.889.042.539	97,92	100,00	98,47	98,47

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.786.115.200	2.719.656.934	97,61	81,00	81,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.799.575.831	5.735.322.515	97,66	88,33	91,11	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.251.742.881	5.195.315.413	98,93	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	434.593.250	433.117.402	99,66	90,00	90,00	100,00
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	113.239.700	106.889.700	94,39	75,00	83,33	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	12.657.412.755	12.297.276.922	98,78	167,02	159,16	95,29
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.317.941.225	8.073.987.142	97,07	100,00	99,17	99,17

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
DAERAH						
KABUPATEN/KOTA						
PROGRAM						
PENGAWASAN DAN						
PEMERIKSAAN						
KOPERASI						
	1.229.050	1.229.050	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM						
PENILAIAN						
KESEHATAN						
KSP/USP KOPERASI						
	6.851.100	6.801.100	99,27	100,00	50,00	50,00
PROGRAM						
PENDIDIKAN DAN						
LATIHAN						
PERKOPERASIAN						
	531.236.000	531.235.100	100	64,00	64,74	101,16
PROGRAM						
PEMBERDAYAAN						
	81.400.000	80.100.000	98,4	19,00	14,05	73,95

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.718.755.380	3.603.924.530	96,91	86,15	86,15	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	464.500.000	463.500.000	99,78	700,00	700,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN						

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
BIDANG PENANAMAN MODAL						
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.416.402.958	5.326.247.584	98,13	100,00	95,40	95,40
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.232.485.573	4.163.793.516	98,38	100,00	97,63	97,63
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	657.909.885	649.100.168	98,66	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	72.664.600	71.164.600	97,94	100,00	83,33	83,33
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	89.192.900	85.539.300	95,90	100,00	91,42	91,42
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	354.700.000	347.200.000	97,89	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	9.450.000	9.450.000	100	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14.774.617.552	14.634.327.993	98,95	100,00	98,95	98,95
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.177.539.052	6.058.102.206	98,07	100,00	99,85	99,85
PROGRAM PENGEMBANGAN	906.225.000	896.627.072	98,94	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.690.853.500	7.679.598.715	99,85	100,00	97,00	97,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
Dinas Komunikasi dan Informatika	29.658.000	29.658.000	100,00	60,00	68,75	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29.658.000	29.658.000	100	60,00	68,75	114,58
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	108.962.850	108.132.850	99	60,00	60,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	108.962.850	108.132.850	99,24	60,00	60,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	328.439.950	306.326.150	95,62	89,50	88,28	98,64
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	57.549.450	57.509.450	99,93	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	140.358.700	120.358.700	85,75	100,00	95,14	95,14
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	65.531.800	65.500.000	99,95	78,00	78,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	65.000.000	62.958.000	96,85	80,00	80,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN						

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
BIDANG PERPUSTAKAAN						
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.954.557.878	4.925.321.457	99,57	66,00	66,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.567.991.898	4.539.668.085	99,38	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	386.565.980	385.653.372	99,76	32,00	32,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	140.701.750	132.701.650	94,31	64,00	64,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	140.701.750	132.701.650	94,31	64,00	64,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9.917.830.978	9.683.102.371	97,91	80,87	76,20	93,72
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN						

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	641.189.350	638.915.150	99,79	33,57	28,39	84,57
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	570.764.650	568.505.150	99,60	25,67	25,67	100,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	70.424.700	70.410.000	99,98	42,31	31,11	73,53
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Tinggi

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.603.103.000	1.596.295.385	99,76	96,25	96,25	100,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	714.320.000	707.597.401	99,06	85,00	85,00	100,00
Program Pemasaran Pariwisata	116.835.500	116.835.500	100	100,00	100,00	100,00
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	66.947.500	66.942.500	99,99	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual						
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	705.000.000	704.919.984	99,99	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.627.667.228	2.603.016.936	99,45	65,40	66,52	100,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.346.347.750	1.330.788.448	98,84	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	804.769.913	797.983.008	99,16	40,00	45,60	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	307.584.965	305.280.880	99,25	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
MASYARAKAT VETERINER						
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	8.629.750	8.629.750	100	80,00	80,00	100,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	160.334.850	160.334.850	100	7,00	7,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	2.575.518.300	2.510.500.300	90,66	100,00	95,22	95,22
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.474.330.050	2.414.277.350	97,57	100,00	100,00	100,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	4.263.750	3.652.750	85,67	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	10.800.000	8.879.000	82,21	100,00	100,00	100,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	86.124.500	83.691.200	97,17	100,00	80,89	80,89
PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
		Predikat Kinerja	Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN						

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
BIDANG PERINDUSTRIAN						
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	2.434.253.600	2.298.373.600	98,05	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.327.795.000	2.191.915.000	94,16	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	48.432.000	48.432.000	100	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN	58.026.600	58.026.600	100	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
Dinas Tenaga Kerja	36.099.500	36.001.000	100	90	90	100
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	36.099.500	36.001.000	99,73	90,00	90,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN						

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
KAWASAN TRANSMIGRASI						
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Sekretariat Daerah	57.236.235.624	55.650.358.900	97,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	39.059.735.044	38.234.099.544	97,89	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	17.550.408.940	16.806.725.734	95,76	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
KESEJAHTERAAN RAKYAT						
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	626.091.640	609.533.622	97,36	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Sekretariat DPRD	60.077.987.238	56.881.932.813	95,98	100,00	97,15	97,15
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.523.811.588	39.483.226.037	92,85	100,00	100,00	100,00
DUKUNGAN PELAKSANAAN	17.554.175.650	17.398.706.776	99,11	100,00	94,29	94,29

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
TUGAS & FUNGSI DPRD						
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.881.084.025	14.382.277.124	97,95	93,33	93,33	100,00
Program Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.203.794.925	9.747.527.470	95,53	80,00	80,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.950.711.950	1.943.239.849	99,62	100,00	100,00	100,00
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.726.577.150	2.691.509.805	98,71	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
KEUANGAN	57.244.122.977	54.977.295.050	95	100	98	98

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	57.244.122.977	54.977.295.050	94,83	100,00	97,50	97,50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.118.097.918	40.184.558.203	95,41	90,00	90,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.788.136.709	9.713.704.225	99,24	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.498.968.850	1.287.788.703	85,91	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.838.919.500	3.791.243.919	98,76	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
KEPEGAWAIAN	7.454.019.586	7.269.134.851	96	100	93	93
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.454.019.586	7.269.134.851	95,95	100,00	92,91	92,91
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.922.989.736	5.805.149.376	98,01	100,00	98,72	98,72

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
DAERAH						
KABUPATEN/KOTA						
PROGRAM						
KEPEGAWAIAN	575.027.150	529.551.080	92,09	90,00	90,00	100,00
DAERAH						
PROGRAM						
PENGEMBANGAN	956.002.700	934.434.395	97,74	90,00	90,00	100,00
SUMBER DAYA						
MANUSIA						
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
PENELITIAN DAN	1.209.698.400	1.202.749.680	99	33	33	100
PENGEMBANGAN						
Badan Perencanaan	1.209.698.400	1.202.749.680	99	33	33	100
Pembangunan						
Daerah						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.209.698.400	1.202.749.680	99,43	32,50	32,50	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.128.251.773	9.064.045.820	100	77	99	129
INSPEKTORAT DAERAH						
Inspektorat Daerah	9.128.251.773	9.064.045.820	99,61	76,67	99,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	7.726.902.918	7.667.330.537	99,23	70,00	70,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	256.395.000	256.220.165	99,93	70,00	60,00	85,71
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	367.385.500	366.176.996	99,67	3	3,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
UNSUR KEWILAYAHAN	71.086.949.690	70.110.195.825	99	96	96	100
KECAMATAN	71.086.949.690	70.110.195.825	99	96	96	100

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Kecamatan Cikole	12.511.893.818	12.407.281.276	99,61	100,00	99,70	99,70
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	8.255.815.868	8.160.176.400	98,84	100,00	98,81	98,81
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	1.884.580.500	1.884.477.643	99,99	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.300.333.850	2.291.463.633	99,61	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	71.163.600	71.163.600	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Kecamatan Gunung Puyuh	9.785.452.579	9.572.300.674	99,18	100,00	99,71	99,71
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.674.128.229	6.467.502.257	96,90	100,00	99,74	99,74
PROGRAM PENYELENGGARAAN	1.453.042.100	1.452.969.100	99,99	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.576.048.250	1.570.016.517	99,62	100,00	99,42	99,42
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66.844.000	66.422.800	99,37	100,00	99,37	99,37
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.390.000	15.390.000	100,00	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Kecamatan Citamiang	10.378.608.685	10.236.432.626	99,49	100,00	99,42	99,42
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.470.494.635	7.332.644.461	98,15	100,00	97,11	97,11
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.226.365.950	1.226.102.447	99,98	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.625.799.900	1.621.769.120	99,75	100,00	100,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	54.718.200	54.691.598	99,95	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.230.000	1.225.000	99,59	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Kecamatan Warudoyong	10.914.648.303	10.792.170.135	99,13	75,00	75,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.306.781.653	7.202.982.066	98,58	90,00	90,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.608.654.950	1.606.260.648	99,85	85,00	85,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN	1.894.926.500	1.879.614.223	99,19	40,00	40,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.597.200	48.625.198	98,04	60,00	60,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.688.000	54.688.000	100,00	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Kecamatan Baros	8.258.347.594	8.108.041.482	98,37	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG	5.770.659.844	5.631.238.790	97,58	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.177.172.350	1.175.974.900	99,90	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.251.454.550	1.243.845.712	99,39	100,00	100,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI	41.559.050	39.483.230	95,01	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.501.800	17.498.850	99,98	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Kecamatan Lembursitu	10.029.232.742	9.916.113.828	99,20	100,00	99,93	99,93
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.864.193.060	6.758.893.156	98,47	100,00	99,64	99,64

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
DAERAH						
KABUPATEN/KOTA						
PROGRAM						
PENYELENGGARAAN						
PEMERINTAHAN	1.459.688.750	1.459.648.850	100,00	100,00	100,00	100,00
DAN PELAYANAN						
PUBLIK						
PROGRAM						
PEMBERDAYAAN						
MASYARAKAT DESA	1.643.329.332	1.636.340.885	99,57	100,00	100,00	100,00
DAN KELURAHAN						
PROGRAM						
KOORDINASI						
KETENTRAMAN DAN	47.921.600	47.210.937	98,52	100,00	100,00	100,00
KETERTIBAN UMUM						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.100.000	14.020.000	99,43	100,00	100,00	100,00
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
Kecamatan Cibeureum	9.208.765.969	9.077.855.804	98,47	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.581.848.994	6.457.336.335	98,11	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.812.500	31.812.500	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.184.889.275	1.184.863.950	100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.365.703.200	1.361.763.613	99,71	100,00	100,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI	44.512.000	42.079.406	94,53	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	21.565.376.428	21.360.004.605	97,51	100,00	85,03	85,03
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.565.376.428	21.360.004.605	97,51	100,00	85,03	85,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.705.161.706	3.631.965.433	98,02	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
DAERAH KABUPATEN/KOTA						
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	919.206.183	884.195.633	96,19	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI	859.104.039	857.189.039	99,78	100,00	100,00	100,00

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	746.829.100	681.829.100	91,30	100,00	89,74	89,74
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	351.800.000	351.800.000	100,00	100,00	100,00	74,90

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan	Anggaran			Kinerja		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	14.983.275.400	14.953.025.400	99,80	100,00	94,12	94,12
		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.

Penilaian rata-rata capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diklasifikasikan dengan kriteria, sebagai berikut:

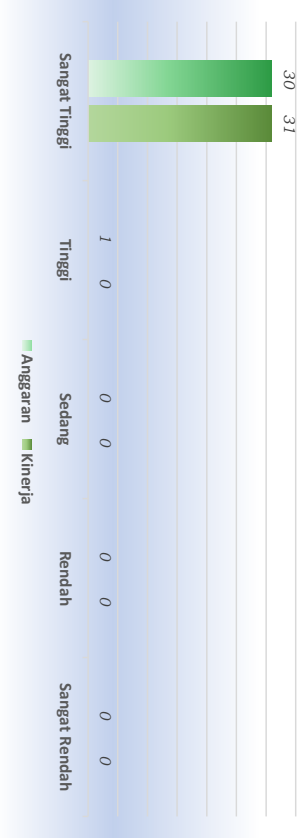
Tabel 2.55
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria
91 ≤ 100	Sangat Tinggi
76 ≤ 90	Tinggi
66 ≤ 75	Sedang
51 ≤ 65	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: *Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.*

Secara umum capaian realisasi anggaran dan kinerja masing-masing perangkat daerah di Kota Sukabumi pada tahun 2024 sangat baik. Rata-rata perangkat daerah masuk dalam kriteria sangat tinggi dalam hal penyerapan anggaran maupun kinerjanya, dan tidak ada perangkat daerah yang masuk dalam kriteria sedang atau lebih rendah dari itu. Jumlah Perangkat Daerah di Kota Sukabumi berdasarkan kriteria capaian anggaran dan kinerja pada tahun 2024 dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.12
Jumlah Perangkat Daerah Berdasarkan Kriteria
Capaian Anggaran dan Kinerja Tahun 2024



Sumber: *Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024, diolah.*

Tabel 2.56
Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	REALISASI ANGGARAN	RATA-RATA CAPAIAN OUTCOME	EFEKTIF & EFISIEN		KETERA NGAN
				%	Rp	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	98.91	< 100			
2	DINAS KESEHATAN	97.82	100	2.18	11.318.046.650	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	97.74	< 100			
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	98.38	100	1.62	229.061.814	
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	98.26	100	1.47	66.599.884	
6	DINAS SOSIAL	98.33	< 100			
7	DINAS TENAGA KERJA	91.53	100	8.55	422.272.191	

NO	PERANGKAT DAERAH	REALISASI ANGGARAN	RATA-RATA CAPAIAN OUTCOME	EFEKTIF & EFISIEN		KETERA NGAN
				%	Rp	
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	99.03	< 100			
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	99.07	100	0.93	355.827.812	
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	98.56	100	1.44	96.432.489	
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK	98.58	< 100			
12	DINAS PERHUBUNGAN	98.48	< 100			

NO	PERANGKAT DAERAH	REALISASI ANGGARAN	RATA-RATA CAPAIAN OUTCOME	EFEKTIF & EFISIEN		KETERA NGAN
				%	Rp	
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	99.12	< 100			
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	97.74	100	2.26	276.716.205	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	98.54	< 100			
16	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	83.63	100	16.37	2.519.474.476	DAK tidak terserap
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	98.37	100	1.63	171.808.072	
18	INSPEKTORAT DAERAH	98.48	< 100			

NO	PERANGKAT DAERAH	REALISASI ANGGARAN	RATA-RATA CAPAIAN OUTCOME	EFEKTIF & EFISIEN		KETERA NGAN
				%	Rp	
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	98.45	100	1.53	284.364.178	
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	96.79	< 100			
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	98.04	100	1.96	163.014.777	
22	SEKRETARIAT DAERAH	96.78	100	3.22	1.793.135.785	
23	SEKRETARIAT DPRD	99.25	100	0.75	465.544.254	
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	99.08	< 100			
25	KECAMATAN CIKOLE	99.34	100	0.66	91.818.636	

NO	PERANGKAT DAERAH	REALISASI ANGGARAN	RATA-RATA CAPAIAN OUTCOME	EFEKTIF & EFISIEN		KETERA NGAN
				%	Rp	
26	KECAMATAN GUNUNG PUYUH	99.61	100	0.39	40.639.561	
27	KECAMATAN CITAMIANG	98.85	100	1.15	135.455.293	
28	KECAMATAN WARUDOYONG	99.01	100	0.99	124.662.357	
29	KECAMATAN BAROS	99.07	100	0.93	86.583.684	
30	KECAMATAN LEMBUR SITU	99.22	100	0.78	90.328.820	
31	KECAMATAN CIBEUREUM	98.74	100	1.26	127.398.034	

Dari Data diatas ada 3 Perangkat Daerah yang Realiasasi Anggaran dan Kinerjanya terbaik yaitu

1. Satpolpp
2. Dinas Kesehatan
3. Kecamatan Warudoyong

2.3.2 Evaluasi Pelaksanaan Per Urusan sampai Triwulan I Tahun 2025

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Per Urusan Kota Sukabumi

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predika t Fisik	Keuanga n (%)	Predikat Keuanga n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	URUSAN WAJIB	972,112,313,957	212,605,836,078	45.84	Sangat Rendah	21.87	Sangat Rendah
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	847,929,562,327	182,804,977,441	19.62	Sangat Rendah	21.56	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predika t Fisik	Keuanga n (%)	Predikat Keuanga n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.0 1	Pendidikan	253,123,968,327	48,513,049,829	19.17	Sangat Rendah	19.17	Sangat Rendah
1.0 2	Kesehatan	505,371,959,394	118,275,733,823	23.40	Sangat Rendah	23.40	Sangat Rendah
1.0 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52,038,043,428	8,535,592,120	16.40	Sangat Rendah	16.40	Sangat Rendah
1.0 4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12,325,301,400	98,771,900	0.80	Sangat Rendah	0.80	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predika t Fisik	Keuanga n (%)	Predikat Keuanga n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.0 5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	17,415,018,357	5,256,728,983	30.19	Sangat Rendah	30.19	Sangat Rendah
1.0 6	Sosial	7,655,271,421	2,125,100,786	27.76	Sangat Rendah	27.76	Sangat Rendah
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	124,182,751,630	29,800,858,637	72.07	Sedang	24.00	Sangat Rendah
2.0 7	Tenaga Kerja	4,594,862,620	995,899,248	21.67	Sangat Rendah	21.67	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predika t Fisik	Keuanga n (%)	Predikat Keuanga n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.0 8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8,881,140,591	2,103,880,594	23.69	Sangat Rendah	23.69	Sangat Rendah
2.0 9	Pangan	10,960,569,395	2,812,493,951	25.66	Sangat Rendah	25.66	Sangat Rendah
2.1 0	Pertanahan	20,750,000	3,355,000	16.17	Sangat Rendah	16.17	Sangat Rendah
2.1 1	Lingkungan Hidup	29,224,310,613	7,376,611,089	25.24	Sangat Rendah	25.24	Sangat Rendah
2.1 2	Administrasi Kependudukan	6,816,205,639	2,472,644,008	36.28	Sangat Rendah	36.28	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predika t Fisik	Keuanga n (%)	Predikat Keuanga n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dan Catatan Sipil						
2.1 3	Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-		Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah
2.1 4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,640,370,000	10,730,000	99.00	Sangat Tinggi	0.23	Sangat Rendah
2.1 5	Perhubungan	18,358,329,505	4,134,857,886	97.80	Sangat Tinggi	22.52	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predika t Fisik	Keuanga n (%)	Predikat Keuanga n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1 6	Komunikasi dan Informatika	6,684,904,593	1,788,141,220	95.77	Sangat Tinggi	26.75	Sangat Rendah
2.1 7	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10,393,662,624	2,304,512,095	91.12	Sangat Tinggi	22.17	Sangat Rendah
2.1 8	Penanaman Modal	5,867,989,145	1,500,099,149	95.13	Sangat Tinggi	25.56	Sangat Rendah
2.1 9	Kepemudaan dan Olahraga	10,036,124,361	2,738,104,531	98.31	Sangat Tinggi	27.28	Sangat Rendah
2.2 0	Statistik	51,123,000	5,350,000	100.00	Sangat Tinggi	10.46	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predika t Fisik	Keuanga n (%)	Predikat Keuanga n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2 1	Persandian	125,041,450	3,280,000	100.00	Sangat Tinggi	2.62	Sangat Rendah
2.2 2	Kebudayaan	441,114,000	30,000,000	100.00	Sangat Tinggi	6.80	Sangat Rendah
2.2 3	Perpustakaan	6,901,830,544	1,451,805,866	99.35	Sangat Tinggi	21.04	Sangat Rendah
2.2 4	Kearsipan	184,423,550	69,094,000	100.00	Sangat Tinggi	37.46	Sangat Rendah
3	URUSAN PILIHAN	4,753,056,536	636,555,800	100.00	Sangat Tinggi	13.39	Sangat Rendah
3.2 5	Kelautan dan Perikanan	499,884,700	58,306,250	100.00	Sangat Tinggi	11.66	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predika t Fisik	Keuanga n (%)	Predikat Keuanga n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.2 6	Pariwisata	1,422,268,000	270,861,686	100.00	Sangat Tinggi	19.04	Sangat Rendah
3.2 7	Pertanian	1,643,437,886	118,903,864	100.00	Sangat Tinggi	7.24	Sangat Rendah
3.2 8	Kehutanan						
3.2 9	Energi dan Sumberdaya Mineral						
3.3 0	Perdagangan	746,194,950	119,461,000	100.00	Sangat Tinggi	16.01	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predika t Fisik	Keuanga n (%)	Predikat Keuanga n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.3 1	Perindustrian	379,271,000	37,371,000	100.00	Sangat Tinggi	9.85	Sangat Rendah
3.3 2	Transmigrasi	62,000,000	31,652,000	100.00	Sangat Tinggi	51.05	Rendah
4	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	111,084,836,790	29,342,930,545	94.84	Sangat Tinggi	26.41	Sangat Rendah
4.0 1	Sekretariat Daerah	53,724,322,055	13,593,143,798	92.30	Sangat Tinggi	25.30	Sangat Rendah
4.0 2	Sekretariat DPRD	57,360,514,735	15,749,786,747	97.38	Sangat Tinggi	27.46	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predika t Fisik	Keuanga n (%)	Predikat Keuanga n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	93,968,626,523	20,503,515,379	97.65	Sangat Tinggi	21.82	Sangat Rendah
5.0 1	Perencanaan	16,687,390,653	3,683,328,229	97.53	Sangat Tinggi	22.07	Sangat Rendah
5.0 2	Keuangan	67,370,770,898	15,004,581,682	98.47	Sangat Tinggi	22.27	Sangat Rendah
5.0 3	Kepegawaian	7,376,851,786	1,759,623,068	92.27	Sangat Tinggi	23.85	Sangat Rendah
5.0 4	Pendidikan dan Pelatihan	1,071,321,186	4,913,200	100.00	Sangat Tinggi	0.46	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predika t Fisik	Keuanga n (%)	Predikat Keuanga n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.0 5	Penelitian dan Pengembangan	1,462,292,000	51,069,200	100.00	Sangat Tinggi	3.49	Sangat Rendah
5.0 6	Penghubung						
5.0 7	Pengelolaan Perbatasan Daerah						
6	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11,837,447,854	2,891,547,008	94.81	Sangat Tinggi	24.43	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predika t Fisik	Keuanga n (%)	Predikat Keuanga n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.0 1	Inspektorat	11,837,447,854	2,891,547,008	94.81	Sangat Tinggi	24.43	Sangat Rendah
7	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	89,732,873,641	14,102,226,748	97.56	Sangat Tinggi	15.72	Sangat Rendah
7.0 1	Kecamatan	89,732,873,641	14,102,226,748	97.56	Sangat Tinggi	15.72	Sangat Rendah
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6,044,866,306	971,637,400	98.28	Sangat Tinggi	16.07	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predika t Fisik	Keuanga n (%)	Predikat Keuanga n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.0 1	Kesatuan Bangsa dan Politik	6,044,866,306	971,637,400	98.28	Sangat Tinggi	16.07	Sangat Rendah
	TOTAL	1,289,534,021,607	281,054,248,958	84.35	Tinggi	21.80	Sangat Rendah

2.3.3 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Triwulan I Tahun 2025

Adapun Realisasi Anggaran dan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.58
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2025 Triwulan I

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	253,565,082,327.00	48,543,049,829.00	19.14	69.45	4.09	5.89
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	76,897,790,200.00	13,313,737,650.00	17.31	100	17	17.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	37,270,000.00		0.00	100	1	1.00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	79,889,800.00	6,324,800.00	7.92	15	3	20.00
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	10,000,000.00	-	0.00	100	0	0.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	35,000,000.00	-	0.00	90	0	0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	135,489,000.00	30,000,000.00	22.14	13	4	30.77
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	170,000,000.00	-	0.00	55	0	0.00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	20,000,000.00	-	0.00	60	0	0.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	50,000,000.00	-	0.00	76	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	65,625,000.00	-	0.00	55	0	0.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	176,064,018,327.00	35,192,987,379.00	19.99	100	20	20.00
Dinas Kesehatan	505,371,959,394.00	118,275,733,823.00	23.40	99.70	8.00	8.02

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72,187,372,135.00	7,584,491,267.00	10.51	98.5	11	11.17
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2,457,546,000.00	10,721,000.00	0.44	100	0	0.00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	806,391,000.00	-	0.00	100	0	0.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3,880,512,000.00	83,933,000.00	2.16	100	3	3.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	426,040,138,259.00	110,596,588,556.00	25.96	100	26	26.00
Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	64,384,094,828.00	8,637,719,020.00	13.42	100	9.07	9.07
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2,846,589,000.00	904,824,099.00	31.79	57.37	32	55.78

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5,827,517,953.00	49,031,300.00	0.84	100	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3,465,689,400.00	43,900,000.00	1.27	57.95	2	3.45
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	771,500,000.00	8,647,000.00	1.12	42.46	1	2.36
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5,823,002,050.00	70,002,683.00	1.20	9.38	1	10.66

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3,942,008,625.00	267,721,000.00	6.79	78.95	7	8.87
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	12,737,579,745.00	3,078,241,200.00	24.17	85.51	25	29.24
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	193,200,250.00	62,600,000.00	32.40	38.01	33	86.82
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	614,396,978.00	25,778,000.00	4.20	70	2	2.86

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	462,037,350.00	5,629,500.00	1.22	100	2	2.00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	10,684,809,400.00	39,562,400.00	0.37	10	0	0.00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	861,930,800.00	6,965,000.00	0.81	1.36	0	0.00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	316,523,850.00	46,615,000.00	14.73	11.38	2	17.57
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	20,750,000.00	3,355,000.00	16.17	70	3	4.29

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,816,559,427.00	4,024,846,838.00	25.45	100	26	26.00
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	13,236,221,593.00	3,851,572,520.00	29.10	100	38.33	38.33
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,630,136,850.00	470,649,500.00	28.87	100	29	29.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	280,999,000.00	167,420,000.00	59.58	100	57	57.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,325,085,743.00	3,213,503,020.00	28.38	100	29	29.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,178,796,764.00	1,405,156,463.00	33.63	100.00	27.00	27.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	363,335,000.00	107,333,100.00	29.54	100	29	29.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,815,461,764.00	1,297,823,363.00	34.01	100	25	25.00
Dinas Sosial	7,655,271,421.00	2,125,100,786.00	27.76	89.29	21.43	24.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,139,440,000.00	385,593,000.00	33.84	25.00	7	28.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	9,640,000.00	130,000.00	1.35	100	2	2.00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	402,198,150.00	58,020,000.00	14.43	100	15	15.00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	520,458,500.00	83,768,000.00	16.10	100	16	16.00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	397,031,000.00	69,575,000.00	17.52	100	20	20.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	31,915,000.00	19,775,000.00	61.96	100	60	60.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,154,588,771.00	1,508,239,786.00	29.26	100	30	30.00
Dinas Tenaga Kerja	4,656,862,620.00	1,027,551,248.00	22.07	100	14.67	14.67
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3,945,646,820.00	977,695,348.00	24.78	100	25	25.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
DAERAH KABUPATEN/KOTA						
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	396,156,000.00	6,100,000.00	1.54	100	2	2.00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	140,000,000.00	5,045,000.00	3.60	100	4	4.00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	113,059,800.00	7,058,900.00	6.24	100	7	7.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	62,000,000.00	31,652,000.00	51.05	100	50	50.00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	13,521,510,591.00	2,114,610,594.00	15.64	100	14.10	14.10
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	84,377,000.00	5,901,560.00	6.99	100	7	7.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	160,710,000.00	7,000,000.00	4.36	100	5	5.00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	403,350,000.00	43,379,175.00	10.75	100	11	11.00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	8,688,000.00	1,238,000.00	14.25	100	15	15.00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	11,498,250.00	4,848,250.00	42.17	100	42	42.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	401,919,547.00	8,414,500.00	2.09	100	3	3.00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	291,745,000.00	95,879,250.00	32.86	100	33	33.00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,514,976,900.00	5,845,000.00	0.23	100	0	0.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,125,393,100.00	4,885,000.00	0.23	100	0	0.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,518,852,794.00	1,937,219,859.00	25.76	100	25	25.00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	13,103,891,981.00	2,989,704,065.00	22.815	87.45	23.82	27.23
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-	0.00	25	0	0.00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	544,768,250.00	67,454,000.00	12.38	22	13	59.09

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	113,650,000.00	-	0.00	90	0	0.00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	6,749,400.00	2,477,300.00	36.70	89	38	42.70
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	405,932,700.00	54,381,250.00	13.40	26	14	53.85
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	93,952,000.00	3,925,000.00	4.18	110	5	4.55

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	341,783,500.00	40,357,250.00	11.81	100	12	12.00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	793,956,000.00	65,974,114.00	8.31	100	100	100.00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	177,248,336.00	3,055,000.00	1.72	100	3	3.00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	320,450,050.00	4,667,500.00	1.46	100	2	2.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	10,000,000.00	4,850,000.00	48.50	100	48	48.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,295,401,745.00	2,742,562,651.00	26.64	100	27	27.00
Dinas Lingkungan Hidup	29,224,310,613.00	7,376,611,089.00	25.24	78.25	13.00	16.61
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	260,636,250.00	17,280,500.00	6.63	100	7	7.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	424,660,000.00	35,416,574.00	8.34	100	9	9.00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	296,589,000.00	13,010,000.00	4.39	25.5	5	19.61
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	10,000,000.00	-	0.00	100	0	0.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	50,875,050.00	11,622,000.00	22.84	100	23	23.00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN	100,000,000.00	-	0.00	33	0	0.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	30,018,500.00	763,000.00	2.54	25	3	12.00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	84,815,650.00	25,967,000.00	30.62	100	31	31.00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1,407,901,370.00	349,436,500.00	24.82	99	25	25.25
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	26,558,814,793.00	6,923,115,515.00	26.07	100	27	27.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,816,205,639.00	2,472,644,008.00	36.28	100	34.4	34.40
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	307,698,850.00	71,184,000.00	23.13	100	23.00	23.00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	94,765,100.00	27,230,000.00	28.73	100	30.00	30.00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	136,617,200.00	19,315,000.00	14.14	100	14.00	14.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	19,983,000.00	13,245,000.00	66.28	100	67.00	67.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,257,141,489.00	2,341,670,008.00	37.42	100	38.00	38.00
Dinas Komunikasi dan Informatika	6,861,069,043.00	1,796,771,220.00	26.19	84.60	17.20	20.33
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	496,747,000.00	168,158,000.00	33.85	90	34	37.78

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	330,562,000.00	31,294,000.00	9.47	93	10	10.75
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	51,123,000.00	5,350,000.00	10.46	60	11	18.33
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	125,041,450.00	3,280,000.00	2.62	100	3	3.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,857,595,593.00	1,588,689,220.00	27.12	80	28	35.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	11,519,128,574.00	2,461,344,095.00	21.37	100	8.35	8.35
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	35,010,000.00	680,000.00	1.94	100	2	2.00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	25,000,000.00	-	0.00	100	0	0.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	44,200,000.00	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	81,400,000.00	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	785,948,950.00	58,042,000.00	7.38	100	8	8.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	350,000,000.00	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	45,066,300.00	1,995,000.00	4.43	100	5	5.00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	339,320,450.00	68,847,000.00	20.29	100	21	21.00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	70,904,500.00	17,540,000.00	24.74	100	25	25.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	130,990,000.00	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	130,980,000.00	33,074,000.00	25.25	100	27	27.00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	74,000,000.00	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	174,571,000.00	20,201,000.00	11.57	100	12	12.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	60,550,000.00	2,865,000.00	4.73	100	7	7.00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	144,150,000.00	14,305,000.00	9.92	100	10	10.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,027,037,374.00	2,243,795,095.00	24.86	100	25	25.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,867,989,145.00	1,500,099,149.00	25.56	100.00	21.50	21.50
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	64,999,500.00	17,577,500.00	27.04	100	27	27.00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	427,473,500.00	68,348,000.00	15.99	100	16	16.00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	130,606,800.00	12,983,000.00	9.94	100	10	10.00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	109,688,500.00	38,616,000.00	35.21	100	35	35.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
INFORMASI PENANAMAN MODAL						
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	75,000,000.00	10,640,500.00	14.19	100	15	15.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,060,220,845.00	1,351,934,149.00	26.72	100	26	26.00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	11,458,392,361.00	3,008,966,217.00	26.26	55.43	16.14	29.11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	957,759,950.00	410,562,950.00	42.87	80	43	53.75
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2,540,273,350.00	339,031,850.00	13.35	18	14	77.78
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	325,320,000.00	186,991,186.00	57.48	20	10	50.00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	231,835,500.00	20,975,500.00	9.05	4	0.36	9.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	96,900,000.00	3,150,000.00	3.25	16	3	18.75
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	768,212,500.00	59,745,000.00	7.78	150	11.6	7.73
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6,538,091,061.00	1,988,509,731.00	30.41	100	31	31.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7,086,254,094.00	1,520,899,866.00	21.46	67.1	15.2	22.65
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1,473,510,520.00	116,794,700.00	7.93	72	8	11.11
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	41,298,000.00	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	162,923,550.00	69,094,000.00	42.41	63.5	43	67.72

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	21,500,000.00	-	0.00	66,8	0	0.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,387,022,024.00	1,335,011,166.00	24.78	100	25	25.00
Sekretariat Daerah	53,724,322,055.00	13,593,143,798.00	25.30	100	21.33	21.33
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11,986,930,008.00	1,296,241,900.00	10.81	100	12	12.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	576,978,100.00	125,885,810.00	21.82	100	22	22.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41,160,413,947.00	12,171,016,088.00	29.57	100	30	30.00
Sekretariat DPRD	57,360,514,735.00	15,749,786,747.00	27.46	100	28.50	28.50
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20,474,902,550.00	5,205,755,853.00	25.43	100	27	27.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36,885,612,185.00	10,544,030,894.00	28.59	100	30	30.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18,149,682,653.00	3,734,397,429.00	20.58	100	16.25	16.25
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2,939,619,000.00	759,409,539.00	25.83	100	26	26.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4,054,013,500.00	255,571,328.00	6.30	100	7	7.00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,462,292,000.00	51,069,200.00	3.49	100	4	4.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,693,758,153.00	2,668,347,362.00	27.53	100	28	28.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Inspektorat Daerah	11,837,447,854.00	2,891,547,008.00	24.43	89.33	15.33	17.16
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,230,935,000.00	107,630,000.00	8.74	78	9	11.54
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	648,184,000.00	53,770,000.00	8.30	100	9	9.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,958,328,854.00	2,730,147,008.00	27.42	90	28	31.11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Perhubungan	18,358,329,505.00	4,134,857,886.00	22.52	100	18.50	18.50
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2,376,803,150.00	268,688,357.00	11.30	100	12	12.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,981,526,355.00	3,866,169,529.00	24.19	100	25	25.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	67,370,770,898.00	15,004,581,682.00	22.27	100	17.00	17.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45,640,911,230.00	13,076,605,837.00	28.65	100	29	29.00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14,636,028,068.00	704,918,426.00	4.82	100	5	5.00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,440,257,350.00	190,277,150.00	13.21	100	14	14.00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5,653,574,250.00	1,032,780,269.00	18.27	100	20	20.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8,448,172,972.00	1,764,536,268.00	20.89	100	11.33	11.33
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	687,021,800.00	50,423,526.00	7.34	100	8	8.00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,071,321,186.00	4,913,200.00	0.46	100	0	0.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,689,829,986.00	1,709,199,542.00	25.55	100	26	26.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Kecamatan Cikole	15,846,261,351.00	819,822,660.00	5.17	100	11 2/5	11.40
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,848,921,926.00	25,004,600.00	1.35	100	1	1.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4,403,240,150.00	79,077,800.00	1.80	100	2	2.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	68,199,950.00	13,489,600.00	19.78	100	20	20.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,357,500.00	2,880,000.00	18.75	100	19	19.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,510,541,825.00	699,370,660.00	7.35	100	15	15.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Kecamatan Gunung Puyuh	12,106,702,085.00	2,008,453,879.00	16.59	100	9	9.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,411,998,708.00	8,704,800.00	0.62	100	0	0.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,919,040,900.00	56,494,500.00	1.94	100	2	2.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	52,698,000.00	8,586,000.00	16.29	100	17	17.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47,500,000.00	-	0.00	100	0	0.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,675,464,477.00	1,934,668,579.00	25.21	100	26	26.00
Kecamatan Citamiang	12,984,122,323.00	2,460,596,726.00	18.95	99.4	11.6	11.67
PROGRAM PENYELENGGARAAN	1,235,396,222.00	84,761,500.00	6.86	97	7	7.22

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,148,094,000.00	24,362,900.00	0.77	100	0	0.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50,000,000.00	11,541,000.00	23.08	100	23	23.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30,250,000.00	-	0.00	100	0	0.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,520,382,101.00	2,339,931,326.00	27.46	100	28	28.00
Kecamatan Warudoyong	13,896,380,505.00	2,460,677,477.00	17.71	97.6	17	17.42
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,567,557,682.00	22,622,800.00	1.44	88	2	2.27
PROGRAM PEMBERDAYAAN	3,545,108,400.00	77,634,300.00	2.19	100	3	3.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43,558,200.00	9,437,800.00	21.67	100	22	22.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49,980,000.00	15,575,000.00	31.16	100	31	31.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,690,176,223.00	2,335,407,577.00	26.87	100	27	27.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Kecamatan Baros	10,363,706,723.00	1,802,997,991.00	17.40	100	12.2	12.2
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,144,236,860.00	58,269,900.00	5.09	100	6	6.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,423,652,700.00	12,422,000.00	0.51	100	0	0.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36,768,200.00	6,465,000.00	17.58	100	18	18.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23,854,000.00	2,590,000.00	10.86	100	11	11.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,735,194,963.00	1,723,251,091.00	25.59	100	26	26.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
Kecamatan Lembursitu	13,345,659,864.00	2,447,771,373.00	18.34	100	15.6	15.6
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1,512,299,912.00	59,245,050.00	3.92	100	4	4.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,081,829,150.00	52,672,800.00	1.71	100	2	2.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	74,871,600.00	8,100,000.00	10.82	100	11	11.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	76,295,000.00	25,815,000.00	33.84	100	34	34.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,600,364,202.00	2,301,938,523.00	26.77	100	27	27.00
Kecamatan Cibeureum	11,190,040,790.00	2,101,906,642.00	18.78	77.2	10.4	13.47
PROGRAM PENYELENGGARAAN	1,177,917,668.00	58,374,800.00	4.96	80	5	6.25

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,526,604,750.00	22,118,600.00	0.88	31	0	0.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	52,648,000.00	5,864,400.00	11.14	75	11	14.67
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30,227,000.00	2,470,000.00	8.17	100	8	8.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,402,643,372.00	2,013,078,842.00	27.19	100	28	28.00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6,044,866,306.00	971,637,400.00	16.07	100	12.6	12.6
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	913,532,900.00	162,817,900.00	17.82	100	18	18.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	909,688,506.00	6,097,500.00	0.67	100	0	0.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	747,281,500.00	32,312,000.00	4.32	100	5	5.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Anggaran			Realisasi		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	420,381,000.00	63,425,000.00	15.09	100	16	16.00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3,053,982,400.00	706,985,000.00	23.15	100	24	24.00

Sumber: Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025 diolah, Bappeda 2025.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dan kinerja hingga triwulan I tahun 2025 belum ada yang mencapai target karena masih banyak kegiatan belum dapat dilaksanakan karena beberapa faktor, misalnya karena belum waktunya dilaksanakan atau masih dalam tahapan persiapan. Dalam kerangka acuan kerja masing-masing subkegiatan di perangkat daerah rata-rata capaian kinerja baru dapat terlihat di awal triwulan III.

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang diencanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari pendayagunaan kekuatan yang belum optimal serta kelemahan yang belum teratasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor.

2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan berbagai isu pembangunan maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis daerah. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama/permasalahan daerah yang harus diselesaikan Kepala Daerah serta seluruh Perangkat Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

2.4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pembangunan berkaitan dengan kondisi fisik geografi di Kota Sukabumi, antara lain: (1) Alih fungsi lahan yang massif untuk permukiman; (2) Minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau;

(3) Pengelolaan kawasan lindung yang belum optimal; (4) Sistem pangan yang belum optimal (5) Risiko bencana terutama gempa bumi, banjir, dan tanah longsor cukup besar.

Permasalahan demografi berdasarkan kondisi umum daerah dan proyeksi yang telah dilakukan di Kota Sukabumi, antara lain: (1) Belum adanya perubahan paradigma terkait bonus demografi yang seharusnya lebih menekankan pada konfigurasi tingkat pendidikan penduduk; (2) Kontribusi perempuan dalam pembangunan belum optimal; (3) Belum optimalnya pengelolaan SDM terintegrasi baik sektor publik maupun swasta serta pemberdayaan yang inklusif; dan (4) Keberlangsungan kehidupan masyarakat adat ditengah arus globalisasi yang belum sepenuhnya tertangani.

2.4.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.4.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan kesejahteraan ekonomi di Kota Sukabkumi antara lain: (1) Adanya kesenjangan distribusi kekayaan di masyarakat; (2) Pertumbuhan ekonomi masih cenderung stagnan dan berada dibawah angka Jawa Barat; (3) Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih belum optimal; (4) Terbatasnya lapangan kerja menyebabkan TPT masih tinggi; dan (5) IPM skala kota msih cukup rendah dibanding kota lain di Jawa Barat.

2.4.1.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Permasalahan kesejahteraan sosial budaya berdasarkan kondisi umum di Kota Sukabumi antara lain: (1) Belum merata dan tercukupinya SDM Kesehatan serta penanganan ketahanan kesehatan; (2) Belum optimalnya pemberian pelayanan sosial; (3) Minimnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial; (4) Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; (5) Rendahnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga;

(6) Kurangnya minat masyarakat dalam melestarikan seni budaya tradisional; (7) Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat; dan (8) Masih tingginya kenakalan remaja.

2.4.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1.3.1 Daya Saing Ekonomi

Permasalahan daya saing ekonomi di Kota Sukabumi, antara lain: (1) Belum optimalnya sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital; (2) Kesenjangan rata-rata pengeluaran per kapita di wilayah utara-selatan; (3) Belum optimalnya pola kemitraan koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar; (4) Belum optimalnya ekosistem wirausaha; (5) Masih rendahnya IKM produktif; (6) Proses perizinan usaha yang dianggap masih berbelit dan mahal; (7) Inklusivitas pembangunan ekonomi; dan (8) Penguatan ekosistem ekonomi digital.

2.4.1.3.2 Daya Saing SDM

Permasalahan daya saing SDM di Kota Sukabumi, antara lain: (1) Kualitas dan kuantitas pendidikan yang masih rendah; (2) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kerja masyarakat; (3) Kurang optimalnya pengembangan *softskill*; (4) Kurangnya literasi digital masyarakat; (5) Kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah; (6) Belum optimalnya pendidikan karakter masyarakat.

2.4.1.3.3 Daya Saing Infrastruktur

Permasalahan daya saing infrastruktur di Kota Sukabumi berdasarkan kondisi umum daerah, antara lain: (1) Konektivitas antar wilayah masih belum memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; (2) Masih adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur; dan (3) Belum optimalnya penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan.

2.4.1.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan daya saing iklim investasi di Kota Sukabumi, diantaranya: (1) Belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi UMKM; (2) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; (3) Masih adanya pelanggaran PERDA; dan (4) Konflik sosial di masyarakat masih sering terjadi.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah Tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi di Kota Sukabumi pada Tahun 2025 berdasarkan proyeksi dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang mempengaruhinya terutama kondisi perekonomian Tahun 2024. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025. Kerangka pendanaan menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Kerangka Ekonomi Daerah pada perubahan RKPD tahun 2025 memuat perkembangan perekonomian global maupun nasional, kondisi pemulihan ekonomi yang berkembang sampai dengan tahun 2024, awal tahun 2025 dan perkiraan akhir tahun 2025 di Kota Sukabumi dengan memperhatikan potensi pertumbuhan sektor lapangan usaha prioritas dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi.

3.1 Kondisi Perekonomian

Pada Januari 2024, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 sebesar 2,7 persen, sementara untuk tahun 2025 sebesar 3 persen. Tantangan ekonomi global pada tahun 2024-2025 diprediksi akan melibatkan pengetatan kebijakan moneter sebagai respons terhadap inflasi yang tinggi, invasi Rusia ke Ukraina, dan dinamika geopolitik di Timur Tengah terkait konflik Israel-Palestina, serta dampak El Nino terkait perubahan iklim.

Secara regional, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami pelemahan terbesar di Amerika Utara, Eropa, Asia Tengah, dan Asia-Pasifik, terutama karena perlambatan pertumbuhan di China, menurut Bank Dunia. Meskipun sedikit perbaikan diharapkan di Amerika Latin dan Karibia dengan tingkat pertumbuhan yang rendah, peningkatan yang lebih signifikan diperkirakan terjadi di Timur Tengah dan Afrika.

Negara berkembang diperkirakan akan menjadi yang paling terdampak dalam jangka menengah akibat lesunya perdagangan global dan kondisi keuangan yang ketat yang memberatkan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi jangka pendek diproyeksikan tetap lemah, memberikan tekanan khususnya pada negara-negara berkembang, terutama yang terjebak dalam perangkap utang yang tinggi dan menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan. Di sisi lain, potensi ledakan investasi dapat menjadi katalis untuk mengubah nasib negara-negara berkembang, membantu mempercepat transisi energi dan mencapai berbagai tujuan pembangunan.

Tantangan perekonomian nasional bersumber dari dua aspek, yaitu inflasi, serta perdagangan dan investasi. Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan bergantung pada faktor-faktor internal karena adanya estimasi perlambatan permintaan global di tahun 2024. Stabilitas inflasi domestik dan meredanya tekanan pasar keuangan di Indonesia membuka peluang untuk kebijakan moneter yang lebih longgar pada tahun 2024. Meskipun demikian, ketidakpastian terkait suku bunga global yang fluktuatif tetap menjadi faktor yang membuat Bank Indonesia beradadalam kewaspadaan. Diperkirakan Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga sebesar 50-75 basis poin pada tahun 2024, bergantung pada kebijakan *dovish* yang diambil oleh *Federal Reserve* Amerika Serikat.

Tantangan juga bersumber dari sektor perdagangan dan investasi. Meskipun Indonesia berhasil mempertahankan surplus perdagangan, proyeksi harga komoditas yang tinggi, pertumbuhan permintaan domestik yang kuat, dan kinerja investasi yang tangguh dapat menyebabkan neraca transaksi berjalan tetap defisit sebesar 0,5 persen dari PDB pada tahun mendatang. Selain itu, konsumsi domestik menjadi faktor penting dalam dinamika ekonomi Indonesia. Evaluasi konsumsi domestik pasca kenaikan harga bahan bakar pada tahun 2022 menunjukkan pemulihan yang signifikan pada pertengahan tahun 2023. Stabilitas harga dan peningkatan impor barang konsumsi dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memfasilitasi pemulihan ini. Dengan mempertahankan stabilitas harga dan menanggulangi tantangan impor barang konsumsi, Indonesia dapat menjaga keberlanjutan pemulihan konsumsi domestik.

Terakhir, ketergantungan pada pasar ekspor untuk pertumbuhan ekonomi merupakan dinamika yang perlu diperhatikan. Meskipun Indonesia telah lama mengandalkan pasar ekspor sebagai pendorong pertumbuhan, penurunan harga komoditas telah memengaruhi *terms of trade*. Diversifikasi ekspor menjadi strategi yang semakin penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Perubahan paradigma ini akan memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, membuka jalan menuju keberlanjutan dan ketahanan ekonomi di masa depan.

Tantangan ekonomi Jawa Barat bersumber dari belum meratanya investasi yang masuk ke Jawa Barat, karena masih terkonsentrasi di Jawa Barat bagian utara. Kemudian mayoritas kabupaten/kota di Jawa Barat terkategori memiliki kapasitas fiskal yang rendah, dimana porsi realisasi belanja yang bersifat produktif masih rendah, sehingga perlu kerangka kebijakan untuk mendorong produktivitas kabupaten/kota.

Tekanan inflasi di negara maju yang masih berlanjut, dan kebijakan moneter ketat diproyeksikan akan membebani aktivitas ekonomi di beberapa negara mitra dagang Jawa Barat, sehingga akan menurunkan permintaan negeri atas produk Industri manufaktur, sebagaimana diketahui bahwa industri manufaktur adalah penyumbang terbesar PDRB Jawa Barat.

Perubahan iklim juga ikut andil dalam yang membuat sulitnya memprediksi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Jawa Barat, sehingga menjadi penyebab utama inflasi pada komoditas pangan. Perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang PDRB Jawa Barat dan penyerapan tenaga kerja.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi nasional dan provinsi, maka tantangan perekonomian Kota Sukabumi juga cukup berat. Kondisi ketidakpastian senantiasa menghinggapi sektor usaha sehingga diperlukan berbagai upaya-upaya terukur dan tepat dalam mengantisipasinya. Secara makro tantangan perekonomian Kota Sukabumi pada tahun 2025 ini kurang lebih meliputi beberapa hal dibawah ini:

1. Memelihara stabilitas kinerja perekonomian di tengah ketidakpastian perekonomian global;
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci PDRB Kota Sukabumi melalui percepatan realisasi investasi;
3. Optimalisasi ekonomi digital dan industri yang berbasis *high tech*;
4. Penguatan konektivitas dan inklusivitas ekonomi Kota Sukabumi, diversifikasi ekonomi khususnya UMKM, IKM serta pariwisata;
5. Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan di tengah perubahan iklim; dan
6. Tenaga kerja yang terampil sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

3.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian Kota Sukabumi tahun 2024 menunjukkan kinerja positif Kota Sukabumi dengan pertumbuhan sebesar 5,11 persen. Geliat positif dalam perekonomian di Kota Sukabumi terjadi pada seluruh kategori perekonomian, kecuali pada kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yang mengalami pertumbuhan negatif di 2024. Pertumbuhan positif tertinggi di tahun 2024 dialami oleh kategori H (Transportasi dan Pergudangan) yaitu mencapai 9,33 persen. Kemudian diikuti oleh Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) sebesar 9,33 persen serta Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) sebesar 6,97 persen. Sementara pertumbuhan negatif sebesar 0,02 persen dialami oleh kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas).

Secara umum, struktur perekonomian Kota Sukabumi masih didominasi oleh empat kategori lapangan usaha yaitu Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sukabumi yaitu sebesar 36,83 persen, lalu kategori F (Konstruksi), H (Transportasi dan Pergudangan) dan kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi). Keempat kategori tersebut secara serentak berkontribusi sebesar 67,08 persen terhadap PDRB Kota Sukabumi tahun 2024.

Lapangan Usaha dengan laju pertumbuhan dominan pada dua tahun terakhir adalah H (Transportasi), R,S,T,U, (Jasa Lainnya), A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) serta F (Konstruksi). Perbedaan pola pertumbuhan ekonomi tersebut tampaknya disebabkan oleh pengaruh pemulihan pasca dampak pandemi Covid 19 masih terasa di tahun 2022, sedangkan pada 2023-2024 geliat ekonomi Kota Sukabumi sudah bergerak normal sesuai potensi sumber daya yang dimiliki. Pertumbuhan ekonomi serta beberapa kategori yang dominan berpengaruh dalam kurun waktu tiga tahun terakhir digambarkan pada grafik berikut ini.

Pada tahun 2022, perekonomian mencapai 5,35 persen dengan pertumbuhan tertinggi dialami oleh kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) dan kategori F (Konstruksi) terjadi kontraksi. Sementara di tahun 2023- 2024 perekonomian Kota Sukabumi tampak menunjukkan pola yang serupa, yaitu masing-masing tumbuh sebesar 5,12 persen dan 5,11 persen.

Tahun 2024 Kota Sukabumi tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen. Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencapai 5,94 persen, selanjutnya Konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga) sebesar 5,21 persen, Konsumsi rumah tangga 4,61 persen, dan terakhir adalah Konsumsi Pemerintah sebesar 1,35 persen. Sementara pertumbuhan komponen inventori dan komponen ekspor neto laju pertumbuhannya tidak ditampilkan.

Struktur PDRB pengeluaran Kota Sukabumi tahun 2024 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga yang menyumbang 82,12 persen terhadap nilai total PDRB diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 15,97 persen, Konsumsi Pemerintah sebesar 10,30 persen dan konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga) sebesar 4,60 persen. Sementara itu komponen ekspor neto dan Perubahan inventori yang bernilai negatif, merupakan komponen pengurang dalam PDRB, masing-masing memiliki kontribusi sebesar 12,87 persen dan 0,12 persen.

Perekonomian bergerak dengan baik di tahun 2022 dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 persen dan diwarnai oleh peranan komponen LNPRT yang menonjol. Pada tahun 2023 Komponen LNPRT masih mendominasi laju pertumbuhan dari sisi pengeluaran, walau kecepatan pertumbuhan PDRB mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya.

Masa tahun politik di 2022-2023 ditandai dengan pertumbuhan di komponen LNPRRT yang cukup tinggi. Tahun 2024 peran komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto mengambil peran yang signifikan dalam perekonomian Kota Sukabumi dengan menunjukkan laju pertumbuhan tertinggi.

Tabel 3.1
PDRB Per Kapita Kota Sukabumi Tahun 2020 – 2024

No	PDRB Per Kapita	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam miliar rupiah	37, 50	37,21	39,82	42,56	44,76
2.	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam miliar rupiah	25,80	25,23	26,16	27,18	-

Sumber: Hasil analisis Bappeda

PDRB per kapita Kota Sukabumi baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 menunjukkan kenaikan, Hal tersebut menunjukan trend yang cukup positif dan berdampak kepada kondisi perekonomian masyarakat. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dan 2024 ini selalu diatas Provinsi dan Nasional, hal ini menunjukan kinerja ekonomi yang cukup baik dan dilakukan oleh eluruh sektor yang ada.

3.2.2 Inflasi

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah adalah dari nilai inflasi. Pada Maret 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jawa Barat sebesar 0,81 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,64. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Sukabumi sebesar 1,77 persen dengan IHK sebesar 108,30 sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,24 persen dengan IHK sebesar 105,64.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,51 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,16 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,76 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,72 persen; kelompok transportasi sebesar 1,05 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,70 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,58 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,13 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,46 persen. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 5,23 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,31 persen.

Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) Provinsi Jawa Barat bulan Maret 2025 sebesar 1,60 persen, sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,29 persen. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Maret 2025 secara umum menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Jawa Barat di 10 kabupaten/kota, pada Maret 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 0,81 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,78 pada Maret 2024 menjadi 107,64 pada Maret 2025. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 1,60 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,29 persen.

Inflasi Kota Sukabumi dipicu karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, diantaranya sambung kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,17 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,07 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,94 persen.

Kelompok kesehatan sebesar 4,42 persen. Kelompok transportasi sebesar 1,03 persen. Selain itu, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 4,56 persen. Kelompok pendidikan sebesar 4,46 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,62 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,04 persen. Inflasi tertinggi ada di kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,04 persen, dengan IHK sebesar 118,21. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, menunjukan pada bulan Maret 2025, menunjukan sebagian komoditas alami kenaikan harga. Diantaranya, cabai hijau, cabai rawit, telur ayam, bawang merah dan putih, daging sapi, kentang, bawang bombay, dan daging ayam. “Sebagian besar di bulan Maret 2025, sebagian komoditas terjadi lonjakan harga.

Tabel 3.2
IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Kota Sukabumi Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), April 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK April 2023	IHK Desember 2023	IHK April 2024	Tingkat Inflasi m-to-m April 2024 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d April 2024 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y April 2024 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m April 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y April 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	103,62	104,88	106,6	0,17	1,64	2,88	0,17	2,88
Makanan, Minuman, dan Tembakau	104,09	107,43	111,47	0,25	3,76	7,09	0,07	1,96
Pakaian dan Alas Kaki	102,72	103,98	104,89	0,2	0,88	2,11	0,01	0,12
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100,66	101,04	101,39	0	0,35	0,73	0,00	0,10
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,53	102,43	102,27	0,02	-0,16	0,73	0,00	0,06
Kesehatan	100,65	102,05	104,89	0	2,78	4,21	0,00	0,13
Transportasi	111,56	111,51	111,91	0,35	0,36	0,31	0,05	0,04
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,84	100,41	99,03	-1,62	-1,37	-1,79	-0,11	-0,12
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,54	103,28	105,75	-0,04	2,39	3,13	0,00	0,07
Pendidikan	100,96	100,99	101,05	0	0,06	0,09	0,00	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	103,04	103,41	104,9	0,35	1,44	1,81	0,04	0,19
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	103,15	104,95	109,46	1,9	4,3	6,12	0,11	0,34

Keterangan:

¹⁾ Persentase perubahan IHK April 2024 terhadap IHK Maret 2024.

²⁾ Persentase perubahan IHK April 2024 terhadap IHK Desember 2023.

³⁾ Persentase perubahan IHK April 2024 terhadap IHK April 2023.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,09 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,11 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,73 persen;

kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,73 persen; kelompok kesehatan sebesar 4,21 persen; kelompok transportasi sebesar 0,31 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,13 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,09 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,81 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,12 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada April 2024, antara lain: beras, emas perhiasan, sigaret kretek mesin (skm), daging ayam ras, sewa rumah, bawang merah, bawang putih, sigaret putih mesin (spm), telur ayam ras, nasi dengan lauk, pisang, popok bayi sekali pakai, tongkol diawetkan dan lainnya. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: laptop/notebook, bahan bakar rumah tangga, cabai rawit, minyak goreng, taman kanak-kanak, baju kaos tanpa kerah/t-shirt anak, bensin, tarif kendaraan travel, petai, dan lainnya. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada April 2024, antara lain: bawang merah, emas perhiasan, pisang, bakso siap santap, bawang putih, angkutan antar kota, tomat, daun bawang, dan lainnya. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: beras, telur ayam ras, laptop/notebook, pepaya, petai dan lainnya.

Pada April 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,96 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,12 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan

bakar rumah tangga sebesar 0,10 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,13 persen; kelompok transportasi sebesar 0,04 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,07 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,19 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,34 persen.

3.2.3 Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran. Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,19 persen dari 8,53 persen di tahun 2023 menjadi 8,34 persen di tahun 2024. Menurunnya TPT Kota Sukabumi tidak lepas dari aktivitas perekonomian yang makin menggeliat dan dibarengi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor tersier (perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa). Hal ini juga berkorelasi dengan makin banyaknya masyarakat Kota Sukabumi yang berusaha sendiri (status pekerjaan utama). Selama periode Januari hingga Oktober 2024, sekitar 4.000 pencari kerja berhasil ditempatkan melalui bursa kerja atau job fair, yang membantu mengurangi angka pengangguran.

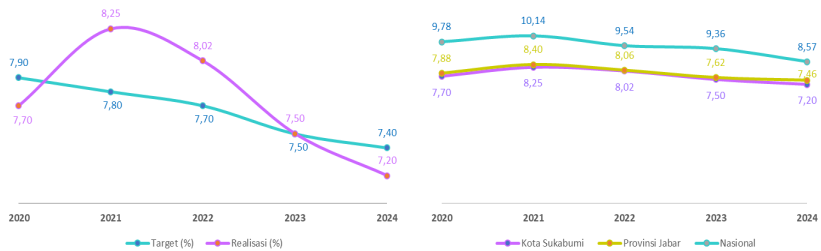
3.2.4 Kemiskinan

Penduduk miskin Kota Sukabumi tahun 2024 sekitar 24,10 ribu jiwa atau 7,20 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Kinerja Pemerintah Kota Sukabumi dalam menurunkan angka kemiskinan

cukup baik terutama di tahun 2024 karena realisasinya melebihi target yang ditetapkan.

Capaian penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2024 lebih baik jika dibandingkan tahun 2023. Adapun penurunan kemiskinan yang dicapai tersebut tidak lepas dengan geliat ekonomi yang terjadi pasca Covid-19. Penurunan kemiskinan di Kota Sukabumi tahun 2024 tersebut masih lebih baik jika dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Gambar 3.1
Angka Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Persen)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

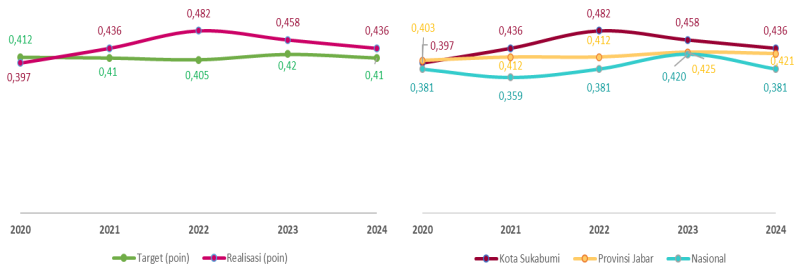
Kemiskinan di Kota Sukabumi perlu untuk terus dikurangi dengan meningkatkan akses masyarakat miskin ke pendidikan, kesehatan, dan layanan air bersih serta sanitasi. Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan juga perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, perlunya peningkatan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Jika hal-hal itu dilaksanakan secara tepat sasaran, penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi tentunya dapat mencapai hasil yang optimal.

3.2.5 Indeks Gini

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini Kota Sukabumi dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2020 merupakan pencapaian yang terbaik mengingat target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,412 tetapi Kota Sukabumi berhasil mencapai poin 0,397.

Meskipun LPE Kota Sukabumi tahun 2024 mencapai 5,11 persen, namun Indeks Gini berkurang secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta membawa pemerataan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kota Sukabumi tahun 2024 masih masuk dalam ketimpangan moderat (0,30 – 0,50), namun hal ini harus menjadi perhatian. Mengingat, ketimpangan yang tinggi menyimpan potensi terjadinya gesekan dan gejolak di masyarakat karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin jauh.

Gambar 3.2
Indeks Gini Kota Sukabumi Tahun 2020-2024 (Poin)



Sumber: Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2025 (diolah)

Indeks Gini Kota Sukabumi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa ketimpangan di Kota Sukabumi masih di atas Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Sukabumi masih menghadapi permasalahan seperti konsentrasi kekayaan yang hanya dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat, kesenjangan produktivitas tenaga kerja, akses ekonomi bagi masyarakat miskin masih terbatas, dan masyarakat masih mengalami kesenjangan dalam menghadapi situasi yang tak terduga seperti adanya Covid-19.

Selain mempertimbangkan proyeksi indikator di atas, beberapa asumsi-asumsi yang bisa dijadikan dasar bagi perencanaan Tahun 2025 Perubahan diantaranya adalah:

1. Inflasi yang diperkirakan terjaga;
2. Nilai tukar rupiah diperkirakan kembali stabil;
3. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli dan sebagainya;
4. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal tetapi memerlukan dukungan stimulus modal;
5. Aktivitas industri manufaktur, investasi dan pariwisata mulai bergerak (kapasitas produksi dan tenaga kerja) terkait penerapan protokol kesehatan pada lini produksi;
6. Proyek-proyek infrastruktur yang tertunda mulai berjalan kembali.

Selain kondisi capaian indikator makro Kota Sukabumi Tahun 2024 yang telah dijelaskan diatas, yang juga harus menjadi fokus kedepan adalah target indikator makro yang telah ditetapkan untuk tahun 2025. Target tersebut merupakan target yang bersifat top down dari Provinsi Jawa Barat dan tertuang pula dalam dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045.

Tabel 3.3
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Sukabumi Tahun 2025

NO	INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2024	2025 (Ranhir RPJMD)	2025 (P-RKPD)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,69	77,90	77,90
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,20	6,36 - 7,02	6,36 - 7,02
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,34	7,54 - 8,21	7,54 - 8,21
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,11	5,08 - 5,58	5,08 - 5,58
5	Indeks Gini/ Gini Rasio	Angka	0,436	0,432 - 0,439	0,432 - 0,439

Sumber: Bappeda

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan proyeksi ekonomi makro Semester II Tahun 2025 sebagai berikut:

1) Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Proyeksi Nilai IPM Kota Sukabumi Tahun 2025 berdasarkan target Ranhir RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 sebesar 77,90 yang juga sesuai dengan target yang disampaikan oleh Provinsi dan tertuang pula dalam dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045. Realisasi Tahun 2024 sebesar 77,69, untuk itu diperlukan berbagai upaya dalam mencapai target tersebut.

Pembangunan manusia di Kota Sukabumi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2013, status pembangunan manusia Kota Sukabumi meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”.

Selama 2020–2024 IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun, dari 75,06 pada tahun 2020 menjadi 77,69 pada tahun 2024. IPM Kota Sukabumi berada di atas IPM Jawa Barat dan Nasional sepanjang periode 2020 - 2024. Peningkatan IPM tahun 2024 IPM didukung oleh semua dimensi penyusunnya, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan maupun standar hidup layak.

Indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami akselerasi pertumbuhan di 2024, dari semula 11.999 di Tahun 2023 menjadi sebesar 12.252 pada Tahun 2024. Tiga indikator lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan di 2024 dibanding tahun sebelumnya. Umur Harapan Hidup (UHH) dari semula 74,89 naik menjadi 75,11, Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami sedikit kenaikan dari 13,60 menjadi 13,62, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dari 10,37 naik sedikit menjadi 10,38 di Tahun 2024.

Namun demikian, tentu kewaspadaan harus terus ditingkatkan terutama untuk sektor yang terkait dengan pencapaian IPM seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dari sisi pendidikan, dengan rencana akan dimulainya kembali pendidikan dengan tatap muka semoga juga menjadi pendorong peningkatan IPM dan dari sisi ekonomi perlu terus didorong peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan UMKM.

2) Proyeksi Persentase Penduduk Miskin

Salah satu permasalahan yang terus menjadi beban pemerintah dan menjadi salah satu faktor penghambat laju pembangunan manusia adalah kemiskinan. Dengan kemiskinan ini selalu dijadikan alasan sebagai penghambat masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar berupa pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain, oleh sebab itu maka penanggulangan kemiskinan perlu aksi dan upaya dari berbagai sektor yang berkaitan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Capaian persentase penduduk miskin tahun 2024 berdasarkan data BPS adalah sebesar 7,20 persen, sedangkan target Ranhir RPJMD pada tahun 2025 yang juga sama dengan target RPJPD sebesar 6,36 - 7,02 persen. Kemiskinan di Kota Sukabumi perlu untuk terus dikurangi dengan meningkatkan akses masyarakat miskin ke pendidikan, kesehatan, dan layanan air bersih serta sanitasi. Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan juga perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, perlunya peningkatan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Jika hal-hal itu dilaksanakan secara tepat sasaran, penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi tentunya dapat mencapai hasil yang optimal

3) Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Permasalahan ketenagakerjaan sangat berkorelasi erat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Dampak dari pandemi *Covid-19* pada sektor industri memengaruhi ketenagakerjaan (pekerja/buruh).

Sektor usaha yang memberlakukan kebijakan untuk merumahkan pekerja/buruh selama pandemi *Covid-19* adalah sektor industri, sektor akomodasi/restoran dan sektor usaha manufaktur. Sektor usaha yang merumahkan paling sedikit pekerja/buruh adalah industri elektronik dan kontruksi.

Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sukabumi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,19 persen dari 8,53 persen di tahun 2023 menjadi 8,34 persen di tahun 2024. Angka tersebut juga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,06 persen. Menurunnya TPT Kota Sukabumi tidak lepas dari aktivitas perekonomian yang makin menggeliat dan dibarengi dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor tersier (perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, dan jasa). Hal ini juga berkorelasi dengan makin banyaknya masyarakat Kota Sukabumi yang berusaha sendiri (status pekerjaan utama) yang mencapai 28,02 persen di tahun 2024.

4) Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sukabumi tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar 1,48 persen jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,49 persen. Kontraksi tersebut merupakan dampak dari pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi di tahun 2021 LPE kembali naik di angka 3,71 persen dan meningkat kembali menjadi 5,35 persen di tahun 2022. Keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah serta sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi.

Di tahun 2024, perekonomian Kota Sukabumi tetap tumbuh positif dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,11 persen. Meskipun sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,12 persen. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi masih berada dalam tren pertumbuhan ekonomi yang stabil. Meskipun memiliki luas wilayah yang kecil, keterbatasan sumber daya alam, serta jumlah lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan, Kota Sukabumi tetap menunjukkan kinerja ekonomi yang baik. Hal ini terlihat dari LPE Kota Sukabumi yang lebih tinggi dibanding LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2023 dan 2024.

Target LPE pada Ranhir RPJMD Kota Sukabumi untuk Tahun 2025 adalah sebesar 5,08 - 5,58 persen sama dengan target yang disampaikan Provinsi dan tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045.

5) Proyeksi Indeks Gini/ Gini Rasio

Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar terciptanya pemerataan pada tatanan pendapatan di masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh.

Indeks Gini Kota Sukabumi dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2020 merupakan pencapaian yang terbaik mengingat target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,412 tetapi Kota Sukabumi berhasil mencapai poin 0,397.

Meskipun LPE Kota Sukabumi tahun 2024 mencapai 5,11 persen, namun Indeks Gini berkurang secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta membawa pemerataan pendapatan masyarakat.

Indeks Gini Kota Sukabumi tahun 2024 masih masuk dalam ketimpangan moderat (0,30 – 0,50), namun hal ini harus menjadi perhatian. Mengingat, ketimpangan yang tinggi menyimpan potensi terjadinya gesekan dan gejolak di masyarakat karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin jauh.

Sesuai dokumen Ranhir RPJMD Kota Sukabumi, Target Rasio Gini Tahun 2025 sebesar 0,432 - 0,439, maka dengan melihat realisasi pada 2024 serta adanya arahan dari Provinsi maka dilakukan penyesuaian target pada perubahan RKPD Tahun 2025 ini yaitu menyesuaikan dengan target dalam Ranhir RPJMD dan Perda RPJPD.

Tingkat ketimpangan di Kota Sukabumi dengan karakter perkotaan, memperlihatkan bahwa tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh sumber mata pencaharian, dimana untuk wilayah perkotaan mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat heterogen yang pada umumnya penduduk perkotaan bekerja di sektor industri, perdagangan dan jasa. Berbeda dengan wilayah perdesaan yang sumber mata pencaharian penduduknya cenderung bersifat homogen dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian.

3.3 Kebijakan Umum Perubahan RKPD Tahun 2025

Berdasarkan dalam ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun

berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 11 Februari Tahun 2025, diamanahkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 paling lambat bulan Mei Tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut maka harus segera dilakukan proses perubahan RKPD Tahun 2025 dengan fokus utama menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan mengacu pada Rancangan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029.

Perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun 2025 dilakukan karena diperlukannya penyesuaian perolehan pendapatan daerah, penyesuaian alokasi belanja daerah, dan perubahan pada sisi sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA 2025. Selain itu terjadinya dinamika pada beberapa kegiatan yang memerlukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sesuai dengan peralihan peruntukan output program dan kegiatan.

Prioritas pembangunan pada Perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun 2025 akan disesuaikan dan mengacu pada RKPD dan Rancangan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, yang di dalamnya mencakup program-program prioritas dan kebijakan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan perhitungan SiLPA tahun 2024 yang masih dalam proses audit BPK RI, yang diperkirakan akan menghasilkan SiLPA tahun berjalan Positif, maka Pemerintah Kota Sukabumi akan memanfaatkannya untuk *program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas*

yang dibutuhkan, penambahan output sub kegiatan, penambahan volume output sub kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

3.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan RKPD Tahun 2025 pada hakekatnya adalah menyesuaikan belanja dengan pendapatan yang ada, dengan mempertimbangkan seluruh jenis pendapatan yang diterima baik berupa pendapatan asli daerah maupun berupa pendapatan transfer ataupun lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan;
2. Melakukan digitalisasi pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah;
4. Normalisasi pajak daerah, BUMD dan BLUD;
5. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah; serta meningkatkan kemampuan aparatur;
6. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

Proses perencanaan pendapatan daerah dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah diasumsikan naik pada seluruh komponen yaitu Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Deviden dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
3. Pendapatan Transfer diasumsikan naik secara keseluruhan walaupun kenaikannya cukup kecil. Kenaikan tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil yaitu adanya pendapatan kurang salur dari pemerintah pusat, dimasukkannya DAU untuk PPPPK serta masuknya anggaran Bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat. Namun demikian khusus untuk DAU mengalami penurunan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dimana Kota Sukabumi mengalami efisiensi DAU untuk bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp 7,059,545,000,-.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperhitungkan akan ada sedikit penurunan, karena adanya pengurangan dari SiLPA tahun anggaran 2024 bersumber kapitasi JKN.
5. Pendapatan daerah diasumsikan sebesar Rp. 1,327,972,181,036,- atau bertambah sebesar Rp. 56,322,012,986,- atau sekitar 4,43 persen dari pendapatan APBD murni dan sebesar 4,58 persen dibandingkan APBD parsial. Secara rinci asumsi pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar Rp.61,106,181,809,- atau sebesar 13,50 persen, dengan rincian:

- 1) Pajak Daerah diasumsikan bertambah sebesar Rp. 20,200,008,159,- atau 19,73 persen menjadi sebesar Rp. 122,582,045,838,-. Penambahan tersebut didapatkan terutama dari optimalisasi sumber PBBP2, PBJT listrik, PKB dan BBNKB;
 - 2) Retribusi Daerah diasumsikan bertambah sebesar Rp. 3,026,437,740,- atau 8,32 persen, hal tersebut berasal dari penambahan retribusi pelayanan kebersihan, jasa usaha serta perizinan persetujuan bangunan gedung;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berkurang sebesar Rp. -75,142,230,- atau sekitar -1,58 persen yang berasal dari pengurangan deviden BJB;
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bertambah sebesar Rp. 37,954,878,140,- atau sebesar 12,27 persen menjadi Rp. 347,267,575,925,-, yang berasal dari pengembalian hibah KUPD dan Bawaslu serta penambahan BLUD.
- b. Pendapatan Transfer berkurang sebesar Rp. 4,712,320,862,- atau sebesar 0,59 persen dibanding dengan APBD murni Tahun 2025. Secara rinci perubahan pendapatan transfer dapat dilihat pada rincian dibawah ini:
- 1) Dana perimbangan yang berasal dari komponen dana transfer pemerintah pusat berkurang sebesar Rp 2,383,541,564,- atau sebesar -0,32 persen, hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan DAU Bidang Pekerjaan Umum akibat adanya kebijakan efisiensi, adanya pengurangan pendapatan karena adanya SiLPA tahun 2024 di kas daerah bersumber DAK Non Fisik serta terdapat pula penambahan dari pendapatan DBH kurang salur.

- 2) Pendapatan transfer antar daerah berkurang sebesar Rp 2,328,779,298,- atau 4,82 persen, karena adanya pengurangan dana bagi hasil Provinsi sebesar Rp 4,747,773,778,- dan penambahan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 2,418,994,480,-
- c. Lain-Lain Pendapatan yang sah sebesar Rp 14,865,152,039,- atau berkurang sebesar Rp 71,847,961,- (0,48 %), disebabkan adanya pengurangan pendapatan bersumber Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dikarenakan adanya SILPA tahun 2024 yang menjadi pengurang target pendapatan.

Target/proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Kode	Uraian	APBD TA 2025	PERUBAHAN APBD TAHUN 2025 (Parsial)	PERUBAHAN RKPD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	452,802,605,328.00	452,802,605,328.00	513,908,787,137.00	61,106,181,809.00	13.50
4.1.01	Pajak Daerah	102,382,037,679.00	102,382,037,679.00	122,582,045,838.00	20,200,008,159.00	19.73
4.1.02	Retribusi Daerah	36,354,805,378.00	36,354,805,378.00	39,381,243,118.00	3,026,437,740.00	8.32
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,753,064,486.00	4,753,064,486.00	4,677,922,256.00	-75,142,230.00	-1.58
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	309,312,697,785.00	309,312,697,785.00	347,267,575,925.00	37,954,878,140.00	12.27
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	803,910,562,722.00	802,069,748,202.00	799,198,241,860.00	-4,712,320,862.00	-0.59
4.2.01	1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	755,592,824,000.00	752,104,625,000.00	753,209,282,436.00	-2,383,541,564.00	-0.32
	1.1. Dana Perimbangan	755,592,824,000.00	752,104,625,000.00	753,209,282,436.00	-2,383,541,564.00	-0.32
	1 2. Dana Insentif Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2.02	2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	48,317,738,722.00	49,965,123,202.00	45,988,959,424.00	-2,328,779,298.00	-4.82
	A. Dana Bagi Hasil	48,317,738,722.00	48,317,738,722.00	43,569,964,944.00	-4,747,773,778.00	-9.83

	B. Bantuan Keuangan	0	1,647,384,480.00	2,418,994,480.00	2,418,994,480.00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14,937,000,000.00	14,937,000,000.00	14,865,152,039.00	-71,847,961.00	-0.48
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1,271,650,168,050.00	1,269,809,353,530.00	1,327,972,181,036.00	56,322,012,986.00	4.43

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2025

3.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yaitu meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, serta lainnya sebagai pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu mencakup pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 maupun tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan belanja yang memenuhi azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan, maka penyusunan perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Nomor: KU.01.01.01/0613/IV/I/BAPPEDA/2025 tentang Penyusunan Usulan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 serta hal lainnya sesuai ketentuan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Dilakukan dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan Visi, Misi dan Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode Tahun 2025-2030, juga program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI;

2. Ditujukan dalam memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat, seperti gaji, tunjangan, honorarium, belanja jasa kantor listrik, air, telpon, internet, belanja premi asuransi, belanja sewa gedung, perlengkapan dan peralatan.
3. Mengakomodir kegiatan-kegiatan DAK Luncuran dan pengembalian sisa Bantuan Keuangan Provinsi tahun sebelumnya serta sumber anggaran lainnya sesuai ketentuan (SiLPA);
4. Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian target SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
5. Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan pencapaian target program unggulan dan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah;
6. Adanya kebijakan pusat dan provinsi yang mendasarinya;
7. Seluruh perubahan agar memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama waktu dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan hingga akhir tahun 2025.

Anggaran belanja daerah pada perubahan RKPD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 1,375,844,679,046,- bertambah sebesar Rp 81,995,137,919,- atau 6,34 persen dari pagu APBD murni Tahun 2025. Penambahan pagu belanja ini dikarenakan adanya penyesuaian dengan estimasi pendapatan yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya serta sudah mengakomodir SiLPA yang sudah ditetapkan.

Secara rinci target anggaran belanja pada perubahan RKPD Tahun 2025 terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

REK	STRUKTUR APBD	APBD TA 2025	PERUBAHAN APBD TAHUN 2025 (Parsial)	PERUBAHAN RKPD 2025	- / +	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
2	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Operasi	1,226,865,604,837.00	1,203,032,570,183.00	1,285,837,512,047.00	58,971,907,210.00	4.81
2.1.1	Belanja Pegawai	571,766,844,018.00	576,140,270,091.00	596,390,273,519.00	24,623,429,501.00	4.31
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	603,754,893,743.00	577,873,593,016.00	644,804,083,991.00	41,049,190,248.00	6.80
2.1.5	Belanja Hibah	51,010,367,076.00	48,685,207,076.00	44,309,654,537.00	-6,700,712,539.00	-13.14
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	333,500,000.00	333,500,000.00	333,500,000.00	0.00	0.00
2.2	Belanja Modal	55,592,340,972.00	77,878,801,056.00	85,627,512,022.00	30,035,171,050.00	54.03
2.2.0 1	Belanja Modal Tanah	0	0	718,950,000.00	718,950,000.00	
2.2.0 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,708,909,793.00	48,042,577,901.00	51,189,217,797.00	13,480,308,004.00	35.75

REK	STRUKTUR APBD	APBD TA 2025	PERUBAHAN APBD TAHUN 2025 (Parsial)	PERUBAHAN RKPD 2025	- / +	%
2.2.0 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,083,685,400.00	15,397,600,949.00	18,329,096,349.00	13,245,410,949.00	260.55
2.2.0 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10,065,217,549.00	11,706,093,976.00	13,006,093,976.00	2,940,876,427.00	29.22
2.2.0 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,734,528,230.00	2,732,528,230.00	2,024,153,900.00	-710,374,330.00	-25.98
2.2.0 6	Belanja Modal Aset Lainnya			360,000,000.00	360,000,000.00	
2.3	Belanja Tidak Terduga	11,391,595,318.00	11,097,355,368.00	4,379,654,977.00	7,011,940,341.00	-61.55
	JUMLAH BELANJA	1,293,849,541,127.00	1,292,008,726,607.00	1,375,844,679,046.00	81,995,137,919.00	6.34
	Total Surplus/(Defisit)	(22,199,373,077.00)	(22,199,373,077.00)	(47,872,498,010.00)	(25,673,124,933.00)	115.65

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2025

Dari data diatas dapat digambarkan bahwa terdapat perubahan uraian belanja secara keseluruhan, baik belanja operasi, belanja modal ataupun belanja tidak terduga sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai bertambah sebesar Rp 24,623,429,501,- atau sebesar 4.31 persen, hal tersebut untuk menutupi kekurangan gaji dan tunjangan PNS termasuk pemenuhan gaji CPNS dan PPPK;
- b. Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar Rp 41,049,190,248,- Atau sebesar 6,80 persen dipergunakan untuk operasional kantor serta pemenuhan program prioritas dan strategis lainnya;
- c. Belanja Hibah berkurang sebesar Rp 6,700,712,539,- atau -13,34 persen, yaitu adanya pengalihan belanja hibah program P2RW yang dilahkan ke program padat karya;
- d. Belanja Bantuan sosial tetap sebesar Rp 333,500,000,-;
- e. Belanja Modal Tanah bertambah sebesar Rp 718,950,000,- yaitu untuk pembelian tanah pemakaman;
- f. Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp 13,480,308,004,- atau sebesar 35.75 persen, yang terutama diperuntukan mendukung operasional kantor serta pemenuhan kebutuhan pelayanan publik;
- g. Belanja Modal Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp 13,245,410,949,- atau sebesar 260.55 persen, untuk pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor serta fasilitas pelayanan publik;
- h. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi bertambah sebesar Rp 2,940,876,427,- atau sebesar 29.22 persen, untuk mendukung pembangunan infrastruktur kewilayahan terutama jalan raya dan jalan lingkungan;
- i. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berkurang sebesar Rp 710,374,330,- atau sebesar -25.98 persen
- j. Belanja Modal Aset Lainnya bertambah sebesar Rp 360,000,000.-
- k. Belanja Tidak Terduga berkurang sebesar Rp 7,011,940,341,- yaitu adanya pengalihan untuk menutup defisit rencana belanja prioritas hasil verifikasi.

3.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan Anggaran adalah SiLPA hasil audit BPK Tahun 2024 sebesar Rp. 49,872,498,010,-. Adapun secara rinci SiLPA tahun 2024 tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Rekapitulasi SiLPA Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH SILPA 2024
I	SiLPA Bersumber TKD Pusat	2,362,993,254,-
1	DAU SG	401,228,215,-
2	DBH SG	312,555,837,-
3	DAK Fisik	200,000,-
4	DAK Non Fisik	1,227,041,724,-
5	Insentif Fiskal	421,967,478,-
II	SiLPA Bersumber Dana Lain	47,509,504,756,-
1	Bantuan Keuangan Provinsi	1,457,944,194,-
2	Kasda	20,293,733,113,-
3	BLUD	24,805,967,550,-
4	Kapitasi JKN	71,847,961,-
5	BOS	215,821,680,-
6	BOK Puskesmas	607,158,360,-
7	Kasdi Bendahara Penerimaan	57,031,898,-
	JUMLAH	49,872,498,010,-

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2025

Dari data diatas, SiLPA Tahun 2024 yang berasal dari TKD Pusat akan dianggarkan kembali sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan. SiLPA bersumber Dana lain juga akan dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian hanya SiLPA yang bersumber dari kas daerah saja yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menutup defisit yang terjadi akibat anggaran belanja yang lebih besar dari pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka kebijakan umum Pembiayaan Daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk SiLPA Tahun 2024 yang berasal dari TKD Pusat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bersumber DAU SG, DBH SG, DAK Fisik dan Insentif fiskal akan dibelanjakan kembali di Perangkat Daerah yang peruntukannya disesuaikan dengan juknis yang telah ditetapkan
 - b. Bersumber DAK Non Fisik akan menjadi pengurang pendapatan dana transfer untuk komponen DAK Non Fisik sesuai rincian SiLPA tersebut
2. Untuk SiLPA Tahun 2024 yang berasal dari dana lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bersumber Bankeu Provinsi akan dikembalikan kepada kas daerah Provinsi Jawa Barat
 - b. SiLPA BLUD RSUD R Syamsudin SH dan AL-Mulk, BLUD Puskesmas Selabatu, Jaminan Kesehatan Nasional, BOK Puskesmas dan Bos Pusat dianggarkan kembali dalam rencana belanja perubahan RKPD Tahun 2025 pada perangkat daerah berkenaan yaitu RSUD R Syamsudin SH, RSUD Al-Mulk, BLUD Puskesmas Selabatu, Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Untuk SiLPA Tahun 2024 yang berasal dari Kas Daerah setelah dikurangi SiLPA yang telah dianggarkan pada APBD murni maka akan dianggarkan kembali untuk pemenuhan belanja pegawai, prioritas pembangunan serta program lainnya sesuai kebutuhan.

Target/proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

REK	STRUKTUR APBD	APBD TA 2025	PERUBAHAN APBD TAHUN 2025 (Parsial)	PERUBAHAN RKPD 2025	- / +	%
1	2	3	4	5	6 = 5 - 3	7
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	24,199,373,077.00	24,199,373,077.00	49,872,498,010.00	25,673,124,933.00	106.09
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	24,199,373,077.00	24,199,373,077.00	49,872,498,010.00	25,673,124,933.00	106.09
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00
	Pembiayaan Neto	22,199,373,077.00	22,199,373,077.00	47,872,498,010.00	25,673,124,933.00	115.65
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2025

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 25.673,124,933,- yaitu berasal dari SiLPA hasil audit BPK. Pada APBD murni Tahun 2025 penerimaan pendapatan dianggarkan sebesar Rp 24,199,373,077,-, namun demikian ternyata SiLPA yang berasal dari kasda yang dapat dipergunakan untuk menutup pembiayaan yang sudah dianggarkan sebelumnya hanya sebesar Rp. 20,293,733,113,-. Berdasarkan hasil perhitungan SiLPA tersebut ternyata terdapat kekurangan atau defisit sehingga harus ditutupi dengan penambahan pendapatan yang sudah dimasukkan pada komponen pendapatan daerah.

Untuk pengeluaran pembiayaan tidak ada perubahan, yaitu sebesar Rp 2,000,000,000,- yaitu untuk penyertaan modal PDAM dan BPR. Setelah dibandingkan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan maka didapatkan angka pembiayaan netto sebesar Rp 47,872,498,010,-, angka tersebut sama dengan jumlah defisit pada belanja daerah sehingga SiLPA akhir adalah Rp 0 (nol rupiah).

3.3.4 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung implementasi pembangunan daerah terutama pada program prioritas dan unggulan, maka diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Karena besarnya kebutuhan anggaran tersebut dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan, maka Kota Sukabumi dituntut untuk senantiasa terus mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam rangka pembangunan daerah.

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kota Sukabumi dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kota Sukabumi. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan non APBN dan APBD antara lain adalah: 1) Dana Masyarakat/Umat; 2) Corporate Social Responsibility (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); 3) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 4) Pinjaman Daerah; dan 6) Hibah.

Berdasarkan kajian awal yang dilakukan Kota Sukabumi akan mencoba menjajaki melakukan mekanisme pembiayaan dengan pola

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Pinjaman Daerah sebagai berikut:

1) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Berdasarkan regulasi yang berlaku, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha. Saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang telah menyadari pentingnya kontribusi pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Pembiayaan daerah untuk infrastruktur masih banyak mengalami kendala karena adanya hambatan keterbatasan anggaran. APBD masih harus difokuskan pada pembiayaan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, penanganan bencana dan lain-lain. Pada konsisi ini maka skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) dapat menjadi salah satu solusi, di mana pemerintah, BUMD serta swasta bahu membahu untuk membiayai akselerasi pembangunan terus dengan prinsip gotong royong.

Pemerintah Kota Sukabumi sedang menyiapkan kajian dan persyaratan untuk mengusulkan skema pembiayaan KPBU. Nantinya apabila anggaran ini disetujui maka seluruh anggarannya akan dipergunakan untuk melaksanakan program prioritas “Sukabumi Kota Bercahaya” yaitu berupa pembangunan dan pengadaan penerangan jalan umum di seluruh pelosok wilayah Kota Sukabumi baik di lingkungan perkotaan maupun perkampungan. Dengan kondidi lingkungan yang sangat terang diharapkan akan mengurangi angka kejahatan serta yang penting adalah meningkatkan potensi pengembangan ekonomi bagi seluruh masyarakat, karena bertambahnya lokasi yang strategis dan memadai untuk dijadikan pusat berusaha.

2) Pinjaman Daerah

Selain melalui mekanisme KPBU, salah satu yang skema yang sedang diujai dalam proses pelaksanaan pembangunan adalah dengan melakukan pinjaman daerah kepada PT SMI. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 4 Pengertian tentang pinjaman daerah tersebut

digunakan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 pada prinsipnya diturunkan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.
- b) Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima). DSCR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{[\text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBH DR})] - \text{BW}}{\text{Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \geq 2,5$$

- c) Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.
- d) Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pinjaman daerah melalui PT SMI ini nantinya akan dipergunakan untuk melakukan pembiayaan bagi proyek infrastruktur di Kota Sukabumi yaitu pembangunan jalan kota maupun jalan lingkungan di seluruh wilayah Kota Sukabumi.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil atau *outcome* program Perangkat Daerah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut dikolaborasikan dengan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sehingga dapat mencapai visi yang telah ditentukan.

Visi pembangunan jangka menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah. Visi pembangunan jangka menengah Daerah menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan yaitu mulai Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka menengah harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah daerah difokuskan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan. Adapun visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Sukabumi adalah:

**“Mewujudkan Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri,
Agamis, dan Nasionalis”**

Penjelasan visi di atas adalah sebagai berikut:

1. Inovatif

Inovatif menekankan pentingnya kreativitas dan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Kondisi ini akan tergambar dengan:

- a. Terintegrasikannya teknologi terbaru dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. Diadopsinya metode baru untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat pelayanan;
- c. Berkembangnya ide-ide baru dari semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat untuk solusi yang lebih baik;
- d. Tersedianya pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam teknologi dan inovasi;
- e. Terciptanya lingkungan yang mendukung pengembangan produk, layanan, atau teknologi baru yang inovatif dan usaha kecil dengan berbagai akses ke sumber daya dan teknologi; dan
- f. Terjalinnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian dalam pengembangan solusi baru untuk masalah lokal.

2. Mandiri

Mandiri berfokus pada kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa terlalu bergantung pada pihak luar. Kondisi ini akan tergambar dengan:

- a. Meningkatnya kewirausahaan lokal dan ekonomi kreatif;
- b. Terkelolanya sumber daya alam dan manusia secara efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang tanpa mengandalkan bantuan eksternal;
- c. Tersedianya pelatihan keterampilan dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan memecahkan masalah secara mandiri; dan
- d. Terfasilitasnya masyarakat untuk mengatasi tantangan secara efektif tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal.

3. Agamis

Agamis berarti menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. Kondisi ini akan tergambar dengan:

- a. Disusunnya berbagai kebijakan yang sejalan dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat;
- b. Diterapkannya prinsip-prinsip etika dan moral yang diambil dari ajaran agama dalam tindakan dan keputusan pemerintah;
- c. Dijaminnya kebebasan beragama dan terjaganya kerukunan antar umat beragama;
- d. Terbangunnya dan terpeliharanya fasilitas ibadah serta terdukungnya kegiatan keagamaan yang positif; dan
- e. Berkembangnya perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dalam interaksi sosial dan pelayanan publik.

4. Nasionalis

Nasionalis berfokus pada cinta tanah air dan kepentingan nasional. Kondisi ini tergambar dengan:

- a. Ditematkannya kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
- b. Tergalangnya semangat persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyat untuk memperkuat identitas nasional;
- c. Dipertahankannya dan dipromosikannya budaya serta tradisi lokal yang merupakan bagian dari kekayaan nasional; dan
- d. Teredukasinya masyarakat tentang pentingnya Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Korelasi antara Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi dengan Visi Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 terletak pada masing-masing aspek yang saling melengkapi dan memperkuat. Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota “Mewujudkan Masyarakat yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis” mendukung pencapaian visi jangka panjang “Kota Sukabumi Kreatif, Unggul, Berbudaya, dan Berkelanjutan”. Dengan mempromosikan inovasi dan kreativitas, masyarakat diharapkan lebih siap untuk berkontribusi pada pengelolaan kota yang unggul. Kemandirian masyarakat memperkuat upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan.

Nilai-nilai agama yang sejalan dengan budaya lokal akan menciptakan harmoni sosial. Semangat nasionalis akan mendukung pelaksanaan kebijakan berkelanjutan dalam menjaga sumber daya untuk generasi mendatang. Karena itu, semua elemen ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan kota yang unggul dan sejahtera.

Dalam mewujudkan visi tersebut maka telah dirumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah atau dikenal dengan nama Misi. Terdapat lima Misi RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi bertujuan untuk mempersiapkan warga kota dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan mempromosikan kesempatan kerja yang lebih baik. Adapun peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga kota mendapatkan akses yang efektif, efisien, dan berkualitas terhadap layanan kesehatan.

2. Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum

Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan penuh rasa saling menghargai. Sikap saling menghargai dengan mempromosikan toleransi dan menghargai keberagaman yang ada di masyarakat tersebut akan memperkuat kohesi dan integrasi sosial. Hal ini didukung dengan upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum untuk menjaga kondusif kota dan juga untuk menjaga iklim investasi.

3. Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata

Pengembangan ekonomi kreatif bertujuan untuk memanfaatkan potensi kreativitas dan inovasi dalam menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing kota.

Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari pengembangan pariwisata yang lebih diarahkan pada industri MICE (*Meeting, Incentives, Conventions, Exhibitions*).

4. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik

Peningkatan kualitas lingkungan hidup ditujukan agar prinsip keberlanjutan menjadi arus utama dalam pembangunan mengingat ancaman degradasi lingkungan dan perubahan iklim semakin nyata terjadi. Sementara itu, pengembangan infrastruktur ditujukan agar masyarakat memiliki akses yang adil terhadap kebutuhan dasar serta peluang untuk pengembangan kehidupan yang lebih baik.

5. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas

Penguatan tata kelola pemerintahan ditujukan untuk memastikan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan didukung aparatur yang profesional, birokrasi yang transparan dan akuntabel, sistem pemerintahan berbasis digital, dan tata kelola yang inovatif.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 merupakan tahap pembangunan tahun pertama dari RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029. Perencanaan pembangunan Kota Sukabumi menggunakan pendekatan substansi perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (T-H-I-S), yang secara implementatif dilakukan melalui:

1. Menjaga kesinambungan melalui penyesuaian program prioritas pembangunan daerah dengan Visi, 5 (lima) Misi, 5 (lima) Tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029.
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas serta sasaran prioritas pembangunan Kota Sukabumi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow output priority program*) serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

3. Menjaga dan memastikan semua tahapan perencanaan dilalui dengan baik dan benar serta tepat waktu dengan mengimplementasikan SIPD serta sistem digital lainnya yang terintegrasi.
4. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, baik dari pusat, provinsi, Kota Sukabumi, serta dari unsur pemerintah maupun swasta dan masyarakat.
5. Melibatkan peran aktif seluruh *stakeholder* baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah seperti masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, komunitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Tujuan diturunkan dari Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi selama lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini yang merupakan hasil dari cascading Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi.

Adapun secara rinci tujuan, sasaran, outcome, indikator kinerja beserta targetnya sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELI NE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	
Visi: “Mewujudkan Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis” Misi: 1. Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia	77,69	77,90	78,31	78,75	79,22	79,68	80,14	
		Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata	■ Harapan Lama Sekolah ■ Rata-rata Lama Sekolah	13,62 10,38	13,63	13,68	13,73	13,78	13,84	13,89	
		Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas	Usia Harapan Hidup	75,11	75,31	75,52	75,73	75,94	76,15	76,36	
		Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota	Persentase angka kemiskinan	7,20	6,36-7,02	6,21-6,76	5,93-6,48	5,68-6,22	5,38-5,93	4,92-5,44	
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,34	7.54-8.21	7.25-7.92	7.24-7.91	7.20-7.87	7.18-7.85	7.13-7.80	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELI NE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	
2. Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum	Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, berbudaya, dan inklusif		Indeks Rasa Aman	75,40	77,43	77,98	78,53	79,08	79,63	80,18	
		Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran	Indeks Kerukunan Umat Beragama	78,16	79,00	79,27	79,55	79,82	80,09	80,36	
		Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya	Indeks Warisan Budaya	38,85	38,85	38,95	39,05	39,15	39,25	39,35	
		Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		60,46	61,76	63,06	64,36	64,55	66,25	
3. Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata	Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif		PDRB Per Kapita	44,76	45.29 - 45.65	50.38 - 51.35	49.78 - 51.53	51.93 - 54.73	54.05 - 58.2	56.12 - 62.33	
Meningkatnya ekonomi kreatif kota		Indeks Kota Kreatif	87,86	87,86	88,53	89,21	89,88	90,56	91,23		
5. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan		Berkembangnya industri pariwisata MICE	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi	3,26	3,29	3,36	3,44	3,53	3,61	3,70	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELI NE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	
publik berkualitas			dan Makan Minum								
		Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota	Indeks Ketahanan Pangan	69,94	72	74	76	78	80	82	
		Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota	Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	0	0	0	0	0	25	25	
		Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,47	3,5	5	7	9	13	18	
	Terwujudnya infrastruktur Kota Sukabumi yang berkualitas dan berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni	65,74	66, 75	67, 75	68, 75	69, 75	70, 75	72	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	87,37 (2023)	88, 37	88, 4	88, 43	88, 48	88, 53	88, 58	
		Meningkatnya resilensi kota terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	84,55 (2023)	92, 89	92, 86	92, 83	92, 8	92, 77	92, 74	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		dan perubahan iklim									
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	A-	A-	A	A	A+	A+	A+	
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,98	3,2	3,3	3,4	3,6	3,8	4	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota	Indeks Pelayanan Publik	4,18	4,25	4,5	4,6	4,7	4,8	5	
		Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	
		Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	76,36	78	80	81	82	83	84	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Tingkat Maturitas SPIP								
		Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi	Indeks Sistem Merit	77,69	77,90	78,31	78,75	79,22	79,68	80,14	

Sumber: Rancangan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029

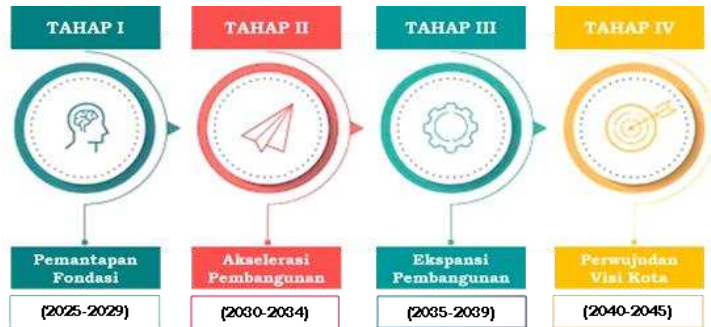
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dengan optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam menyusun strategi dan penahapan pembangunan, selain memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD harus dipedomani juga arah kebijakan dan fokus pentahapan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 terutama pada tahap pertama yaitu pemantapan pondasi.

Gambar 4.1

Pentahapan Pembangunan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2025-2045



Tahap pertama adalah pemantapan fondasi. Pemantapan fondasi ini merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan periode lalu dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal sebagai modalitas pembangunan ke depan. Fokus yang dilakukan pada tahap pertama seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.2
Fokus Pemantapan Pondasi (2025-2029)



Tema atau fokus pembangunan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahunan untuk perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan. Tema pembangunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 masih mengacu pada RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Hal ini adalah demi menjaga kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan. Adapun tema pembangunan Tahun 2025 adalah:

“Menguatkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan”

Tema di atas memiliki makna bahwa tahun 2025 merupakan tahun transisi kepemimpinan dimana kepala daerah hasil pilkada sudah diketahui. Situasi transisi ini perlu ditangani secara *smooth* dengan mengesampingkan perbedaan di saat kontestansi pilkada. Karena itu, pembangunan yang dilaksanakan harus lebih inklusif dan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Tema tersebut sejalan dengan tema RKPD Provinsi Jawa Barat yaitu **Pemerataan Pembangunan untuk mendukung Masyarakat Jawa Barat** serta telah selaras juga dengan tema RKP yaitu **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Pada prinsipnya ketiga tema tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan melalui upaya penciptaan kondusifitas serta percepatan pembangunan ekonomi sehingga dapat mencapai masyarakat yang mandiri, unggul dan sejahtera.

Dalam pelaksanaan tema diatas, maka harus disandingkan dengan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan daerah sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dilakukan analisis berdasarkan tujuan, sasaran dan isu strategis RPJMD, hasil evaluasi RKPD serta kebijakan Provinsi dan Nasional, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2
Penentuan Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi

Isu Strategis Aktual	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan
● Pengembangan SDM dan Ketrampilan Masyarakat Berbasis Vokasi ● Masyarakat Inklusif, Berbudaya, dan Religius ● Ekonomi Kreatif dan Perluasan Lapangan Kerja ● Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan ● Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	● Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter ● Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, berbudaya, dan inklusif ● Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif ● Terwujudnya infrastruktur Kota Sukabumi yang berkualitas	● Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata ● Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas ● Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota ● Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota ● Terwujudnya masyarakat kota	● Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) ● Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ● Penciptaan Lapangan Kerja ● Penataan Kota ● Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan

Isu Strategis Aktual	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan
	dan berkelanjutan ● Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif	yang agamis dan toleran ● Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya ● Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif ● Meningkatkan ekonomi kreatif kota ● Berkembangnya industri pariwisata MICE ● Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota ● Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota ● Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan ● Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota ● Meningkatkan resiliensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim ● Terwujudnya tata kelola pemerintahan	

Isu Strategis Aktual	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan
		kota berbasis digital ● Meningkatkan kualitas pelayanan publik kota ● Meningkatkan inovasi kota dalam pembangunan ● Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel ● Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi	

Sumber: Analisis Bappeda, 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka prioritas pembangunan Kota Sukabumi pada periode perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Salah satu kunci utama dalam melakukan pembangunan adalah ketersediaan sumber daya terutama anggaran. Maka opsi terbaiknya adalah melakukan optimalisasi peningkatan PAD melalui: Normalisasi dan optimalisasi pajak daerah, retribusi, BLUD dan BUMD.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Fokus pembangunan adalah demi kepentingan masyarakat, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama pembangunan khususnya untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting.

Adapun secara teknis prioritas ini akan dilaksanakan melalui: implementasi wakaf uang, dana bergulir/dana abadi, penguatan ekonomi kreatif termasuk UMKM, serta pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

3. Penciptaan Lapangan Kerja

Salah satu masalah besar di Kota Sukabumi selain ketimpangan adalah masih tingginya angka pengangguran, maka prioritas penciptaan lapangan kerja merupakan hal yang harus dilakukan. Program yang dapat dilakukan diantaranya melalui: pengembangan pendidikan vokasi serta pengiriman tenaga kerja luar negeri, kemitraan dengan industri dan pelaku ekonomi serta dukungan untuk pengusaha dan *start up*.

4. Penataan Kota

Sebuah kota yang indah adalah kota yang tertata dengan baik sehingga akan banyak kunjungan wisatawan untuk menikmati alam dan lingkungannya. Penataan kota merupakan hal yang harus terus menerus dilakukan dengan terlebih dahulu mempunyai perencanaan yang matang. Langkah yang akan dilakukan untuk penataan kota diantaranya melalui: perbaikan dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik, penanganan sampah, serta penerangan seluruh wilayah kota.

5. Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan

Salah satu pembangunan yang tidak boleh dilupakan adalah pembangunan nilai, mental dan budaya masyarakat. Maka penguatan nilai-nilai positif serta keterbukaan dalam semua proses pembangunan menjadi salah satu kunci yang harus dilakukan. Prioritas ini dapat dilakukan melalui penguatan nilai agama, sosial, dan budaya, toleransi dan keberagaman, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai tugas dan perannya serta kolaborasi pembangunan dengan semua stakeholder yang ada.

Selain prioritas pembangunan daerah, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran telah ditentukan juga program prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 yang disusun berdasarkan hasil cascading RPJMD yang dimulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Program prioritas pembangunan daerah menjadi pelaksanaan dari strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program prioritas pembangunan daerah disajikan berdasarkan tujuan, sasaran dan *outcome* dari RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029. Dengan sifat program prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya harus diutamakan.

Perumusan program prioritas bertujuan untuk menggambarkan rangkaian “kerja” yang dibutuhkan untuk mencapai “kinerja” tujuan dan sasaran pembangunan. Program prioritas tersebut dihasilkan melalui mekanisme *cascading* tujuan, sasaran, dan *outcome* pembangunan. Proses perumusan program prioritas melalui mekanisme *cascading* dinilai lebih logis dan lebih dapat menjaga kesinambungan tujuan dan sasaran dengan program prioritas yang dihasilkan.

Berdasarkan *cascading* yang dilakukan, program prioritas Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 terdiri dari 46 program. Program prioritas yang dihasilkan juga telah disesuaikan dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program prioritas Kota Sukabumi tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Program Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
Visi: “Mewujudkan Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis” Misi: 1. Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Terwujudnya SDM Kota Sukabumi yang unggul dan berkarakter			Indeks Pembangunan Manusia		
		Terwujudnya pendidikan masyarakat kota yang berkualitas dan merata		▪ Harapan Lama Sekolah ▪ Rata-rata Lama Sekolah		
			Meningkatnya akses dan mutu pendidikan masyarakat	• Tingkat Partisipasi Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini • Tingkat Partisipasi Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar • Tingkat Partisipasi Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikbud

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
2. Pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketenteraman serta ketertiban umum				• Tingkat Partisipasi Anak Usia 7 -18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan		
3. Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata			Meningkatnya literasi masyarakat	Persentase peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dispusipda
4. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik		Terwujudnya kesehatan masyarakat kota yang berkualitas		Usia Harapan Hidup		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	• Prevalensi Stunting • Persentase peningkatan Succes Rate TB • Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terstandar • Persentase pemenuhan perbekalan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Dinkes

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
5. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas				kesehatan pada faskes		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kelurahan dengan minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
		Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat kota		Persentase angka kemiskinan		
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja masyarakat kota		Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Kompetensinya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker
				Indeks Rasa Aman		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
	Terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang agamis, toleran, tentram, berbudaya, dan inklusif	Terwujudnya masyarakat kota yang agamis dan toleran		Indeks Kerukunan Umat Beragama		
			Meningkatnya kualitas masyarakat kota yang agamis	Persentase masyarakat yang mendapat manfaat program wakaf	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
			Meningkatnya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya	Persentase Konflik antar Inter Umat Beragama yang Diantisipasi	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kesbangp ol
		Terwujudnya Masyarakat Kota Sukabumi yang Tentram dan Tertib		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibumlinmas di Kota Sukabumi	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang terselesaikan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpolpp damkar

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
		Terwujudnya masyarakat kota yang berbudaya		Indeks Warisan Budaya		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Disdikbud
		Terwujudnya masyarakat kota yang inklusif		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Daldukkb p3a
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Daldukkb p3a

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak	Dinas Daldukkb p3a
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disporapar
				PDRB Per Kapita		
	Terwujudnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Meningkatnya ekonomi kreatif kota		Indeks Kota Kreatif		
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disporapar
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UKM Menjalinkan Kemitraan	Program Pengembangan UMKM	Diskumin dag
				Rasio PDRB Penyediaan		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
		Berkembangnya industri pariwisata MICE		Akomodasi dan Makan Minum		Disporapar
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
		Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pangan masyarakat kota		Indeks Ketahanan Pangan		
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKP3
			Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKP3
		Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru kota		Rasio Terbentuknya Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru		
			Meningkatnya investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim	DPMPTSP

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
		Terwujudnya kemandirian kota dalam pengelolaan keuangan		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penanaman Modal	
			Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD
	Terwujudnya infrastruktur Kota Sukabumi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup kota		Indeks Kota Layak Huni		
				Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		
			Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUTR
			Meningkatnya pelayanan sarana transportasi darat	persentase layanan BRT	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dishub
			Meningkatnya kualitas	Persentase jumlah rumah tangga yang	Program Penge-lolaan	DPUTR

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
			pengelolaan dan penyediaan sistem air minum	mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	dan Pengembangan Sistem Pnyediaan Air Minum	
			Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangan	Program Pengembangan Permukiman	DPUTR
			Meningkatnya kualitas ruang publik	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penat aan Bangunan dan Lingkungannya	DPUTR
			Meningkatnya kualitas layanan Sumber daya air	Persentase Peningakatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Program Penge lolaan Sumber Daya A ir (SDA)	DPUTR
			Meningkatnya kualitas layanan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
			Meningkatnya kualitas layanan air limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Air Limbah	Program Penge lolaan dan Pengemba	DPUTR

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
		Meningkatnya resilensi kota terhadap bencana dan perubahan iklim		Domestik Layak dan Aman	ngan Sistem Air Limbah	
				Indeks Risiko Bencana		
			Meningkatnya ketahanan bencana Daerah	Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran sesuai standar pelayanan	Program penanganan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpolppd amkar
			Meningkatnya pengurangan emisi GRK	Emisi Co2 Equivalen	Program Pendalian Pencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan Hidup	DLH
	Terwujudnya tata kelola			Indeks Reformasi Birokrasi		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
	pemerintahan Kota Sukabumi yang adaptif dan inovatif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kota berbasis digital		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
			Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
			Meningkatnya efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dokumen	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Program Pengelolaan Arsip	Dispusipda
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kota		● Indeks Pelayanan Publik ● Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota		
			Meningkatnya kualitas implementasi reformasi	IPP Setda	Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah	Setda

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
			birokrasi dan pelayanan publik		Kabupaten/Kota	
			Meningkatkan kualitas peraturan daerah yang ditetapkan	Persentase Prolegda yang Ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Setwan
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Indeks tata kelola pengadaan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Setda
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
			Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
		Meningkatnya inovasi kota dalam pembangunan		Indeks Inovasi Daerah		
			Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Persentase PD yang Menerapkan Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
		Terwujudnya birokrasi pemerintahan kota yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi General (IRB General) Kota Sukabumi		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	● Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD ● Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengukuran IRB PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Setda
			Meningkatnya	Nilai Laporan Keuangan	Program Pengelolaan	BPKPD

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PD
			pengelolaan keuangan dan barang milik daerah		Keuangan Daerah	
			Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Persentase rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Terwujudnya ASN kota yang berintegritas, netral dan berkinerja tinggi		Indeks Sistem Merit		
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Nilai Aspek Pengembangan Karir	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM

Sumber: Rancangan RPJMD Kota Sukabumi 2025-2029

Prioritas pembangunan dan program prioritas ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025 dengan isu strategis pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan dan Program
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Pengembangan SDM dan Ketrampilan Masyarakat Berbasis Vokasi	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penciptaan Lapangan Kerja	1) Program Pengelolaan Pendidikan 2) Program Pembinaan Perpustakaan 3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 6) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 7) Program Penempatan Tenaga Kerja
2	Masyarakat Inklusif, Berbudaya, dan Religius	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan	1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 3) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4) Program Pengembangan Kebudayaan 5) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 6) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 7) Program Pemenuhan Hak Anak 8) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
3	Ekonomi Kreatif dan Perluasan Lapangan Kerja	Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Penciptaan Lapangan Kerja	1) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 2) Program Pengembangan UMKM 3) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 4) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 5) Program Pengawasan Keamanan Pangan 6) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 7) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	Lingkungan dan Infrastruktur Perkotaan	Penataan Kota	1) Program Penyelenggaraan Jalan 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4) Program Pengembangan Permukiman 5) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 7) Program Pengelolaan Persampahan 8) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 9) Program Penanggulangan Bencana 10) Program pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 11) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
5	Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan	1) Program Aplikasi Informatika 2) Program Pengelolaan Arsip 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah 4) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 5) Program Perekonomian dan Pembangunan 6) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 7) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 8) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 9) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 11) Program Pengelolaan Keuangan Daerah 12) Program Penyelenggaraan Pengawasan 13) Program Kepegawaian Daerah

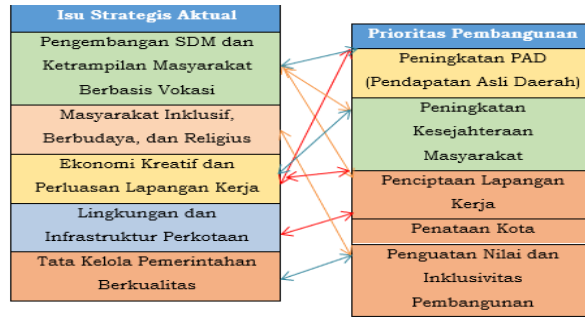
Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka apabila kita sandingkan antara isu strategis, prioritas pembangunan dan program prioritas terdapat keterkaitan yang sangat erat. Isu strategis yang selanjutnya menjadi prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dapat kita petakan diakomodir pada program prioritas yang mana, sehingga kita dapat memastikan bahwa isu strategis dan prioritas pembangunan yang bermula dari berbagai permasalahan dan kondisi terkini Kota Sukabumi dapat diselesaikan melalui berbagai program prioritas yang akan dijalankan pada Tahun 2025.

Apabila kita gambarkan lebih detail, maka keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.3

Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi (diolah)

Pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025 – 2029. Pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang ada di seluruh perangkat daerah juga melalui program prioritas pembangunan serta program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi.

Adapun program unggulan yang akan di implementasikan pada tahun 2025 ini serta selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

A. Misi 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keterampilan Masyarakat Berbasis Vokasi serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1. Beasiswa Sarjana (Berbasis Kewilayahan dan Disabilitas)

Pemberian beasiswa dilakukan untuk dua kategori yaitu:

1) Berbasis Kewilayahan

Penerima beasiswa akan diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan unsur keadilan dari sisi asal wilayah penerima. Dalam implementasinya akan melibatkan pihak yang berwenang serta aparatur wilayah yang sangat memahami kondisi lapangan.

2) Kategori Disabilitas

Salah satu hal yang mungkin menjadi kendala bagi sahabat disabilitas adalah akses terhadap pendidikan. Banyak individu disabilitas yang memiliki potensi besar, namun terhalang oleh keterbatasan aksesibilitas dan sumber daya yang memadai untuk melanjutkan pendidikan. Dalam implementasinya, pemberian beasiswa ini akan melibatkan pihak terkait yang berwenang seperti: Disabilitas Group Planner, Institusi pendidikan luar biasa serta komunitas atau organisasi yang konsen terhadap sahabat disabilitas. Hal tersebut untuk lebih memastikan bahwa pemberian beasiswa dapat tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat kepada sahabat disabilitas.

2. Pendidikan Vokasi melalui Optimalisasi BLK

Optimalisasi BLK dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam jangka panjang, optimalisasi BLK dapat membantu meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan memiliki sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya dan menjadi lebih mandiri.

3. Peningkatan Puskesmas (Layanan Puskesmas Gratis, *Homecare*, *Ambulance*)

Program unggulan peningkatan Puskesmas hadir untuk terus memastikan pentingnya keberadaan Puskesmas serta senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas. Kondisi saat ini, masih ada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, maka ketika mereka ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar memerlukan pembiayaan. Kedepan pemerintah harus hadir dalam memastikan warga Kota Sukabumi dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa biaya walaupun belum memiliki jaminan kesehatan, dengan catatan masyarakat tersebut

dijadikan prioritas untuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Sukabumi.

Selain itu melalui program unggulan ini pemerintah daerah juga harus bisa memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat diakses oleh masyarakat yang punya keterbatasan datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan *home care* serta *ambulance*. Melalui program ini petugas kesehatan akan hadir langsung ke setiap rumah masyarakat yang membutuhkan serta apabila memerlukan rujukan dapat langsung difasilitasi oleh pelayanan Ambulance.

4. Posyandu Ayeuna (Operasional Posyandu)

Posyandu menyediakan berbagai layanan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan penanganan penyakit ringan. Namun, untuk menjalankan operasional posyandu, diperlukan anggaran yang memadai. Anggaran operasional posyandu digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, seperti pembelian obat-obatan, peralatan kesehatan, dan biaya operasional lainnya.

B. Misi 2: Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial, Budaya dan Memperkuat Toleransi, Ketentraman serta Ketertiban Umum

1. Sukabumi Kota Wakaf

Program unggulan yaitu “Sukabumi Kota Wakaf” adalah suatu konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan kota, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dalam rangka menjadikan Kota Sukabumi sebagai Kota Wakaf, maka pemerintah daerah haruslah melakukan berbagai langkah dalam menuju cita-cita tersebut. Salah satu yang akan dilakukan adalah melalui program Gerakan Wakaf Uang, dimana seluruh lapisan masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara dan dunia usaha dihimbau untuk melakukan wakaf uang secara rutin dalam kurun waktu tertentu.

Gerakan wakaf uang inilah yang nanti akan menjadi salah satu prasyarat utama dalam menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf.

Pengelolaan wakaf uang nantinya akan dilakukan oleh sebuah lembaga Nazhir Wakaf yang kredibel yang direkomendasikan oleh lembaga resmi seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selanjutnya pemerintah daerah akan menghimbau seluruh lapisan masyarakat terutama para aparatur untuk mengikuti gerakan wakaf uang ini yang selanjutnya Nazhir Wakaf akan melakukan pengelolaan yang pada akhirnya hasil dari pengelolaan tersebut akan kembali kepada masyarakat Kota Sukabumi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pembangunan (Insentif Marbot, Guru Ngaji, RW, RT, Linmas, Karang Taruna)

Pemberian insentif ini dilakukan setiap bulan, dengan catatan unsur masyarakat tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membantu pemerintah sesuai bidangnya dan berdasarkan arahan atau ketentuan yang akan disampaikan dalam sebuah regulasi khusus. Sebagai salah satu contoh adalah keterlibatan para RT dan RW dalam mendukung program strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi.

3. Pusat Konseling Keluarga Ayeuna (Ponsel Ayeuna) (Konseling Ibu, Ayah, Anak, Remaja)

Pusat Konseling Keluarga Ayeuna merupakan sebuah program unggulan yang memfokuskan pada ketahanan keluarga dengan memberikan konsultasi gratis serta solusi-solusi bagi permasalahan keluarga untuk penduduk Kota Sukabumi. Melalui Pusat Konseling Keluarga Ayeuna, diharapkan dapat berperan penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan keluarga. Keberadaan pusat konseling keluarga ayeuna ini diharapkan memiliki dampak positif pada masyarakat. Dengan adanya pusat konseling keluarga ayeuna, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih mudah ke layanan konseling dan penanganan masalah

keluarga. Hal ini dapat membantu mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga, konflik keluarga, dan gangguan mental. Selain itu, keberadaan pusat konseling keluarga juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara luas.

4. Pemuda Berdaya (optimalisasi peran dan anggaran kepemudaan)

Program unggulan pemuda berdaya sangat relevan untuk mendukung peningkatan peran pemuda dalam pembangunan. Melalui program ini pemerintah daerah akan memberikan kesempatan kepada para pemuda di semua sektor untuk dapat berperan lebih besar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Melalui program unggulan ini pemerintah daerah akan memberikan kesempatan kepada pemuda seperti dalam hal menyusun sendiri perencanaan pembangunan versi pemuda yang fokus kepada peningkatan peran dan kualitas pemuda itu sendiri, selain itu peningkatan kualitas dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk sektor-sektor strategis bidang kepemudaan juga akan semakin diperhatikan. Dalam implementasinya akan pemerintah daerah akan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga yang menampung para pemuda didalamnya.

C. Misi 3: Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

1. Menata Kebaikan Tech

Melalui program ini masyarakat atau komunitas yang mempunyai produk unggulan dan memerlukan pemasaran lebih jauh dapat dibantu untuk lebih diperkenalkan kepada masyarakat luas baik Kota Sukabumi maupun diluar Kota Sukabumi.

Selain itu program-program unggulan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta program-program prioritas lainnya di setiap Perangkat daerah ataupun dari lembaga lain dapat juga diperkenalkan melalui program ini, sehingga dapat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat dan pada akhirnya akan lebih banyak masyarakat yang menerima manfaat dari berbagai program tersebut.

2. Dana Bergulir (Dana Abadi)

Merupakan sebuah program yang menyiapkan dana untuk modal usaha masyarakat yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat atau lembaga lain yang kredibel sesuai peraturan perundang-undangan, yang disediakan di setiap Rukun Tetangga (RT) yang ada di Kota Sukabumi.

Dana yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp. 10 juta per RT yang nantinya akan difokuskan untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan dengan adanya pembatasan jumlah pinjaman. Selanjutnya dana ini akan dikembalikan secara bertahap dan tidak memberatkan dari masyarakat yang melakukan pinjaman kepada kelompok swadaya masyarakat atau lembaga lain yang kredibel sesuai peraturan perundang-undangan yang ditunjuk sebagai pengelola.

Dengan demikian dana ini akan tetap ada atau kembali utuh seperti semula yang selanjutnya dapat dijadikan modal bergulir kembali oleh masyarakat yang lainnya. Dalam lima tahun program ini berjalan, sangat memungkinkan jumlah pinjaman kedepannya akan bisa menjadi lebih banyak dari pinjaman awal yang diberikan.

D. Misi 4: Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Publik

1. Infrastruktur Ayeuna (Stadion Bertaraf Nasional dan Infrastruktur Publik lainnya)

Infrastruktur utama yang harus jadi prioritas adalah yang berhubungan dengan kepentingan atau kebutuhan publik. Salah satunya adalah infrastruktur dalam mendukung kegiatan olahraga masyarakat. Selain itu, Kota Sukabumi sebagai salah satu kota berkembang di Jawa Barat, ternyata memiliki potensi besar dalam bidang olahraga. Banyak atlet berbakat yang lahir dan berkembang di kota ini, dan hampir semua cabang olahraga juga ada di Kota Sukabumi.

Namun demikian kondisi hari fasilitas olahraga yang memadai dan memenuhi standar nasional masih sangat terbatas.

Salah satunya adalah Stadion yang merupakan sebuah ikon dari pusat kegiatan olahraga di suatu wilayah. Oleh karena itu, maka pembangunan sebuah stadion olahraga berstandar nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung perkembangan dunia olahraga, serta mengakomodir kebutuhan infrastruktur pelayanan publik di Kota Sukabumi.

Program unggulan Infrastruktur Ayeuna melalui implementasi pembangunan stadion olahraga berstandar nasional bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi perkembangan olahraga, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Dalam implementasinya pembiayaan program infrastruktur ini akan menggunakan berbagai pendekatan pembiayaan mulai dari PAD, dana transfer, investor, CSR serta dari berbagai sumber lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Layanan Ambulans Jenazah

Program unggulan Layanan Ambulans Jenazah hadir dalam rangka memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui program ini masyarakat bisa mengakses layanan ambulans tanpa biaya dengan hanya menyampaikan permohonan kepada lembaga yang diberikan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaannya.

Selain itu, layanan ini sangat membantu keluarga yang mungkin tidak memiliki akses kendaraan yang memadai untuk membawa jenazah. Terlebih lagi, dalam kasus tertentu seperti kecelakaan, pemulangan jenazah dari luar kota, atau kondisi medis tertentu, ambulans jenazah menjadi solusi yang sangat dibutuhkan.

E. Misi 5: Penguatan Tata Kelola Pemerintah untuk Pelayanan Publik Berkualitas

1. Sukabumi Menyala (Layanan Publik Terintegrasi)

Menyatukan semua layanan publik dalam satu portal yang terintegrasi merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi

kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses semua layanan publik yang dibutuhkan dalam satu tempat, tanpa harus mengunjungi beberapa tempat yang berbeda.

2. NGOPI (Ngobrol Happy bareng Wali Kota)

Wali Kota dan Wakil Wali Kota dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk selanjutnya bekerja melaksanakan janji politik yang sudah disampaikan. Setelah dilantik maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi milik masyarakat dan bertugas untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk itu maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus mendengar secara langsung masukan, pendapat, keluhan dan permasalahan langsung dari masyarakat sehingga program kerja yang dilaksanakannya dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam mengakomodir kebutuhan tersebut, maka program unggulan NGOPI (Ngobrol Happy bareng Wali Kota dan Wakil Wali Kota) hadir sebagai jembatan komunikasi antar masyarakat dengan pemimpinnya. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan berbasis kewilayahan serta juga dapat dilakukan dengan berbasiskan tematik tertentu.

Dalam menentukan prioritas pembangunan supaya sesuai dengan situasi dan kondisi terkini di lapangan, maka harus melakukan berbagai sinkronisasi dengan berbagai kepentingan diantaranya adalah pokok-pokok pikiran DPRD. Keterkaitan prioritas pembangunan dengan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan
Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	● Dalam pelaksanaan kegiatan yang besumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota harus bersinergi. ● Mengamankan aset-aset milik Pemerintah Kota. ● Melaksanakan evaluasi dan monitoring di sektor PAD. ● Kajian potensi riil PAD dan peningkatan implementasi dari hasil kajian tersebut secara transparan yang dilakukan oleh tim independen. ● Sistem Pendapatan dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran diupayakan secara <i>online</i>. ● Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi apabila regulasi tentang penghapusan PBB dan BPHTB jadi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Evaluasi dan laporan hasil PAD dan penggunaan secara periodik (per Triwulan) kepada DPRD
2	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	● Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara membangun rusunami, Rusunawa, Rumah murah bersubsidi. ● Penyelesaian pembayaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bagi warga yang tidak mampu; ● Peningkatan pelayanan bidang pendidikan termasuk penambahan ruang kelas baru, penambahan kuota bantuan bagi pelajar SMA/SMK, beasiswa bagi mahasiswa, peningkatan sarana prasarana SLB dan pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU); ● Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, khususnya olahan pangan masyarakat.
3	Penciptaan Lapangan Kerja	● Mengadakan Pembinaan dan pelatihan bagi para penyandang cacat Berbasis potensi/kebutuhan ● Menginformasikan setiap ada Lowongan Pekerjaan (Loker) kepada Masyarakat. ● Mengadakan pelatihan keterampilan dalam rangka stimulasi pertumbuhan UMKM di Kota Sukabumi. ● Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi dan UMKM

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		● Mempermudah regulasi/aturan untuk menarik investor di Kota Sukabumi ● Pemberdayaan potensi pariwisata lokal khususnya di kelurahan-kelurahan ● Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri ● Promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri ● Pengembangan SDM dan profesionalisme pariwisata. ● Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
4	Penataan Kota	● Meningkatkan pemeliharaan jalan kota dan jalan lingkungan secara merata, baik berupa pavingisasi, betonisasi dan pengaspalan. ● Pendataan RTLH serta penaggulangan nya ● Pembangunan jalan baru, perbaikan/perawatan jalan yang ada dan pembangunan jalan untuk lokasi perbatasan yang sulit dijangkau; ● Segera merealisasikan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan dengan pola <i>typing fee</i>.
5	Penguatan Nilai dan Inklusivitas Pembangunan	● Meningkatkan kerukunan hidup beragama ● Meningkatkan peran lembaga/ <i>stake holders</i> dalam rangka mengantisipasi/mengatasi gejolak dalam kehidupan kerukunan umat beragama ● Menjaga kondusifitas antar partai politik di Kota Sukabumi. ● Mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah agar dalam perencanaan pembangunan lebih akurat/tidak berubah-ubah, dan dapat terintegrasi antara Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. ● Dalam melakukan perencanaan memperhatikan prinsip partisipasi, kesinambungan dan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Untuk perencanaan pembangunan Kota Sukabumi agar memperhatikan keseimbangan wilayah.

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2024

RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan 5 (lima) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan (i) Gender dan Inklusi Sosial, (ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (iii) Transformasi Digital, (iv) Pembangunan Rendah Karbon, dan (v) Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah, serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh *non state actors*.

Untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan pengarusutamaan di atas, Pemerintah Kota Sukabumi telah mensinkronkan program-program pembangunan daerah Tahun 2025 untuk pencapaian target tersebut. Berikut program-program pembangunan tersebut.

Tabel 4.5
Perbandingan Program Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2025
dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (Mainstreaming)
Pembangunan Nasional Tahun 2025

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Tujuan 1 TANPA KEMISKINAN	
• Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. • Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Keluarga Sejahtera (Ks) 5. Program Pengendalian Penduduk 6. Program Pengelolaan Pendidikan 7. Program Pengelolaan Pendidikan 8. Program Pencatatan Sipil
Tujuan 2 TANPA KELAPARAN	
- Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. - Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. - Target 2.3 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	
- Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. - Target 3.3. pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. • Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. • Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan. • Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. • Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. • Target 3.a.1* Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. • Target 3.b.1(a) Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan	3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 7. Program Pencatatan Sipil

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
hususnya, menyediakan akses obat bagi semua. Target 3.c.1* Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil	
Tujuan 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	
- Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. - Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. - Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. - Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan Global - Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Tujuan 5 KESETARAAN GENDER	
• Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. • Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. • Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. • Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. • Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut. • Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Tujuan 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	
• Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua • Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
husus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. • Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. • Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. • Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	
• Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	
• Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. • Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
• Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. • Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. • Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. • Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	
Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	
• Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. • Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	
- Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. - Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya. - Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	
Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) 2. Program Penanggulangan Bencana
Tujuan 12 Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	
Target 12.4 ada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang	1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. • Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. • Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. • Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 2. Program Pengelolaan Persampahan
Tujuan 14 Ekosistem Lautan	
• Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. • Target 14.6 Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Tujuan 16 PERDAMAIAN Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	
• Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. • Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. • Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. • Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. • Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. • Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. • Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. • Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Perekonomian Dan Pembangunan 3. Program Kepegawaian Daerah 4. Program Pencatatan Sipil
Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	
• Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. • Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap	1. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. • Target 17.8 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. • Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. • Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. • Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di BAB II serta di sinkronkan dengan kondisi keuangan dan kebijakan belanja yang sudah ditetapkan pada Bab III, maka beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan gaji dan tunjangan untuk PNS, P3K, THL dan TKS di beberapa Perangkat Daerah sesuai hasil perhitungan atau prognosis bulan April Tahun 2025;
- 2) Pemenuhan kebutuhan untuk pencapaian IKU Kepala Daerah di beberapa Perangkat Daerah;
- 3) Pemenuhan kebutuhan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama di Dinas Pendidikan, Kesehatan, PUTR, dan Sosial;
- 4) Pemenuhan beberapa program prioritas daerah;
- 5) Pemenuhan kebutuhan dalam mendukung program Nasional dan Provinsi seperti: PBI JKN di Dinas Kesehatan, dan Stunting;
- 6) Pemenuhan untuk mendukung Indikator Kinerja yang belum tercapai di beberapa Perangkat Daerah terutama yang merupakan Indikator PK dari Perangkat Daerah;
- 7) Pemenuhan untuk kegiatan penunjang seperti belanja operasional kegiatan di Perangkat Daerah.

Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah serta antar pusat dan daerah, maka prioritas pembangunan Kota Sukabumi harus diselaraskan dengan prioritas provinsi dan nasional. Prioritas pembangunan Kota Sukabumi selanjutnya diterjemahkan ke dalam program prioritas pembangunan, serta dijabarkan kembali melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagaimana tercantum lampiran perubahan RKPDP Kota Sukabumi Tahun 2025.

Prioritas Nasional (PN) pada Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 8 (delapan) prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional tersebut, maka telah dilakukan pemetaan pencapaian prioritas nasional berdasarkan

program perencanaan pembangunan yang bisa mendukung pencapaiannya. Lebih jelas pemetaan tersebut sebagaimana yang tercantum pada tabel 4.6 dibawah ini. Selain itu Provinsi Jawa Barat jugatelah menetapkan prioritas pembangunan melalui sembilan langkah yang telah dilakukan sinkronisasi melalui implementasi program di beberapa perangkat daerah terkait sebagaimana padatabel 4.7.

Tabel 4.6
Sinkronisasi Program Prioritas dengan Prioritas Pembangunan Nasional

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
KEGIATAN PRIORITAS UTAMA					
PN 1					
Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Outcome: Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	427,685.000	Diskominfo
PN 2					
Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan KSPPI/Lumbung Pangan Lainnya)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Outcome: Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	920.181.100,00	DKP3
Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Outcome: Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.268.600.600,00	DKP3

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Outcome: Meningkatnya kualitas layanan irigasi	Indeks kualitas layanan irigasi	2.783.411.983,00	DPUTR
Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Outcome: Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyediaan sistem air minum	Indeks kualitas layanan air bersih	5.669.075.250,00	DPUTR
Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Outcome: Meningkatnya kualitas layanan air limbah	Indeks Kualitas Layanan Air Limbah	3.311.466.400,00	DPUTR
Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Outcome: Meningkatnya kualitas layanan persampahan	Indeks Kualita Layanan Persampahan	2.445.901.370,00	DLH
Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Outcome: Meningkatnya penggunaan aplikasi	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang	239.799.500,00	Diskominfo

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
		informatika di pemerintahan	Digunakan dalam Pemerintahan		
Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Outcome: Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	50.963.000,00	Disporapar
PN 3					
Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Outcome: Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	239.799.500,00	Diskominfo
Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak	Outcome: Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	50.963.000,00	Disporapar

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
	Kekayaan Intelektual				
Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Outcome: Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	931.743.000,00	Diskumindag
PN 4					
Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Outcome: Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan bagi masyarakat	1. Tingkat Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Anak Usia Dini 2. Tingkat Partisipasi anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 3. Tingkat Partisipasi anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah	78.862.529.910,00	Disdikbud

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
			Menengah Pertama 4. Tingkat Partisipasi Anak Usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Outcome: Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan bagi masyarakat	1. Tingkat Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Anak Usia Dini 2. Tingkat Partisipasi anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 3. Tingkat Partisipasi anak usia 13-15 Tahun yang	78.862.529.910,00	Disdikbud

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
			berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Tingkat Partisipasi Anak Usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Outcome: Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Indeks kesejahteraan Sosial	407.582.450,00	Dinsos
Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	Outcome: Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan bagi masyarakat	1. Tingkat Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Anak Usia Dini	78.862.529.910,00	Disdikbud

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
			2. Tingkat Partisipasi anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 3. Tingkat Partisipasi anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Tingkat Partisipasi Anak Usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Outcome: Meningkatnya pendayagunaan inovasi	Persentase PD yang Menerapkan Inovasi Daerah	1.241.291.300,00	Bappeda
Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Outcome: Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Prevalensi Stunting 2. Persentase peningkatan Succes rate TB 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terstandar 4. Persentase pemenuhan perbekalan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan	55.161.668.048,00	Dinkes

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
Pencegahan dan Penurunan Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Outcome: Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Prevalensi Stunting 2. Persentase peningkatan Succes rate TB 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terstandar 4. Persentase pemenuhan perbekalan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan	55.161.668.048,00	Dinkes
Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Outcome: Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Prevalensi Stunting 2. Persentase peningkatan Succes rate TB 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terstandar 4. Persentase pemenuhan perbekalan kesehatan	55.161.668.048,00	Dinkes

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
			pada fasilitas pelayanan kesehatan		
Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Outcome: Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Prevalensi Stunting 2. Persentase peningkatan Succes rate TB 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terstandar 4. Persentase pemenuhan perbekalan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan	55.161.668.048,00	Dinkes
Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Outcome: Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	20.615.850,00	DKP3

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Outcome: Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	20.615.850,00	DKP3
Eliminasi Penyakit Kusta & Schisrosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Outcome: Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Prevalensi Stunting 2. Persentase peningkatan Succes rate TB 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terstandar 4. Persentase pemenuhan perbekalan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan	55.161.668.048,00	Dinkes

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Outcome: Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Prevalensi Stunting 2. Persentase peningkatan Succes rate TB 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terstandar 4. Persentase pemenuhan perbekalan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan	55.161.668.048,00	Dinkes
Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Outcome: Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Prevalensi Stunting 2. Persentase peningkatan Succes rate TB 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terstandar 4. Persentase pemenuhan perbekalan kesehatan	55.161.668.048,00	Dinkes

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
			pada fasilitas pelayanan kesehatan		
Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Outcome: Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	2.250.666.000,00	Dinkes
Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	210.489.000,00	Disdikbud
Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Outcome: Meningkatnya pendayagunaan inovasi	Persentase PD yang Menerapkan Inovasi Daerah	1.241.291.300,00	Disporapar
Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Outcome: Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	3.432.773.350,00	

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
PN 5					
Tidak ada kegiatan prioritas utama yang relevan dengan Kota Sukabumi					
PN 6					
Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Outcome: Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Indeks kesejahteraan Sosial	407.582.450,00	Dinsos
Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	Program Pengembangan UMKM	Outcome: Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM Menjalين Kemitraan	350.000.000,00	Diskumindag
Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	Program Pengembangan UMKM	Outcome: Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM Menjalين Kemitraan	350.000.000,00	Diskumindag

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Outcome: Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	649.603.550,00	DPUTR
PN 7					
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Outcome: Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Persentase rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti	1.172.159.000,00	Inspektorat
Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah	Outcome: Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Nilai Aspek Pengembangan Karir	891.184.100,00	BKPSDM
Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Outcome: Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	239.799.500,00	Diskominfo

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Outcome: Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	4.853.405.800,00	BPKPD
PN 8					
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Outcome: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	827.996.150,00	Kesbangpol
Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Wawasan Pemajuan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	210.489.000,00	Disdikbud

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
Program Makan Bergizi Gratis	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Outcome: Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	20.615.850,00	DKP3
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Outcome: Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan bagi masyarakat	1. Tingkat Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Anak Usia Dini 2. Tingkat Partisipasi anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 3. Tingkat Partisipasi anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Tingkat Partisipasi Anak Usia 7 -18	78.862.529.910,00	Disdikbud

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
			tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	Outcome: Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan bagi masyarakat	1. Tingkat Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Anak Usia Dini 2. Tingkat Partisipasi anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 3. Tingkat Partisipasi anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama	78.862.529.910,00	Disdikbud

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA SUKABUMI	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	PAGU 2025	PD
			4. Tingkat Partisipasi Anak Usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Outcome: Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Prevalensi Stunting 2. Persentase peningkatan Succes rate TB 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terstandar 4. Persentase pemenuhan perbekalan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan	55.161.668.048,00	Dinkes

Sumber: Hasil Analisa Bappeda, 2025

Tabel 4.7
Sinkronisasi Program Prioritas dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat

NO	JABAR ISTIMEWA	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
1	Langkah Kahiji			
	(Pembangunan Infrastruktur Jalan sampai ke Pelosok Desa dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan)	Program Penyelenggaraan Jalan	18.599.821.335,00	DPUTR
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.992.085.404,00	Dishub
		Program Kawasan Permukiman	12.029.156.400,00	DPUTR
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	824.122.750,00	DPUTR
2	Langkah Kedua			
	(Pembangunan Jaringan Irigasi di Seluruh Wilayah Pertanian dan Mendorong Ekosistem Ekonomi Pertanian Organik)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.783.411.983,00	DPUTR
3	Langkah Katilu			

NO	JABAR ISTIMEWA	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	(Pengembangan Pendidikan Berkarakter, SMA/SMK Gratis dan Penambahan Ruang Kelas Baru)	Program Pengelolaan Pendidikan	78.862.529.910,00	Disdikbud
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	79.889.800,00	Disdikbud
		Program Pengembangan Kurikulum	37.270.000,00	Disdikbud
4	Langkah Kaopat			
	(Pengembangan Lapangan Kerja Baru)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	485.571.000,00	Disnaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	56.027.500,00	Disnaker
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	50.963.000,00	Disporapar
		Program Pengembangan UMKM	350.000.000,00	Diskumindag
5	Langkah Kalima			
	(Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan Penambahan Layanan Khusus)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.229.541.938,00	Dinkes

NO	JABAR ISTIMEWA	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	55.161.668.048,00	Dinkes
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.250.666.000,00	Dinkes
6	Langkah Kagenep			
	(Penanganan Stunting dan Gizi Buruk)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	55.161.668.048,00	Dinkes
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.798.396.000,00	Dinkes
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	797.471.000,00	Dinkes
7	Langkah Katujuh			
	(Pemulihan Kondisi Lingkungan Jawa Barat)	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	397.595.250,00	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	293.959.000,00	DLH

NO	JABAR ISTIMEWA	PROGRAM KOTA SUKABUMI	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
8	Langkah Kadalapan			
	(Pengembangan Pengelolaan Sampah Mandiri)	Program Pengelolaan Persampahan	2.445.901.370,00	DLH
9	Langkah Kasalapan			
	(Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi Birokrasi)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	26,381,151,550	Kecamatan
		Program Pengembangan Kebudayaan	210.489.000,00	Disdikbud
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	629,892,188,087	Seluruh PD

Sumber: Hasil Analisa Bappeda, 2025

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan Daerah Tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Kota serta Forum Perangkat Daerah (FPD) di seluruh Perangkat Daerah diluar Kecamatan. Musrenbang dan FPD menjadi media/sarana untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat. Selanjutnya pada perubahan anggaran ini dilakukan beberapa penyesuaian atas hasil evaluasi kinerja pada Triwulan I, serta melihat kondisi terkini beberapa capaian pembangunan dan mensinkronkan dengan arah kebijakan pembangunan untuk lima tahun kedepan khususnya Tahun 2025.

Pada pelaksanaan perubahan RKPD ini, penentuan program dan kegiatan Daerah Tahun 2025 tetap berpedoman pada Rancangan Akhir RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2029 yang secara simultan juga sedang dilakukan proses penyusunan dengan menterjemahkan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi dengan tetap memperhatikan hasil penyesuaian proyeksi pendapatan dan belanja daerah khususnya yang berasal dari dana transfer dan SiLPA, serta memperhatikan keterkaitannya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

5.1 Rekapitulasi Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan hasil analisis terhadap rencana kegiatan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2025, bahwa untuk tujuan optimalisasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 terutama di Semester II, diperlukan perubahan anggaran untuk membiayai penambahan sub kegiatan, adanya penghapusan kegiatan, pergeseran/perubahan pagu, serta penambahan dan pengurangan output sub kegiatan.

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Sukabumi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, serta urusan lainnya sebagai pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu mencakup pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kota Sukabumi 2025-2045, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang teretuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2025-2029, dan melanjutkan program-program prioritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil yang direncanakan. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, untuk mewujudkan belanja yang memenuhi azas keadilan, kepatutan, dan rasionalitas, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan.

Dalam upaya pencapaian target-target, proses pengalokasian anggaran harus sejalan dengan perencanaan pada indikator-indikator program/kegiatan/sub kegiatan. RKPD Perubahan Tahun 2025 sebagai salah satu tahapan dalam proses penyusunan APBD dapat berperan sebagai alat dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas dengan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sukabumi.

Fokus utama dalam perubahan RKPD Tahun 2025 ini adalah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan Visi, Misi dan Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode Tahun 2025-2030, juga program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. Selain itu dilakukan juga dalam rangka pemenuhan belanja wajib dan mengikat, prioritas pembangunan, serta pemenuhan program di setiap perangkat daerah disesuaikan dengan prioritas dan ketersediaan anggaran. Secara rinci perubahan pagu anggaran perangkat daerah pada perubahan RKPD Tahun 2025 ini tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Pagu Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	APBD TA 2025	PERUBAHAN APBD TAHUN 2025 (Parsial)	PERUBAHAN RKPD 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	253,565,082,327	254,735,886,977	258,549,038,249	3,813,151,272	1.50
2	Dinas Kesehatan	505,371,959,394	509,312,866,307	568,947,466,085	59,634,599,778	11.80
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	64,384,094,828	75,098,248,589	78,327,808,708	3,229,560,119	5.02
4	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	13,236,221,593	13,121,506,743	13,657,857,446	536,350,703	4.05
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,178,796,764	3,992,994,514	4,351,589,368	358,594,854	8.58
6	Dinas Sosial	7,655,271,421	7,172,558,271	7,363,383,700	190,825,429	2.49
7	Dinas Tenaga Kerja	4,656,862,620	4,411,127,220	4,322,649,759	-88,477,461	-1.90
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	13,521,510,591	13,344,716,091	13,903,115,215	558,399,124	4.13
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	13,103,891,981	13,144,911,491	14,630,208,810	1,485,297,319	11.33
10	Dinas Lingkungan Hidup	29,224,310,613	30,300,094,813	30,776,359,624	476,264,811	1.63

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	APBD TA 2025	PERUBAHAN APBD TAHUN 2025 (Parsial)	PERUBAHAN RKPD 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,816,205,639	6,408,052,789	6,242,710,027	-165,342,762	-2.43
12	Dinas Perhubungan	18,358,329,505	18,178,600,859	19,189,147,078	1,010,546,219	5.50
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	6,861,069,043	6,497,280,793	6,613,967,604	116,686,811	1.70
14	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	11,519,128,574	10,840,764,974	12,518,286,623	1,677,521,649	14.56
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,867,989,145	5,421,633,045	5,979,030,338	557,397,293	9.50
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	11,458,392,361	11,739,338,182	13,421,234,944	1,681,896,762	14.68
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7,086,254,094	6,855,203,824	6,894,724,092	39,520,268	0.56
18	Sekretariat Daerah	53,724,322,055	50,086,772,270	56,978,062,554	6,891,290,284	12.83
19	Sekretariat DPRD	57,360,514,735	49,581,033,735	60,182,636,651	10,601,602,916	18.48
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18,149,682,653	15,397,053,303	16,779,124,206	1,382,070,903	7.61

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	APBD TA 2025	PERUBAHAN APBD TAHUN 2025 (Parsial)	PERUBAHAN RKPD 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	67,370,770,898	63,891,330,624	59,157,785,880	-4,733,544,744	-7.03
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8,448,172,972	7,914,807,972	8,656,091,776	741,283,804	8.77
23	Inspektorat Daerah	11,837,447,854	11,647,833,854	11,794,509,314	146,675,460	1.24
24	Kecamatan Cikole	15,846,261,351	16,166,301,301	15,526,681,505	-639,619,796	-4.04
25	Kecamatan Gunung Puyuh	12,106,702,085	12,086,717,085	10,902,735,838	-1,183,981,247	-9.78
26	Kecamatan Citamiang	12,984,122,323	12,921,833,923	13,197,647,943	275,814,020	2.12
27	Kecamatan Warudoyong	13,896,380,505	13,889,727,005	13,436,879,743	-452,847,262	-3.26
28	Kecamatan Baros	10,363,706,723	10,311,193,623	10,015,899,301	-295,294,322	-2.85
29	Kecamatan Lembur Situ	13,345,659,864	13,261,544,864	12,840,423,141	-421,121,723	-3.16
30	Kecamatan Cibeureum	11,190,040,790	11,129,769,190	10,814,624,627	-315,144,563	-2.82
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10,360,385,826	9,662,316,376	9,872,998,897	210,682,521	2.03
JUMLAH TOTAL USULAN RKPD		1,293,849,541,127	1,288,524,020,607	1,375,844,679,046	87,320,658,439	6.75

Sumber: SIPD (diolah)

Berdasarkan data pagu anggaran pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua perangkat daerah pada dasarnya mendapatkan penambahan anggaran. Khusus untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, secara jumlah total terlihat mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan anggaran BTT yang dialihkan untuk menutupi kekurangan anggaran untuk belanja prioritas walaupun tetap menyediakan anggaran BTT untuk hal yang sifatnya darurat dan mendesak. Secara rinci penambahan anggaran untuk perangkat daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, penyesuaian SiLPA anggaran bersumber Bantuan Operasional Sekolah, penghargaan penyelenggaraan FPD terbaik, pikir, serta pemenuhan operasional kantor.
- 2) Dinas Kesehatan: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, penyesuaian SiLPA terutama bersumber dari BLUD, pembayaran premi PBI BPJS, penghargaan pengendalian dan evaluasi terbaik, serta anggaran pendukung untuk peningkatan PAD.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, pemeliharaan dan rehab gedung kantor termasuk, penambahan anggaran hibah dan pikir, pembelian tanah untuk pemakaman serta pemenuhan operasional kantor.
- 4) Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, penghargaan pengendalian dan evaluasi terbaik, anggaran pendukung peningkatan PAD dan penertiban, serta pemenuhan operasional kantor.
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, operassional penanganan bencana, serta pemenuhan operasional kantor.
- 6) Dinas Sosial: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala serta pemenuhan operasional kantor.

- 7) Dinas Tenaga Kerja: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, penambahan anggaran hibah, serta pemenuhan operasional kantor.
- 8) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, operasional PKK, rehab gedung dan meubelair serta pemenuhan operasional kantor.
- 9) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, supporting pembibitan unggul, penambahan untuk penunjang peningkatan PAD, hibah dan pokir serta pemenuhan operasional kantor.
- 10) Dinas Lingkungan Hidup: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, penambahan BBM untuk angkutan sampah, lembur petugas sampah, penghargaan FPD terbaik, supporting peningkatan PAD, serta pemenuhan operasional kantor.
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, serta pemenuhan operasional kantor.
- 12) Dinas Perhubungan: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, supporting peningkatan PAD, serta pemenuhan operasional kantor.
- 13) Dinas Komunikasi dan Informatika: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, serta pemenuhan operasional kantor.
- 14) Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, supporting peningkatan PAD, penambahan untuk supporting dekranasda, operasional dan pelatihan koperasi merah putih, serta pemenuhan operasional kantor.
- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, supporting peningkatan PAD, serta pemenuhan operasional kantor.

- 16) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, supporting peningkatan PAD, bonus atlet berprestasi, supporting pelaksanaan Porprov, sarana olahraga, hibah pokir, serta pemenuhan operasional kantor.
- 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, serta pemenuhan operasional kantor.
- 18) Sekretariat Daerah: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, operasional pimpinan, hibah dan pokir serta pemenuhan operasional kantor.
- 19) Sekretariat DPRD: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, pemenuhan gaji dan tunjangan anggota DPRD, kegiatan reses, kegiatan pendukung operasional fraksi serta pemenuhan operasional kantor.
- 20) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, penyusunan dokumen perencanaan, serta pemenuhan operasional kantor.
- 21) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, supporting peningkatan PAD, penyesuaian anggaran BTT, serta pemenuhan operasional kantor.
- 22) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, pelaksanaan assesment dan seleksi terbuka, kegiatan pengembangan kompetensi pegawai ASN, serta pemenuhan operasional kantor.
- 23) Inspektorat Daerah: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, serta pemenuhan operasional kantor.
- 24) Kecamatan Cikole: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, supporting peningkatan PAD, implementasi program padat karya dan kampung wakaf, pengalihan program P2RW, penghargaan musrenbang terbaik, serta pemenuhan operasional kantor.

- 25) Kecamatan Gunung Puyuh: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, supporting peningkatan PAD, implementasi program padat karya dan kampung wakaf, pengalihan program P2RW, serta pemenuhan operasional kantor.
- 26) Kecamatan Citamiang: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, supporting peningkatan PAD, implementasi program padat karya dan kampung wakaf, pengalihan program P2RW, serta pemenuhan operasional kantor.
- 27) Kecamatan Warudoyong: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, supporting peningkatan PAD, implementasi program padat karya dan kampung wakaf, pengalihan program P2RW, penghargaan musrenbang terbaik, serta pemenuhan operasional kantor.
- 28) Kecamatan Baros: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, supporting peningkatan PAD, implementasi program padat karya dan kampung wakaf, pengalihan program P2RW, serta pemenuhan operasional kantor.
- 29) Kecamatan Lembur Situ: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, supporting peningkatan PAD, implementasi program padat karya dan kampung wakaf, pengalihan program P2RW, serta pemenuhan operasional kantor.
- 30) Kecamatan Cibeureum: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, supporting peningkatan PAD, implementasi program padat karya dan kampung wakaf, pengalihan program P2RW, serta pemenuhan operasional kantor.
- 31) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: adanya penambahan untuk belanja pegawai PNS dan PPPK termasuk kenaikan berkala, apresiasi paskibraka, dukungan untuk program pemberantasan premanisme, serta pemenuhan operasional kantor.

5.2 Rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Secara umum program prioritas terkait erat dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran daerah, dimana tujuan dan sasaran daerah merupakan penjabaran dari visi, misi yang ingin dicapai. Sasaran dijabarkan ke dalam indikator sasaran, yang dijabarkan kembali melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, dengan demikian maka diharapkan sasaran daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai dari akumulasi output dari setiap pelaksanaan kegiatan,

Daftar kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan dalam bentuk Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) menurut kelompok Perangkat Daerah pada Dokumen Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 atau **Buku II**, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 ini.

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka Ekonomi Daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD yang memuat kegiatan lanjutan, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan Pembangunan Daerah melalui Program Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025 - 2029 yang merupakan tahun pertama pelaksanaannya.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak terkait, maka perlu dirumuskan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
2. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (PPASP) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

Akhirnya semoga perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2025 ini bisa dilaksanakan dengan baik dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Semoga seluruh pihak yang terkait berkontribusi aktif dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan pemantapan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing daerah.

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI